



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERENCANAAN PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN
PENDEKATAN PARTISIPATIF**
(Studi Kasus di RW 01 Kelurahan Pulau Panggang Kabupaten
Kepulauan Seribu)

TESIS

IMRAN GURICCI

1006744093

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM PASCA SARJANA ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
DEPOK
NOVEMBER 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERENCANAAN PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN
PENDEKATAN PARTISIPATIF**

(Studi Kasus di RW 01 Kelurahan Pulau Pangang Kabupaten
Kepulauan Seribu)

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Kesejahteraan Sosial

IMRAN GURICCI

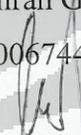
1006744093

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM PASCASARJANA ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
KEKHUSUSAN PERENCANAAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN
DEPOK
NOVEMBER 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.



Nama : Imran Guricci
NPM : 1006744093
Tanda Tangan : 
Tanggal : 27 November 2012

LEMBARAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
 Nama : Imran Guricci
 NPM : 1006744093
 Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
 Kekhususan : Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan
 Judul Tesis : Perencanaan Pengelolaan Sampah Dengan Pendekatan Partisipatif. (Studi Kasus di RW 01 Kelurahan Pulau Panggang Kabupaten Kepulauan Seribu)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kesejahteraan Sosial (M.Kessos) Kekhususan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan pada Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Sofyan Cholid, S.Sos, M.Si (.....)

Penguji : Triyanti Anugrahini, S.Sos, M.Si (.....)

Penguji : Dra. Fitriyah, M.Si (.....)

Penguji : Fentiny Nugroho, MA, Ph.D (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 27 November 2012

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah saya ucapkan, karena hanya dengan pertolongan-Nya lah sehingga tesis ini, dengan segala kekurangannya, bisa saya selesaikan. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikutinya.

Saya mengucapkan terima kasih yang teramat dalam kepada Bapak Sofyan Cholid, S.Sos, M.Si yang dengan penuh kesungguhan dan di tengah-tengah kesibukannya bersedia membimbing saya dalam menulis tesis ini. Demikian juga kepada Ibu Fentiny Nugroho, MA, Ph.D dan Ibu Dra. Fitriyah, M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Program Pasca Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial serta Ibu Triyanti Anugrahini, S.Sos, M.Si yang bersedia menjadi penguji tesis ini dan memberikan banyak masukan perbaikan.

Tesis ini saya persembahkan kepada Ibunda tercinta, Hj. Yama H. Ilyas, yang selalu memberikan nasehat, semangat dan doa-doanya sehingga saya bisa menyelesaikan studi ini. Juga kepada Almarhum Ayahanda tercinta, Guricci Lanny, yang telah menanamkan semangat untuk berjuang semenjak saya kecil. Kepada Istri saya tercinta, Indah Permatasari, terima kasih atas doa dan kesabarannya, serta dukungannya dalam menyelesaikan tesis ini. Ananda tercinta Izzaki Guricci, terima kasih karena telah memberikan motivasi dengan keceriaannya di hari-hari penulisan tesis ini. Tak lupa kepada saudara-saudara saya tersayang : kak Irma, kak Erna, adik Isma dan adik Iqbal, terimakasih banyak atas doa dan semangatnya. Juga kepada segenap keluarga besar di kampung halaman, saya ucapkan terimakasih banyak atas dukungannya.

Kepada Lurah Pulau Panggang, Ketua RW 01 Kelurahan Pulau Panggang, Ketua LMK 01 Kelurahan Pulau Panggang, ketua-ketua RT di RW 01 Kelurahan Pulau Panggang dan seluruh warga RW 01 yang turut membantu saya saat mengumpulkan data di lokasi penelitian, saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga mendapat balasan yang lebih baik. Amin.

Depok, 27 November

2012



Imran Guricci



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Imran Guricci
NPM : 1006744093
Program Studi : Pasca Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial
Departemen : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Perencanaan Pengelolaan Sampah dengan Pendekatan Partisipatif (Studi Kasus di RW 01 Kelurahan Pulau Panggang Kabupaten Kepulauan Seribu)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 27 November 2012
Yang menyatakan

(Imran Guricci)

ABSTRAK

Nama : Imran Guricci
Program Studi : Pasca Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial
Judul : Perencanaan Pengelolaan Sampah dengan Pendekatan Partisipatif
(Studi Kasus di RW 01 Kelurahan Pulau Panggang Kabupaten
Kepulauan Seribu)

Masalah sampah yang dihadapi warga RW 01 Kelurahan Pulau Panggang membutuhkan sebuah solusi. Tesis ini hadir untuk merespon masalah tersebut dengan jalan membuat perencanaan dengan melibatkan partisipasi warga RW 01 untuk mencari solusi terhadap masalah yang mereka hadapi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa masalah sampah di RW 01 Kelurahan Pulau Panggang disebabkan oleh faktor perilaku, predisposisi, penguat dan modal sosial, sebagai bagian dari faktor manusia dan sosial, serta faktor lingkungan, teknologi, finansial dan fisik sebagai bagian dari faktor non manusia. Dengan mempertimbangkan aset komunitas warga RW 01 maka diusulkan tiga program besar yaitu : Program Membuang Sampah pada Tempatnya, Program Peningkatan Kerjasama antara *stakeholders* dan Program Pemanfaatan Sampah Plastik.

Kata Kunci :

Pengembangan masyarakat, perencanaan partisipatif, pengelolaan sampah

ABSTRACT

Name : Imran Guricci
Study Program : Master of Social Welfare Science
Title : Waste Management Planning by Participative Approach (case study at RW 01 Kelurahan Pulau Panggang in thousand islands)

Waste problem faced by a community in RW 01 Kelurahan Pulau Panggang needs a solution. This thesis is written to respond the problem by arranging planning with the community participations to meet a solution of the problem. This research uses qualitative approach with descriptive style. This research concludes that the waste problem is caused by behavior, predisposition, reinforcement, and social capital factors included in human and social factor, in addition environmental, technology, financial and physical factors included in non-human factor. By considering the community asset, this research proposes three main programs to reduce the waste problem. They are: Program Membuang Sampah pada Tempatnya, Program Peningkatan Kerjasama antara *stakeholders* and Program Pemanfaatan Sampah Plastik.

Key Words :

Community development, participative planning, waste management

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBARAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBARAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Metode Penelitian	10
1.5.1 Pendekatan Penelitian	10
1.5.2 Jenis Penelitian	11
1.5.3 Lokasi dan Waktu Penelitian	11
1.5.4 Teknik Pemilihan Informan	12
1.5.5 Teknik Pengumpulan Data	14
1.5.6 Teknik Analisis Data	17
1.5.7 Teknik Meningkatkan Keabsahan Data Penelitian	19
2. TINJAUAN PUSTAKA	20
2.1 Kesejahteraan Sosial	20
2.2 Pembangunan Sosial	21
2.3 Pemberdayaan	23
2.4 Partisipasi Masyarakat	25
2.5 Pengembangan Masyarakat	27
2.5.1 Pendekatan Pengembangan Masyarakat	28
2.5.2 Tahapan Pengembangan Masyarakat	28

2.6	Perencanaan Partisipatoris	30
2.6.1	Pengembangan Masyarakat dan Perencanaan Partisipatoris ...	30
2.6.2	Pengertian Perencanaan Partisipatoris	31
2.6.3	Tahapan Perencanaan Partisipatoris	32
2.7	Pengertian Komunitas	36
2.8	Teknik <i>Assessment</i> Kebutuhan dan Aset Komunitas	38
2.8.1	Kebutuhan Komunitas	38
2.8.2	Teknik <i>Assessment</i>	38
2.9	Sampah	40
2.9.1	Pembagian Sampah	41
2.9.2	Bahaya Sampah	41
2.9.3	Pengelolaan Sampah	43
3.	GAMBARAN UMUM LOKASI DAN PENGELOLAAN SAMPAH DI	
	RW 01 KELURAHAN PULAU PANGGANG.....	50
3.1.	Kondisi Geografi dan Demografi Kelurahan Pulau Panggang	50
3.2	Demografi Kelurahan Pulau Panggang	51
3.3	Penggunaan Lahan	53
3.4	Pengelolaan Sampah di Pulau Panggang	54
4.	TEMUAN LAPANGAN	58
4.1	Masalah Sampah di RW 01 Kelurahan Pulau Panggang	58
4.2	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masalah Sampah di RW 01	60
4.2.1	Faktor Manusia dan Sosial	60
4.2.2	Faktor Non Manusia	74
4.2.3	Faktor Regulasi, Kebijakan dan Program Terkait	82
4.3	Aset Komunitas	86
4.3.1	Modal Fisik	86
4.3.2	Modal Teknologi	87
4.3.3	Modal Manusia	86
4.3.4.	Modal Sosial	88
5.	ANALISIS DAN USULAN PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH DI	
	RW 01 PULAU PANGGANG	92
5.1	Masalah Sampah di RW 01 (Tahap 1)	92

5.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masalah Sampah di RW 01	93
5.2.1 Faktor Manusia dan Sosial (Tahap 2)	93
5.2.2 Faktor Non Manusia (Tahap 3)	93
5.2.3 Faktor Regulasi, Kebijakan dan Program (Tahap 4)	94
5.3 Aset Komunitas	98
5.4 <i>Planning</i> (Tahap 5)	99
5.4.1 Rencana Program Aksi	99
5.4.2 Indikator Keberhasilan Program dan Alur Perubahan	106
6. KESIMPULAN DAN SARAN	109
6.1 Kesimpulan	109
6.2 Saran	114
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



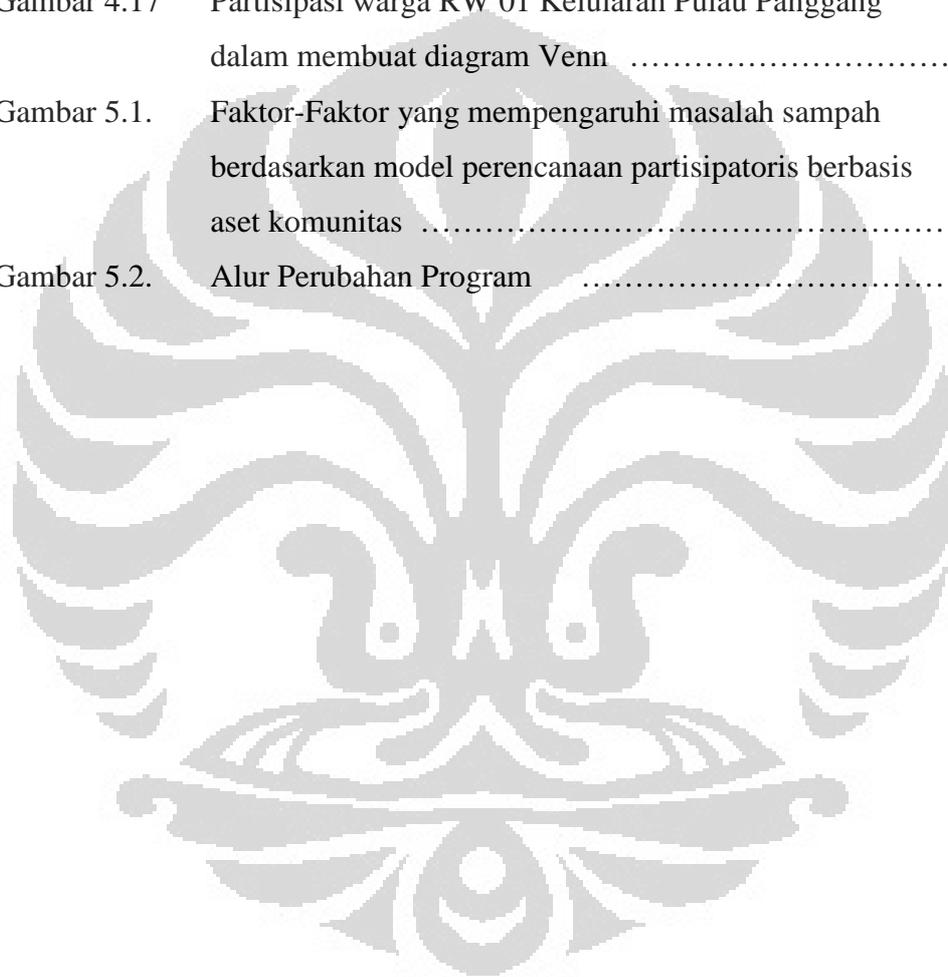
DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Volume Timbunan Sampah Kota Besar Di Indonesia	2
Tabel 1.2.	Perbandingan kepadatan penduduk di Pulau Seribu	11
Tabel 1.3.	Perbandingan jumlah penduduk di Pulau Panggang	12
Tabel 1.4.	Waktu Tahapan Penelitian	12
Tabel 1.5	<i>Theoretical Sampling</i>	13
Tabel 2.1.	Perbandingan ketiga sistem pengolahan sampah	46
Tabel 3.1.	Keadaan RT/RW di Kelurahan Pulau Panggang	50
Tabel 3.2.	Perkembangan jumlah penduduk Pulau Panggang dan pulau-pulau lain	51
Tabel 4.1.	Rangkuman Temuan Lapangan	90
Tabel 5.1.	Rangkuman faktor-faktor yang mempengaruhi masalah sampah, aset komunitas dan tawaran program	104
Tabel 5.2	Indikator Keberhasilan Program	106

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Persentase sampah DKI Jakarta berdasarkan sumber	5
Gambar 2.1.	Model Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas	32
Gambar 2.2.	Hubungan elemen fungsional pengelolaan sampah	45
Gambar 2.3.	Alur Pikir	49
Gambar 3.1.	Peta Pulau Panggang	50
Gambar 3.2.	Persentase jumlah penduduk usia produktif	52
Gambar 3.3.	Persentase jumlah penduduk berdasarkan pendidikan	52
Gambar 3.4.	Persentase jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan	52
Gambar 3.5.	Perbandingan Persentase jumlah penduduk dan KK antar Pulau Pramuka dan Pulau Panggang	53
Gambar 3.6.	Tempat sampah warga	54
Gambar 3.7.	Hasil kerajinan tangan buatan ibu-ibu RW 01	55
Gambar 3.8.	Gerobak Sampah dan LPS RW 01	55
Gambar 3.9.	Lokasi Pembuangan Sampah RW 01	56
Gambar 3.10	Pemusnahan dengan ditimbun	56
Gambar 3.11	Pemusnahan sampah dengan dibakar	56
Gambar 3.12	Pola Pengelolaan Sampah di RW 01 Pulau Panggang	56
Gambar 4.1.	Sampah yang tersebar di lingkungan warga	58
Gambar 4.2	Sampah yang berakhir di lau	59
Gambar 4.3.	Sampah yang berakhir di LPS	59
Gambar 4.4.	Tempat pewadahan sampah masyarakat RW 01	61
Gambar 4.5.	Sampah yang dibuang ke urukan	63
Gambar 4.6	Sampah yang dibuang ke LPS	63
Gambar 4.7	Sampah yang dibuang ke laut	46
Gambar 4.8.	Hasil kerajinan tangan dari sampah plastik	66
Gambar 4.9.	Sampah yang siap untuk dijual	68
Gambar 4.10	Lapak tempat penjualan sampah	68
Gambar 4.11.	Bekas tempat mesin pembakar sampah di LPS RW 01 dan mesin pembakar sampah di LPS RW 03	79

Gambar 4.12.	Reklamasi pantai untuk kebutuhan lahan tinggal dengan karang dan sampah	81
Gambar 4.13.	Lokasi Pembuangan Sampah (LPS) RW 01	86
Gambar 4.14.	Kantor Sekretariat RW 01 Kelurahan Pulau Panggang	87
Gambar 4.15.	Gerobak Pengangkut Sampah RW 01	87
Gambar 4.16.	Aktifitas daur ulang sampah oleh beberapa ibu Rumah Tangga RW 01 Kelurahan Pulau Panggang	88
Gambar 4.17	Partisipasi warga RW 01 Kelularah Pulau Panggang dalam membuat diagram Venn	89
Gambar 5.1.	Faktor-Faktor yang mempengaruhi masalah sampah berdasarkan model perencanaan partisipatoris berbasis aset komunitas	96
Gambar 5.2.	Alur Perubahan Program	107



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk dunia terus meningkat. Menurut Morgan (2003) pada tahun 1650 jumlah penduduk dunia mencapai 500 juta jiwa. Pada tahun 1850, jumlah penduduk dunia mencapai 1,2 milyar jiwa. Penduduk dunia meningkat hampir mencapai 2 milyar jiwa pada tujuh puluh tahun kemudian (1920). Pada tahun 1950, 1,5 milyar jiwa penduduk bertambah dan pada tahun 1980 penduduk dunia kira-kira mencapai 4,5 milyar jiwa. Menurut lembaga Demografi FE-UI (2000) pada tahun 1665 diperkirakan terdapat 500 juta jiwa penduduk dunia. Perkembangan di bidang pertanian dan kedokteran telah mendorong pertumbuhan penduduk yang sangat cepat. Dibutuhkan waktu sekitar 200 tahun untuk mencapai jumlah penduduk dua kali lipat dari sebelumnya, yaitu menjadi 1 milyar pada tahun 1850. Pada tahun berikutnya, waktu yang dibutuhkan lebih pendek lagi, yaitu 80 tahun, yang terjadi pada tahun 1930 dengan jumlah penduduk sebanyak 2 milyar jiwa. Selanjutnya, untuk mencapai 4 milyar, waktu yang dibutuhkan menjadi sangat singkat, yaitu hanya diperlukan waktu selama 45 tahun yang dicapai pada tahun 1975 (Wardhani, 2004, h. 1).

Pertumbuhan jumlah penduduk ini juga terjadi di Indonesia. Menurut Suyoto (2008), pada tahun 1971 jumlah penduduk Indonesia mencapai 119,20 juta jiwa. 25 tahun kemudian (1996) jumlah penduduk Indonesia mencapai 198,20 juta jiwa dan pada tahun 1999 menjadi 204,78 juta jiwa. Jika pertumbuhan penduduk terus meningkat, maka pada tahun 2020 jumlah penduduk diperkirakan menjadi 262,4 juta jiwa, dengan asumsi pertumbuhan 0,9% per tahun (h.1).

Pertumbuhan jumlah penduduk yang makin cepat tersebut menurut Branch (1996) mengundang masalah. Masalah di pencemaran lingkungan dan ketegangan sosial; berkurangnya sumber daya alam seperti kayu, minyak, dan air; serta mungkin mengakibatkan pula menurunnya rata-rata standar kehidupan pada masa yang akan datang (Wardhani, 2004, h. 1).

Masalah lain yang ditimbulkan dari pertumbuhan penduduk adalah masalah sampah. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), akibat dari semakin bertambah jumlah penduduk, dan meningkatnya aktivitas konsumsi serta aktivitas lainnya adalah bertambahnya buangan/limbah yang dihasilkan. Khusus sampah atau limbah padat rumah tangga, peningkatan jumlah yang dihasilkan di Indonesia diperkirakan akan bertambah 5 kali lipat pada tahun 2020 (Suyoto, 2008, h. 2). Tabel yang dikutip Wibowo (2009) berikut menunjukkan timbunan volume sampah yang semakin meningkat setiap tahunnya di kota-kota besar di Indonesia.

Tabel 1.1 : Volume Timbunan Sampah Kota Besar di Indonesia (2007)

No	Nama Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Rata-rata timbunan sampah (m ³ /hari)		
		2005	2006	2007	2005	2006	2007
1	Surabaya	2.599.796	2.740.490	2.809.679	6.700,00	6.234,00	9.560,00**
2	Bandung	2.141.837	2.453.302	2.520.812	6.473,70	Td	7.500,00
3	Jakarta Timur	2.385.121	2.434.163	2.413.875	5.442,00	5.272,80	6.592,70
4	Jakarta Selatan	1.708.269	1.79.024	1.738.248	5.223,00	Td	5.663,00
5	Jakarta Barat	1.565.406	1.573.619	1.565.947	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6	Jakarta Pusat	897.789	893.195	888.419	4.651,00	Td	5.280,00
7	Jakarta Utara	1.176.307	1.182.749	1.257.952	4.180,00	Td	5.161,00
8	Palembang	1.500.872	1.520.199	1.369.239	4.698,00	Td	5.100,00*
9	Medan	2.068.400	2.068.400	2.067.288	Td	4.382,00	4.985,00
10	Semarang	1.424.000	1.406.999	1.445.334	4.274,00	3.805,00	4.500,00
11	Depok	1.335.734	1.369.461	1.420.480	Td	Td	3.764,00
12	Makassar	1.160.011	1.179.024	1.223.540	3.580,00	Td	3.661,81
13	Tangerang	1.700.000	1.914.316	1.537.558	4.225,00	5.000,00	3.367,00
14	Bekasi	Td	1.914.316	2.066.913	Td	Td	2.790,00

Ket : Td = Tidak ada data; * data hasil konfirmasi (kuesioner persampahan domestik); ** data SLDH Kota Surabaya 2007

Sumber : Telah diolah kembali

Dari tabel di atas terlihat bahwa beberapa kota menunjukkan pertumbuhan penduduk berbanding lurus dengan pertumbuhan volume sampah. Menegaskan hal ini, menurut Basriyanta (2007) bahwa semakin banyak penduduk suatu wilayah, semakin banyak sampah yang dihasilkan dan semakin rumit juga

permasalahan sampah yang dihasilkan. Di kesempatan yang lain, Beede, Bloom dan Tualeka (2003), mengungkapkan peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan jumlah sampah yang dihasilkan pun meningkat. (Aziz, 2004, h. 4)

Pertumbuhan sampah yang terus meningkat ini disebabkan oleh banyak faktor. Sudrajat (2009) mengemukakan beberapa faktor tersebut yaitu ;

1. Volume sampah sangat besar sehingga melebihi kapasitas daya tampung tempat pembuangan sampah akhir atau TPA.
2. Lahan TPA semakin sempit karena tergeser tujuan penggunaan lain.
3. Teknologi pengelolaan sampah tidak optimal, sehingga sampah lambat membusuk. Hal ini menyebabkan percepatan peningkatan volume sampah lebih besar daripada pembusukannya. Oleh karena itu, selalu diperlukan perluasan areal TPA baru.
4. Sampah yang sudah matang dan telah berubah menjadi kompos tidak dikeluarkan dari TPA karena berbagai pertimbangan.
5. Manajemen pengolahan sampah tidak efektif, sehingga seringkali menjadi penyebab distorsi dengan masyarakat setempat.
6. Pengelolaan sampah dirasakan tidak memberikan dampak positif kepada lingkungan.
7. Kurangnya dukungan kebijakan dari pemerintah, terutama dalam memanfaatkan produk sampingan dari sampah, sehingga menyebabkan tertumpuknya produk tersebut di TPA. (h. 6)

Pertumbuhan volume sampah yang terus meningkat akan menjadi masalah jika tidak dikelola dengan baik, sebagaimana menurut Sony (2008) apabila sampah tidak dikelola dengan baik dan sehat maka akan berdampak buruk pada:

1. Kesehatan. Hal ini dapat menyebabkan penyakit gastroenteritis karena pembawa penyakit gastroenteritis adalah lalat dan kecoa. Juga bisa menyebabkan penyakit DHF (demam berdarah).
2. Lingkungan. Sampah menyebabkan bau busuk yang diakibatkan adanya proses dekomposisi yang menghasilkan gas seperti; H_2H , NH_3 , dan CH_4 . Ia juga dapat menyebabkan menurunnya kualitas udara karena debu, asap, dan gas akibat proses pembakaran sampah. Lama kelamaan bisa mencemari sumber air permukaan tanah.

3. Ekonomi. Menurunnya gairah kerja pada tenaga produktif karena angka kesakitan meningkat, kenyamanan dan ketentraman menurun.
4. Sosial. Lingkungan yang kurang baik karena bau busuk dan sampah yang berserakan mencerminkan budaya masyarakat yang buruk (h. 26-27).

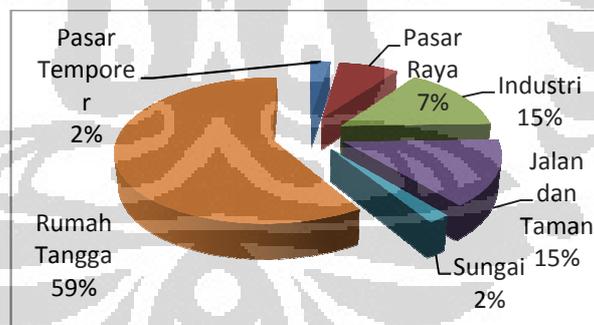
Masalah yang ditimbulkan oleh sampah jika tidak ditangani dengan baik tentu akan mempengaruhi kesejahteraan sosial, karena kesejahteraan sosial menurut Midgley (1995) ialah kondisi bilamana ketiga elemen yang saling mempengaruhi yaitu; sejauh mana masalah sosial dapat diatur, sejauh mana kebutuhan-kebutuhan dapat dipenuhi dan sejauh mana kesempatan-kesempatan untuk mengembangkan diri tersedia, dapat dipenuhi (h. 14). Menurut Spicker (1995) kesejahteraan sosial ini bisa dicapai bilamana semua aspek kesejahteraan seperti; kesehatan, pendidikan, perumahan, jaminan sosial, dan pekerjaan sosial diperhatikan (Adi, 2008, h. 3).

Oleh karena itu, sampah yang telah menjadi masalah sosial membutuhkan penanganan yang serius dan optimal dari berbagai pihak, terutama pemerintah, hanya saja hal ini belum terjadi. Sidharta (1997) mengemukakan bahwa penanganan sampah padat yang dilakukan pemerintah Indonesia secara nasional hanya melayani 40% dari total jumlah penduduk Indonesia (Aziz, 2004, h. 4). Bebasari (2002) mengatakan pengelolaan sampah sudah harus menjadi prioritas pembangunan yang sejajar dengan pembangunan lainnya, namun kenyataannya belum terjadi (Aziz, 2004, h. 5). Sedangkan menurut Suyoto (2008), hingga saat ini penanganan dan pengelolaan sampah itu belum optimal. Mengutip data BPS (1999), Suyoto meneruskan bahwa baru 11,25% sampah di daerah perkotaan yang diangkut oleh petugas, 63,35% ditimbun/dibakar, 6,35% dibuat kompos, dan 19,05% sampah dibuang ke kali/sembarangan. Sementara di daerah pedesaan, sebanyak 19% sampah diangkut oleh petugas, 54% ditimbun/dibakar, 7% dibuat kompos dan 20% dibuang ke kali/sembarangan. (h. 2)

Salah satu kota besar di Indonesia yang mempunyai masalah dengan sampah adalah DKI Jakarta. Menurut Suyoto (2008), sampai sekarang DKI belum mampu mengatasi masalah sampah mereka sendiri, malah menjadi beban tetangganya (h. 4). Beberapa masalah sampah di Jakarta antara lain:

1. Menurut Purwono (2000) Kapasitas TPA Bantar Gebang dirancang untuk mampu menampung 18.000 m³ sampah/hari. Namun kini dipaksa menampung sekitar 21.900 m³ sampah/hari. Selain itu juga setiap hari terdapat sekitar 6.200 m³ sampah tidak terangkat, tercecer di tanah dan di sungai (Wardhani, 2004, h. 3).
2. Dengan penduduk lebih dari 10 juta jiwa DKI Jakarta memproduksi sampah 6.000 ton/hari. Sampah yang ditangani Dinas Kebersihan sekitar 82% dan sisanya bertebaran di sungai, saluran air, pinggir jalan, taman, dan lain-lain (Suyoto, 2008, h. 4).
3. Menurut Sudrajat (2009) “Permasalahan sampah di DKI Jakarta saat ini adalah volume yang sudah tidak bisa ditampung lagi oleh areal yang ada. Perluasan areal ke daerah lain, terutama lintas provinsi tidak akan memecahkan persoalan, hanya akan memindahkan persoalan” (h. 13).

Berdasarkan Dinas Kebersihan DKI (2003), total timbunan sampah DKI Jakarta adalah 25.687 m³ yang sebagian besar bersumber dari rumah tangga. Jika dilihat dari komposisinya sampah non organik sebanyak 34,95% dan organik sebanyak 65,05% (Suyoto, 2004, h. 126). Berikut adalah diagramnya :



Gambar 1.1 : Persentase sampah DKI Jakarta berdasarkan sumbernya
Sumber : Telah diolah kembali

Pertumbuhan jumlah penduduk yang akhirnya berdampak pada masalah sampah juga terjadi di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, terutama di Pulau Panggang. Tingkat kepadatan penduduk Pulau Panggang telah melampaui baku kepadatan penduduk perkotaan yang ditetapkan oleh WHO yaitu 70-80 jiwa/ha. Pada tahun 2001 penduduk di Pulau Panggang mencapai 3.275 jiwa dengan pertumbuhan rata-rata dari tahun 1998-2001 sebesar 1,8% per tahun (Hafsardewi, 2004, h. 5). Sedangkan berdasarkan laporan Kelurahan Pulau

Panggung, pada tahun 2011 jumlah penduduk sudah mencapai 4.090 jiwa dan pada tahun 2012 mencapai 4.134 jiwa. Ini menunjukkan bahwa kepadatan penduduk di Pulau Panggang pada tahun 2012, dengan luas wilayah 9 ha, sudah mencapai 459 jiwa/ha. Jika merujuk pada standar WHO, maka kepadatan penduduk Pulau Panggang telah melebihi lima kali lipat.

Kondisi di atas memberi dampak pada masalah sampah di Pulau Panggang. Berdasarkan Draft Laporan Akhir Pengembangan Masyarakat Dalam Perbaikan Kampung Terpadu – Kel. Pulau Panggang (2009) menyatakan bahwa sampah menjadi masalah yang meresahkan masyarakat. Hal ini diperkuat dengan Laporan Bulanan Pemerintah Kelurahan Pulau Panggang bulan Maret (2011) yang menyatakan bahwa yang menjadi masalah di Pulau Panggang adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal membuang sampah pada tempatnya, serta tidak optimalnya petugas kebersihan. Selain itu, berdasarkan *assessment* pada tanggal 3 Juni 2011 bertempat di Kelurahan Pulau Panggang dengan teknik PRA (*Participatory Rural Appraisal*) menemukan bahwa hal yang paling menonjol untuk ditangani dari masalah lingkungan adalah masalah sampah. Diantara ketiga RW yang ada di Pulau Panggang, RW 01 merupakan wilayah yang paling urgen untuk diselesaikan masalah sampahnya. Selain karena jumlah penduduknya yang paling banyak, hasil *assessment* juga menunjukkan hal itu. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk merespon masalah tersebut.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Wardhani (2004) di Kampung Banjarsari Jakarta Selatan dengan tema ‘Partisipasi Masyarakat Pada Kegiatan Pemilihan Sampah Rumah Tangga’, menyimpulkan bahwa pengelolaan sampah yang ideal untuk mengurangi timbulan sampah adalah pengelolaan sampah dengan pendekatan domestik komunal yang dikelola secara lokal dan menggunakan proses pemilihan. Selain lebih terkontrol, sistem ini juga membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal dan mendorong berkembangnya industri daur ulang sampah (h. 122). Sistem ini melibatkan partisipasi masyarakat.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Noorkamilah (2005) di Desa Sukunan Kab. Sleman D.I Yogyakarta dengan tema ‘Pemberdayaan Dalam Pengelolaan Sampah Padat Berbasis Masyarakat’, menunjukkan bahwa pengelolaan sampah yang dilakukan dengan partisipasi masyarakat setempat

berhasil mengatasi masalah sampah yang mereka hadapi. Hasil yang diperoleh berupa :

1. Hasil yang *tangible* (dapat dilihat) meliputi adanya penghasilan tambahan yang diperoleh warga dari membuat kerajinan daur ulang sampah, lingkungan kampung menjadi semakin tertata dengan baik dan perubahan pada sikap dan perilaku yang semakin jarang membuang sampah sembarangan.
2. Hasil yang *intangibile* (tidak dapat dilihat) meliputi adanya peningkatan pengetahuan, pengalaman dan pemahaman warga masyarakat dalam hal mengelola sampah padat dan rasa malu untuk membuang sampah ke saluran irigasi.
3. Terjadi perubahan pandangan terhadap posisi diri (*self image*) menjadi pandangan yang positif, bahwa ternyata masyarakat kampung Sukunan mampu melakukan suatu perubahan ke arah yang lebih baik, bahkan berhasil mengukir prestasi sebagai juara pertama tingkat nasional dalam bidang daur ulang sampah dan juara tingkat penyelamat lingkungan (164-165).

Dua penelitian di atas menunjukkan akan pentingnya melibatkan partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan sampah. Adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah menjadi hal yang penting untuk dipertimbangkan dalam mengatasi masalah sampah. Oleh karena itu, kajian perencanaan pengelolaan sampah di RW 01 Kelurahan Pulau Panggang dengan melibatkan partisipasi masyarakat penting adanya. Mengingat belum ada kajian seperti ini yang mengambil fokus di Pulau Panggang. Itu sebabnya penelitian ini merupakan suatu ide yang baru.

Dari uraian di atas, Perencanaan Pengelolaan Sampah dengan Pendekatan Partisipatif untuk mengatasi masalah sampah di RW 01 Kelurahan Pulau Panggang sangat dibutuhkan. Inilah yang menjadi landasan akan pentingnya studi ini.

1.2 Rumusan Masalah

Pertumbuhan jumlah penduduk di Pulau Panggang yang terus meningkat berdampak pada meningkatnya volume sampah. Jika setiap hari rumah tangga di Pulau Panggang menghasilkan 1 kantong sampah, maka dengan jumlah 1.191 KK, (Laporan Bulanan Kelurahan Pulau Panggang tahun 2012 per bulan Februari, h. 14) total sampah yang dihasilkan masyarakat Pulau Panggang setiap hari adalah 1.191 kantong sampah. Ini berarti, selama 4 hari jumlah kantong sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Pulau Panggang melebihi jumlah penduduk yang hanya mencapai 4.134 jiwa. Hal yang sama juga berlaku untuk RW 01 dengan jumlah 423 KK (Laporan Bulanan Kelurahan Pulau Panggang tahun 2012 per bulan Februari, h. 14), maka sampah yang dihasilkan warga RW 01 setiap hari adalah 423 kantong sampah. Hanya membutuhkan 4 hari saja, jumlah kantong sampah yang dihasilkan warga RW 01 melebihi jumlah penduduk RW 01 yang mencapai 1.465 jiwa.

Luas lahan Pulau Panggang yang sangat terbatas dan banyaknya permintaan lahan untuk tempat tinggal masyarakat berdampak pada reklamasi pantai. Reklamasi dilakukan dengan jalan menguruk pantai dengan batu dan sampah. Kondisi ini membuat lingkungan Pulau Panggang tampak kotor.

Hal ini makin bertambah parah dengan adanya sebagian besar masyarakat yang membuang sampah di lingkungan rumah mereka. Apalagi semenjak tahun 2012 petugas pengangkut sampah tidak berjalan lagi. Sedangkan program Jumat bersih yang digulirkan oleh Kelurahan Pulau Panggang bersama dengan masyarakat sebagai bagian dari pengelolaan sampah juga tidak berjalan.

Jumlah produksi sampah yang terus meningkat seiring dengan jumlah penduduk di Pulau Panggang yang terus meningkat, sementara lahan untuk tempat tinggal sangat terbatas, tersebarnyanya sampah di urukan dan lingkungan rumah masyarakat yang membuat lingkungan menjadi kotor dan bau membutuhkan penanganan yang serius. Salah satu yang bisa dilakukan untuk menangani masalah ini adalah merencanakan pengelolaan sampah di RW 01 Kelurahan Pulau Panggang dengan pendekatan partisipatif. Langkah awal yang harus dilakukan dalam perencanaan adalah mengetahui kondisi masalah sampah yang ada di RW

01 Kelurahan Pulau Panggang dan potensi yang dimiliki masyarakat. Untuk itu, yang menjadi pertanyaan penting adalah :

1. Apa permasalahan sampah yang ada di RW 01 Kelurahan Pulau Panggang ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi masalah sampah di RW 01 Kelurahan Pulau Panggang ?
3. Apa saja aset komunitas yang dimiliki masyarakat di RW 01 Kelurahan Pulau Panggang yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi masalah sampah ?
4. Bagaimana perencanaan program pengelolaan sampah yang dapat mengurangi masalah sampah di RW 01 Kelurahan Pulau Panggang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan umum dari penelitian ini adalah merumuskan perencanaan pengelolaan sampah yang ada di RW 01 Kelurahan Pulau Panggang.

Tujuan khusus dari penelitian ini yaitu:

1. Mendeskripsikan permasalahan sampah yang ada di RW 01 Kelurahan Pulau Panggang.
2. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi masalah sampah di RW 01 Kelurahan Pulau Panggang.
3. Mendeskripsikan aset komunitas yang dimiliki masyarakat RW 01 Kelurahan Pulau Panggang yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi masalah sampah.
4. Menyusun rencana program pengelolaan sampah di RW 01 Kelurahan Pulau Panggang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa diperoleh dari penelitian ini yaitu :

1. Akademis:
 - Memperkaya wacana Pengembangan Masyarakat.
 - Memperkaya wacana tentang perencanaan pengelolaan sampah dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

2. Praktis :

- Masyarakat RW 01 Pulau Panggang mengetahui apa masalah sampah yang mereka hadapi dan faktor-faktor penyebabnya.
- Tersedianya program pengelolaan sampah di RW 01 Pulau Panggang yang bisa digunakan oleh masyarakat, LSM atau Pemda setempat untuk mengatasi masalah sampah.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Pendekatan Penelitian

Terdapat dua pendekatan dalam penelitian, yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Minichiello (1995) membedakan kedua pendekatan ini dari sisi konseptual dan metodologi. Dari sisi konseptual, pendekatan kualitatif lebih terfokus pada memahami perilaku manusia dari perspektif informan, sedangkan pendekatan kuantitatif lebih terfokus pada usaha menemukan fakta tentang fenomena sosial. Dari sisi metodologi, pendekatan kualitatif melakukan pengumpulan data melalui observasi partisipan dan wawancara tidak terstruktur, menganalisis data berdasarkan tema-tema yang dijelaskan oleh informan dan melaporkan data dengan bahasa informan, sedangkan pendekatan kuantitatif melakukan pengumpulan data melalui pengukuran terhadap objek, menganalisis data melalui perbandingan angka dan kesimpulan statistik serta melaporkan data dengan analisis statistik (h. 10)

Bogdan dan Taylor mengemukakan bahwa metodologi kualitatif adalah “prosedur penelitian yang menyajikan data-data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati” (Moleong, 1991, h. 3).

Karena bagian dari penelitian ini lebih terfokus pada memahami perilaku komunitas tertentu dan pengumpulan data dilakukan dengan jalan wawancara dan observasi, serta menganalisisnya berdasarkan tema-tema yang dijelaskan informan dan menyajikan data-data tersebut dalam bentuk kata-kata deskriptif maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

1.5.2 Jenis Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan masalah sampah, mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi masalah sampah,

mendeskripsikan aset komunitas dan merumuskan perencanaan untuk mengurangi masalah tersebut maka jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, sebagaimana Neuman (2006) mengatakan bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan rincian sebuah keadaan, *setting* sosial atau hubungan secara spesifik (h. 35)

1.5.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bertempat di RW 01 Pulau Panggang Kel. Pulau Panggang Kec. Kepulauan Seribu Utara Kab. Administrasi Kepulauan Seribu. Alasan dipilihnya Pulau Panggang sebagai objek penelitian adalah karena Pulau Panggang merupakan salah satu pulau yang terpadat penduduknya di Pulau Seribu dibandingkan dengan pulau-pulau yang lain, dan ini berpengaruh terhadap masalah sampah. Kepadatan penduduk di Pulau Panggang disebabkan luas wilayahnya yang hanya mencapai 9 ha sedangkan jumlah penduduknya pada tahun 2012 mencapai 4.134 jiwa (Laporan Bulanan Kelurahan Pulau Panggang tahun 2012 per bulan Februari, h. 14)

Tabel 1.2 : Perbandingan kepadatan penduduk di Pulau Seribu

No	Pulau	Luas (Ha)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk
1	Panggang	9,00	3.275	363,8/ha
2	Pramuka	16,00	942	58,9/ha
3	Kelapa	13,90	4.575	329,1/ha
4	Tidung Besar	50,13	3.752	74,8/ha
5	Harapan	6,70	1.313	195,9/ha
6	Lancang Besar	15,13	1.386	91,6/ha
7	Kelapa Dua	1,90	317	166,8/ha
8	Sebira	8,82	546	61,9/ha
9	Untung Jawa	40,10	1.593	39,7/ha
10	Payung Besar	20,86	122	5,8/ha
11	Pari	41,32	621	15/ha

Sumber : Pemantapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Administrasi Kepulauan Seribu, 2001 (Hafsaridewi, 2004, h. 5)

Diantara tiga RW (01, 02 dan 03) yang menjadi fokus penelitian ini adalah di RW 01. Hal ini mengingat RW 01 merupakan RW terpadat penduduk diantara RW yang lain, sebagaimana terlihat pada tabel 1.3. Selain itu, berdasarkan *assessment* dengan *tool* pemetaan menunjukkan bahwa sampah paling banyak tersebar di RW 01.

Tabel 1.3 : Perbandingan jumlah penduduk di Pulau Panggang

No.	RW	KK		JML	DEWASA		ANAK-ANAK		JML.		JML.
		Lk	Pr		Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	
1.	01	358	65	423	278	274	459	454	737	728	1,465
2.	02	323	74	397	261	263	434	430	695	693	1,388
3.	03	323	48	371	242	233	438	367	680	600	1,280

Sumber : (Laporan Bulanan Kelurahan Pulau Panggang tahun 2012 bulan Februari, h. 14)

Pada penelitian ini, pengumpulan data mulai dilakukan pada tanggal 9 Mei 2012 dan berakhir pada tanggal 13 Agustus 2012. Kemudian disusul dengan analisis data, penulisan laporan dan sidang tesis. Ini terlihat pada tabel 1.4 berikut.

Tabel 1.4 : Waktu Tahapan Penelitian

No	Kegiatan	Mei 2012	Juni 2012	Juli 2012	Agt 2012	Sep 2012	Okt 2012	Nov 2012
1	Pengumpulan Data							
2	Analisis Data							
3	Penulisan Laporan							
4	Sidang Tesis							

1.5.4 Teknik Pemilihan Informan

Hal penting dalam penelitian adalah pemilihan informan. Untuk penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif terdapat beberapa teknik pemilihan informan diantaranya : “*Haphazard Sampling, Quota Sampling, Purposive Sampling, Snowball Sampling, Deviant Case Sampling, Sequential Sampling dan Theoretical Sampling*” (Neuman: 2006, h. 220).

Purposive Sampling adalah sebuah jenis pemilihan informan secara tepat berdasarkan pengetahuan sebuah populasi yang menjadi objek penelitian “*Sometime it’s appropriate to select a sample on the basis of knowledge of a population, it’s element, and the porpuse of study. This type of sampling is called purposive sampling*” (Babbie, 2004, h. 183).

Karena penelitian ini memilih informan berdasarkan informasi yang dimiliki warga dan dibutuhkan maka penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling*. Tabel 1.5 dan 1.6 berikut menunjukkan informan yang dipilih berdasarkan informasi yang dibutuhkan oleh penelitian ini.

Tabel 1.5 : *Theoretical Sampling*

No	Informasi yang dibutuhkan	Informan	Jumlah Informan
1	Masalah sampah yang dihadapi warga RW 01 Kelurahan Pulau Panggang.	Ketua RW, Ketua LMK	-
2	Faktor-faktor yang mempengaruhi masalah sampah di RW 01 Kelurahan Pulau Panggang.	Ibu/Bapak rumah tangga	4
		Bekas petugas pengangkut sampah	1
		Perajin Sampah	2
		Ketua RT, RW dan LMK,	5
		Petugas Kelurahan dan Lurah Pulau Panggang	2
		Petugas Puskesmas	1
3	Potensi yang dimiliki warga RW 01 Kelurahan Pulau Panggang.	Ibu/Bapak rumah tangga	-
		petugas pengangkut sampah	-
		Perajin Sampah	-
		Ketua RT, RW dan LMK,	-
		Petugas Kelurahan	-
		Petugas Puskesmas	-
TOTAL			15

Untuk melengkapi *in-depth interview* dilakukan diskusi kelompok yang terdiri dari :

1. Kelompok ibu rumah tangga sebanyak tiga kelompok.
2. Kelompok tokoh masyarakat sebanyak 1 kelompok.
3. Kelompok warga RW 01 sebanyak 2 kelompok.

Informan ibu atau bapak rumah tangga dipilih berdasarkan :

1. Merupakan warga asli RW 01 kelurahan Pulau Panggang yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
2. Memiliki tempat tinggal yang dekat dan jauh dari Lokasi Pembuangan Sampah.
3. Memiliki tingkat kepedulian terhadap masalah sampah. Ini diketahui berdasarkan keterangan yang diberikan oleh ketua RT.

Tokoh masyarakat dipilih berdasarkan tingkat kepedulian mereka terhadap masalah sampah. Ini diketahui berdasarkan keterangan yang diberikan oleh ketua RW. Hanya ada satu ketua RW, LMK dan bekas petugas pengangkut sampah di RW 01, jadi mereka yang dipilih untuk menjadi informan. Perajin sampah dipilih

berdasarkan kegiatan mereka yang masih aktif mendaur sampah plastik. Ketua RT dipilih berdasarkan banyaknya sebaran sampah yang ada dilingkungan mereka masing-masing. Petugas kelurahan dan lurah dipilih berdasarkan posisi mereka sebagai Kepala Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kelurahan Pulau Panggang dan Lurah Pulau Panggang. Petugas puskesmas dipilih berdasarkan posisinya sebagai Koordinator Kesehatan Lingkungan Puskesmas Pulau Panggang.

1.5.5 Teknik Pengumpulan Data

Hal penting dalam penelitian adalah pengumpulan data. Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah : Kajian literatur, kajian dokumen, wawancara mendalam dan observasi. Teknik-teknik pengumpulan data inilah yang akan digunakan dalam penelitian ini.

1. Kajian Literatur

Kajian literatur merupakan satu tahapan awal yang penting dalam proses penelitian. Ini merupakan cara yang baik untuk mencari informasi tentang topik yang akan diteliti. Neuman (2006) mengemukakan empat tujuan dari kajian literatur, yaitu: 1) Untuk menunjukkan kedekatan peneliti dengan kerangka pengetahuan yang terkait dengan topik penelitian, 2) Untuk menunjukkan alur penelitian-penelitian terdahulu dan bagaimana menghubungkannya dengan penelitian terkini, 3) Untuk mengintegrasikan dan merangkum apa-apa yang diketahui terkait dengan penelitian dan, 4) Untuk belajar dari peneliti-peneliti sebelumnya dan menstimulasi ide-ide yang baru (h. 111).

Dalam penelitian ini, kajian literatur dilakukan dengan jalan membaca hasil-hasil penelitian yang terdapat dalam buku, artikel, jurnal, skripsi, tesis, dan laporan-laporan kebijakan yang mempunyai hubungan dengan topik penelitian.

2. Kajian Dokumen

Teknik pengumpulan data ini adalah dengan mengkaji dokumen-dokumen yang terkait dengan tema penelitian. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan informasi yang bisa memberikan gambaran singkat tentang objek penelitian. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen demografi Kelurahan Pulau Panggang 2011 dan 2012, Peta Wilayah Pulau Panggang, Draf

Laporan akhir pengembangan masyarakat dalam perbaikan kampung terpadu-Kel. Pulau Panggang tahun 2009.

3. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Dalam melaksanakan observasi ada empat pola yang dapat dilakukan yaitu ; (1) Pengamatan Secara Langsung, dimana pengamat menjadi anggota masyarakat yang diamati secara penuh. (2) Pemeran Serta Sebagai Pengamat, dimana peneliti tidak sepenuhnya sebagai pemeran serta, namun masih tetap melakukan proses pengamatan. (3) Pengamatan Sebagai Pemeran Serta, dimana peran pengamat secara terbuka diketahui oleh seluruh subjek, bahkan mungkin pula pengamat didukung oleh subjek. (4) Pengamat Penuh, dimana peneliti dengan bebas melakukan proses pengamatan tanpa diketahui oleh subjek yang diteliti (Idrus, 2009). Dalam penelitian ini peneliti menempatkan diri sebagaimana pola ke tiga yakni pengamat sebagai pemeran serta.

Penelitian ini menggunakan observasi untuk memperoleh informasi tentang aktivitas, perilaku, tindakan warga dan gambaran lokasi saat ini yang berhubungan dengan topik penelitian.

4. Wawancara Mendalam

Menurut Minichiello (1995) wawancara adalah cara untuk memperoleh berbagai jenis informasi yang berbeda yang dilakukan dengan jalan menanyakan pertanyaan-pertanyaan dalam interaksi saling bertatap muka secara langsung. *“essentially, interviewing is a means of gaining to information of different kinds. It is done by asking questions in direct face-to-face interaction”* (h. 62). Menurut Babbie (2004), wawancara adalah sebuah pertemuan untuk pengumpulan data dimana seseorang (pewawancara) menanyakan pertanyaan kepada orang lain (responden) (h. 263). Wawancara menurut Minichiello (1995) terbagi menjadi tiga: (1) Wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang digunakan untuk keperluan survey atau *polling* pendapat. Pada jenis wawancara ini, pertanyaan-pertanyaan terstandar diatur dan ditulis dalam daftar wawancara yang rinci. (2) Wawancara semi-terstruktur, yaitu wawancara yang digunakan untuk keperluan penelitian kuantitatif atau kualitatif dimana pertanyaan dikembangkan

berdasarkan daftar topik-topik yang telah dibuat tanpa pertanyaan-pertanyaan yang teratur dan tertulis. (3) Wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang tampak seperti percakapan sehari-hari dimana pertanyaan-pertanyaan dikontrol dan diarahkan oleh keinginan-keinginan pewawancara (h. 63-65).

Di sisi lain Mikkelsen (2005) membagi wawancara berdasarkan jumlah informannya menjadi 4: (1) Wawancara individu, (2) Wawancara Informan kunci, (3) Wawancara kelompok dan (4) Wawancara/diskusi grup terfokus (h. 172-173).

Penelitian ini menjadikan topik-topik informasi yang ingin diperoleh untuk mengembangkan pertanyaan kepada informan. Oleh karena itu, digunakan wawancara semi-terstruktur. Berdasarkan jumlah informannya, penelitian ini juga menggunakan wawancara individu, wawancara informan kunci, wawancara kelompok, wawancara grup terfokus.

Penelitian ini menggunakan wawancara untuk memperoleh informasi tentang pengalaman, pendapat, perasaan dan pengetahuan warga yang berhubungan dengan topik penelitian.

5. Wawancara dan Diskusi Kelompok

Wawancara dan diskusi kelompok menurut Goslin dan Edwards (2006) adalah kegiatan mewawancarai sebuah kelompok masyarakat secara bersamaan untuk menyediakan akses terhadap pengetahuan beberapa orang sekaligus. Terjadi saling pengecekan silang antara pihak dalam kelompok tersebut. Jumlah kelompok sebaiknya tidak lebih dari 20 dan 25 orang (h. 200).

Dalam penelitian ini, *tools* yang digunakan dalam wawancara dan diskusi kelompok adalah pemetaan masalah, *problem ranking* dan diagram Venn.

6. *Focus Group Discussion*

Focus Group Discussion (FGD) menurut Goslin dan Edwards (2006) adalah sebuah kelompok kecil yang terdiri dari 6-12 orang yang memiliki pengetahuan atau kecenderungan khusus terhadap suatu topik tertentu yang diundang untuk mendiskusikan topik-topik yang spesifik secara rinci. FGD dapat menghadirkan orang-orang yang mempunyai masalah tertentu dan tidak bisa mengungkapkannya pada pertemuan yang besar (seperti para wanita dan kelompok minoritas) (h. 201).

Penelitian ini menggunakan FGD untuk mengklarifikasi dan memperkuat informasi yang telah diperoleh sebelumnya dengan teknik observasi dan wawancara kelompok.

1.5.6 Teknik Analisis Data

Analisis data ialah proses pengaturan dan penyajian informasi secara sistematis untuk menemukan gagasan-gagasan. *“data analysis is the process of systematically arranging and presenting information in order to search for ideas”* (Minichiello, 1995, h. 247-248). Menurut Minichiello (1995), dalam penelitian kualitatif, analisis data dan pengumpulan data terjadi secara bersama-sama. Data tidak akan memiliki arah tanpa terjadinya analisis di lapangan (h. 248)

Proses analisis data kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Setelah dibaca, dipelajari dan ditelaah, maka langkah berikutnya adalah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada didalamnya. Langkah selanjutnya ialah menyusunnya dalam satuan-satuan. Satuan-satuan itu kemudian dikategorisasikan pada langkah berikutnya, kategori-kategori ini dilakukan sambil membuat koding. Tahap akhir dari analisis data ini ialah mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Setelah tahap ini, mulailah tahap penafsiran data (Moleong, 1991, h. 190)

Selanjutnya Moleong (1991, h. 190-197) membagi proses ini menjadi tiga tahapan yaitu:

1. **Pemrosesan Satuan.** Satuan adalah bagian terkecil yang mengandung makna yang bulat dan dapat berdiri sendiri terlepas dari bagian yang lain. Langkah pertama dalam pemrosesan satuan ialah peneliti membaca dan mempelajari secara teliti seluruh jenis data yang telah terkumpulkan. Setelah itu satuan-satuan diidentifikasi. Setelah diidentifikasi, peneliti memasukkannya ke dalam kartu indeks. Hanya saja penelitian ini tidak menggunakan kartu indeks akan tetapi diganti dengan membuat kolom dalam sebuah tabel. Contoh satuan dalam penelitian ini ketika informan HR mengatakan “RW sudah sama sekali engga peduli. Malah kita (RT) yang dia bebaskan. Harusnya kan itu program RW bukan RT. Kalau program RT kan khusus di warga kita aja kan. Udah, urus aja

RT dia kata. Buat apa ada pengurus RW. Jangan ke RT lagi. Sebab kalau kita sudah cukup membantu.” Satuan ini ditulis di satu kolom dalam tabel dengan program *microsoft office word 2007*.

2. Kategorisasi. Kategorisasi adalah penyusunan kategori. Sedangkan kategori adalah salah satu tumpukan dari seperangkat tumpukan yang disusun atas dasar pikiran, intuisi, pendapat atau kriteria tertentu. Tugas pokok dari kategorisasi adalah : (1) Mengelompokkan kartu-kartu yang telah dibuat ke dalam bagian-bagian isi yang secara jelas berkaitan. (2) Merumuskan aturan yang menguraikan kawasan kategori dan yang akhirnya dapat digunakan untuk menetapkan inklusi setiap kartu pada kategori dan juga sebagai dasar untuk memeriksa keabsahan data. (3) Menjaga agar setiap kategori yang telah disusun satu dan lainnya mengikuti prinsip taat asas. Pada penelitian ini, kategorisasi dilakukan dengan jalan mengelompokkan satuan-satuan yang telah dibuat ke dalam berbagai kategori yang didasarkan dengan teori yang telah dirumuskan dan pikiran peneliti. Contohnya, satuan yang di atas dan yang sejenisnya dikelompokkan ke dalam kategori “faktor penguat”.

3. Penafsiran data. Tujuan yang ingin dicapai dari penafsiran data ialah salah satu dari tiga tujuan berikut : (1) Tujuan *deskripsi semata-mata*. Peneliti menerima dan menggunakan teori dan rancangan organisasional yang telah ada dalam satu disiplin. Dengan hasil analisis yang ada, peneliti menafsirkan data itu dengan jalan menemukan kategori-kategori dalam data yang berkaitan yang biasanya dimanfaatkan dalam suatu disiplin. Atas dasar itu, peneliti menyusunnya dengan jalan menghubungkan kategori-kategorinya ke dalam kerangka sistem kategori yang diperoleh dari data. (2) Tujuan *Deskripsi analitik*. Rancangan organisasional dikembangkan dari kategori-kategori yang ditemukan dan hubungan-hubungan yang disarankan atau yang muncul dari data. Dengan demikian deskripsi baru yang perlu diperhatikan dapat dicapai. (3) Tujuan *teori substantif*. Untuk memperoleh teori yang baru peneliti harus menampakkan metafora atau rancangan yang telah dikerjakan dalam analisis. Kemudian ia mentransformasikan metafora itu ke dalam bahasa disiplinnya (sosiologi contohnya) yang akhirnya membangun identitasnya sendiri. Pada penelitian ini, penafsiran data hanya bertujuan untuk deskripsi semata dimana kategori-kategori

yang telah dibuat disusun secara berkaitan berdasarkan data yang ada dan sesuai dengan teori yang digunakan. Contohnya: berdasarkan data yang ada, kategori “faktor perilaku” dipengaruhi oleh kategori “faktor predisposisi” dan kategori “faktor penguat” dan ini sesuai dengan teori yang telah dibangun sebelumnya.

1.5.7 Teknik Meningkatkan Keabsahan Data Penelitian

Menurut Idrus (2009) dalam penelitian kualitatif, “keabsahan data penelitian dilakukan dengan melihat reliabilitas dan validitas data yang diperoleh” (h. 145). Guba (1981) mengemukakan tiga teknik agar data bisa memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas, yaitu: 1) memperpanjang waktu tinggal, 2) observasi lebih tekun, dan 3) melakukan triangulasi. Selanjutnya menurut Denzin (1978) triangulasi yang dimaksud meliputi : 1) menggunakan sumber lebih dari satu, 2) menggunakan metode lebih dari satu, 3) menggunakan peneliti lebih dari satu dan 4) menggunakan teori yang berbeda-beda (Idrus, 2009, h. 145)

Terkait dengan waktu tinggal, pengumpulan data di Pulau Panggang dilakukan selama 28 hari dimulai pada tanggal 9 Mei 2012 dan berakhir pada tanggal 13 Agustus 2012. Dua minggu pertama, peneliti tinggal di rumah warga RW 01 dan dua minggu kedua peneliti tinggal di rumah warga RW 02 yang berdekatan dengan RW 01. Selama itu juga peneliti tinggal di Pulau Panggang. Observasi dilakukan selama peneliti berada di Pulau Panggang.

Triangulasi dilakukan dengan dua cara : 1) Triangulasi sumber dilakukan dengan jalan mengecek sumber informasi yang diberikan informan A ke informan B, juga sumber informasi yang diberikan oleh kelompok A ke kelompok B, serta sumber informasi yang diberikan oleh kelompok ke individu. 2) Triangulasi teknik dilakukan dengan mengecek sumber informasi yang diperoleh dengan teknik wawancara baik kelompok maupun individu dengan data yang diperoleh dari teknik observasi.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial menurut Undang-Undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, pasal 1 ayat 1 adalah “kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya”. Sedangkan menurut Midgley (1995) kesejahteraan sosial ialah kondisi bilamana ketiga elemen yang saling mempengaruhi yaitu; sejauh mana masalah sosial dapat diatur, sejauh mana kebutuhan-kebutuhan dapat dipenuhi dan sejauh mana kesempatan-kesempatan untuk mengembangkan diri tersedia, dapat dipenuhi (h. 14). Ketiga elemen ini menurut Midgley berlaku untuk individu, keluarga, kelompok, komunitas dan bahkan masyarakat secara luas. Kedua definisi ini melihat kesejahteraan sosial sebagai sebuah kondisi.

Menurut Friedlander (1980) kesejahteraan sosial merupakan sistem yang terorganisasi dari berbagai institusi dan usaha-usaha kesejahteraan sosial yang direncanakan guna membantu individu ataupun kelompok agar dapat mencapai standar hidup dan kesehatan yang lebih memuaskan (Adi, 2008. h. 47-48). PBB memberi batasan kesejahteraan sosial sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisir yang bertujuan untuk membantu individu atau masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat (Suharto, 2005, h. 1). Kedua pandangan ini melihat kesejahteraan sosial sebagai sebuah kegiatan.

Sebagai sebuah institusi, The National Association of Social Worker memandang, kesejahteraan sosial merupakan sistem program, kemanfaatan dan layanan sebuah institusi nasional yang membantu warga memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang mendasar agar terpeliharanya masyarakat (Zastrow, 2004. h. 5)

Sebagai sebuah ilmu, Adi (2005) memandang bahwa ilmu kesejahteraan sosial adalah “suatu ilmu terapan yang mengkaji dan mengembangkan kerangka

pemikiran serta metodologi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas (kondisi) masyarakat antara lain melalui pengelolaan masalah sosial; pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat; dan pemaksimalan kesempatan anggota masyarakat untuk berkembang (h. 17)

2.2 Pembangunan Sosial

Untuk meningkatkan kesejahteraan sosial sebagai sebuah kondisi, Midgley mengemukakan sebuah pendekatan yang dikenal dengan pendekatan pembangunan sosial. Midgley (1995) mendefinisikan pembangunan sosial sebagai sebuah proses perubahan sosial yang terencana yang didisain untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dengan cara menggabungkannya dengan proses pembangunan ekonomi yang dinamis (h. 25).

Midgley (1995) juga mengemukakan beberapa karakter dari pembangunan sosial; *Pertama*, proses pembangunan sosial berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan ekonomi. Ciri inilah yang membuat pembangunan sosial berbeda dengan pendekatan institusional lain dalam mengangkat kesejahteraan sosial. *Kedua*, pembangunan sosial memiliki banyak disiplin ilmu yang bersumber dari berbagai ilmu sosial yang berbeda. *Ketiga*, pembangunan sosial menitik beratkan pada proses, yakni pembangunan dimaknai sebagai proses pertumbuhan, perubahan, evolusi dan pergerakan. *Keempat*, proses perubahan dimaknai sebagai proses yang progresif. *Kelima*, intervensi adalah proses pembangunan sosial. *Keenam*, pembangunan sosial didorong melalui berbagai strategi yang berfungsi, baik langsung maupun tidak, untuk menghubungkan intervensi sosial dengan kegiatan-kegiatan pembangunan ekonomi. *Ketujuh*, pembangunan sosial terfokus pada masyarakat secara menyeluruh, karena itu bersifat inklusif dan universal. *Kedelapan*, tujuan dari pembangunan sosial adalah mengangkat kesejahteraan sosial. (h. 26-27)

Menurut Jacobs dan Cleveland (1999) *social development* adalah proses mengatur energi-energi dan aktifitas-aktifitas manusia ke tingkatan yang lebih tinggi untuk memperoleh hasil yang lebih baik. “*Social development can be summarily described as the process of organizing human energies and activities at higher levels to achieve greater results.*”

Midgley (1995) mengemukakan tiga strategi yang juga merupakan level dalam pembangunan sosial yakni;

- a. Pembangunan sosial oleh individu, yakni setiap individu berusaha untuk mengangkat kesejahteraan mereka masing-masing. Strategi ini menekankan pada pendekatan individualis dan dunia usaha.
- b. Pembangunan sosial oleh masyarakat, yakni masyarakat bekerja sama secara teratur untuk memenuhi kebutuhan dasar, menyelesaikan masalah dan menciptakan peluang mereka untuk berkembang. Strategi ini dikenal dengan pendekatan kemasyarakatan.
- c. Pembangunan sosial oleh pemerintah, yakni pemerintah mengangkat pembangunan sosial melalui agen-agen khusus, pembuat kebijakan, para perencana yang dimilikinya. Strategi ini dikenal dengan pendekatan statis (h. 103-125)

Sedangkan Adi (2008) berdasarkan pandangan Midgley, Cox dan Gray merumuskan empat level atau tingkat pembangunan sosial.

- a. Level Mikro. Yaitu pembangunan pada level individu dan keluarga yang lebih mengarah pada fungsi rehabilitatif dan remedial yang terfokus pada penanganan individu dan keluarga yang bermasalah.
- b. Level Mezzo. Yaitu pembangunan di level organisasi dan komunitas yang lebih mengarah pada program yang lebih kreatif, proaktif dan preventif yang biasanya dilakukan melalui intervensi komunitas.
- c. Level Makro. Yaitu pembangunan di tingkat provinsi, regional, antar daerah ataupun nasional yang lebih bersifat normatif di mana agen perubahan melibatkan diri dalam pembuatan perencanaan dan kebijakan sosial.
- d. Level Global. Yaitu pembangunan di tingkat internasional di mana agen perubahan turut mempengaruhi kebijakan di tingkat antar negara (h. 57-64)

2.3 Pemberdayaan

Ife (2006) memaknai bahwa pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan mereka yang kurang beruntung atau kelompok lemah, “*Empowerment aims to increase the power of the disadvantaged*”. Dari konsep ini, pemberdayaan dapat dimaknai melalui dua hal, yakni kekuasaan/“*power*” dan kelompok lemah/“*the disadvantaged*” (h. 65). Ife kemudian membagi “*power*” dalam 8 jenis yaitu:

1. Kekuasaan atas pilihan-pilihan personal dan kesempatan hidup. Poin ini menuntut strategi pemberdayaan memaksimalkan pilihan-pilihan warga yang efektif untuk meningkatkan kekuasaan mereka dalam memutuskan masa depan pribadi mereka. Warga mempunyai kekuasaan dalam membuat keputusan terkait gaya hidup, tempat tinggal dan pekerjaan mereka.
2. Kekuasaan untuk menyatakan hak asasi manusia. Proses pemberdayaan mestinya menjamin bahwa suara warga yang tertindas dan termarginalkan akan didengar dan menjadi pertimbangan dalam strategi aksi sosial dan aksi politik.
3. Kekuasaan untuk mendefinisikan kebutuhan. Pemberdayaan mengharuskan bahwa warga diberi kemampuan untuk mendefinisikan kebutuhan mereka sendiri. Oleh karena itu, proses pemberdayaan harus memastikan bahwa warga mempunyai akses terhadap pendidikan dan informasi agar mereka bisa untuk mendefinisikan kebutuhan mereka sendiri.
4. Kekuasaan untuk menyampaikan pendapat. Proses pemberdayaan mestinya menjamin kebebasan warga untuk menyampaikan pendapat mereka dalam forum yang bebas tanpa tekanan.
5. Kekuasaan untuk mempengaruhi institusi. Strategi pemberdayaan mestinya meningkatkan kekuasaan warga terhadap institusi-institusi (seperti pendidikan, kesehatan, keluarga dll) dan pengaruh mereka dengan jalan memberikan pengetahuan kepada warga agar bisa mempengaruhi institusi-institusi tersebut sehingga warga dapat

merubah institusi-institusi ini menjadi lebih mudah diakses, responsif dan akuntabel kepada semua warga masyarakat.

6. Kekuasaan untuk mengakses sumber daya yang ada. Strategi pemberdayaan akan berusaha memaksimalkan kekuasaan yang efektif dari semua warga untuk menjangkau distribusi dan penggunaan sumber daya dan memperbaiki ketidak merataan dalam mengakses sumber daya.
7. Kekuasaan terhadap aktifitas ekonomi. Sebuah proses pemberdayaan akan berusaha memastikan bahwa kekuasaan terhadap aktifitas ekonomi seperti produksi, distribusi dan pertukaran barang dan jasa terdistribusi secara merata.
8. Kekuasaan atas reproduksi. Pemberdayaan memberikan kekuasaan terhadap proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi terhadap warga. (h. 71-73)

Ife (2006) membagi kelompok yang kurang beruntung atau lemah yang harus diberikan kekuasaan menjadi tiga kategori, yaitu:

1. Kelompok lemah secara struktural yaitu mereka yang lemah secara kelas, gender maupun etnis.
2. Kelompok lemah khusus yaitu mereka yang lemah seperti manula, anak-anak dan remaja, penyandang cacat, gay dan lesbian, masyarakat terasing dll.
3. Kelompok lemah secara personal yaitu mereka yang mengalami kesedihan, kehilangan, masalah pribadi dan/atau keluarga dan lain-lain (h. 75)

Rappaport (1984) mengemukakan bahwa pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan untuk mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya (Suharto 2005, h. 59). Barker menganggap pemberdayaan sebagai proses membantu individu, keluarga, kelompok dan komunitas untuk meningkatkan kekuatan personal, interpersonal, ekonomi-sosial dan politik mereka dan mengembangkan pengaruh mereka melalui peningkatan kondisi disekitar mereka. *“the process of helping individuals, groups, families, and communities to increase their personal, interpersonal,*

socioeconomic, and political strength and to develop influence toward improving their circumstances.” (Zastrow, 2004, h. 59)

Selain itu, Dariah (2009) mengatakan bahwa *“pemberdayaan merupakan suatu konsep yang menjelaskan berbagai upaya untuk memperkuat posisi seseorang melalui penumbuhan kesadaran dan kemampuan individu yang bersangkutan untuk mengidentifikasi persoalan yang dihadapi dan memikirkan langkah-langkah mengatasinya” (h. 144)*

Dari semua uraian di atas dapat disimpulkan bahwa konsep pemberdayaan memberikan peluang kepada individu, kelompok, komunitas atau masyarakat untuk menentukan sendiri jalan keluar dari masalah kehidupannya berdasarkan kekuasaan yang telah diberikan kepada mereka melalui proses pemberdayaan. Ini dimaksudkan agar terjadi perubahan terhadap individu, kelompok, komunitas atau masyarakat ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, konsep pemberdayaan memiliki keterkaitan yang erat dengan pembangunan sosial yang mendambakan perubahan terencana ke arah yang lebih baik.

2.4 Partisipasi Masyarakat

Menurut FAO (1989b) kata partisipasi dimaknai sebagai:

1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.
2. Partisipasi adalah ‘pemekaan’ (pembuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan.
3. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu.
4. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan dan monitoring proyek, supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial.
5. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri.

6. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka. (Mikkelsen, 2011, h. 58)

Kruks (1983) membagi partisipasi dalam dua kategori : partisipasi *trasformasional* dan partisipasi *instrumental*. Yang pertama terjadi ketika partisipasi dipandang sebagai tujuan, dan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Sedangkan yang kedua terjadi ketika partisipasi dilihat sebagai suatu cara untuk mencapai sasaran tertentu. (Mikkelsen, 2011, h. 59)

Chambers (2002) mengemukakan partisipasi sering digunakan dalam tiga bentuk :

1. Sebagai *cosmetic label*, partisipasi sering digunakan untuk mempercantik tampilan proyek agar donatur dan pemerintah mau membiayainya, sedangkan kenyataannya pendekatan *top-down* yang digunakan.
2. Sebagai *co-opting practice*, partisipasi digunakan untuk memobilisasi tenaga lokal agar biaya proyek bisa ditekan. Komunitas mengkontribusikan waktu dan upaya mereka terhadap kesuksesan proyek-proyek dengan bantuan pihak luar. Dengan kata lain, mereka (masyarakat lokal) berpartisipasi dalam proyek kita (pihak luar).
3. Sebagai *empowering process*, partisipasi digunakan untuk memungkinkan masyarakat lokal melakukan analisis dan keputusan mereka sendiri dengan keyakinan. Dengan kata lain, kita (pihak luar) berpartisipasi dalam proyek mereka (masyarakat lokal) (Mikkelsen, 2005, h. 54)

Pandangan Chambers yang terakhir menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam menganalisis masalah yang mereka hadapi dan ikut mengambil keputusan untuk merespon masalah tersebut adalah bagian dari proses pemberdayaan. Oleh karenanya konsep pemberdayaan memiliki keterkaitan erat dengan konsep partisipasi masyarakat.

2.5 Pengembangan Masyarakat (*Community Development*)

Menurut Ife (2006) mengemukakan keterkaitan antara pengembangan masyarakat, partisipasi dan pemberdayaan dengan mengatakan bahwa pengembangan masyarakat harus mencoba memaksimalkan partisipasi (masyarakat) dengan maksud agar setiap anggota masyarakat aktif dalam proses dan kegiatan masyarakat dan bisa menciptakan masa depan pribadi maupun masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi merupakan sebuah bagian penting dalam meningkatkan pemberdayaan dan kesadaran masyarakat (h. 145).

Pengembangan masyarakat dalam pandangan Ife (2006) dipengaruhi oleh dua perspektif, yaitu: 1) perspektif ekologi dan 2) perspektif keadilan sosial dan hak asasi manusia. Perspektif ekologi memandang bahwa dunia sekarang sedang mengalami krisis lingkungan yang besar. Polusi air, udara, sungai dan minyak; pemanasan global dan lain-lain mengancam peradaban manusia di masa datang. Dari perspektif ini, lahir prinsip-prinsip dalam Pengembangan Masyarakat seperti:

1. *Holism/Holistik*. Prinsip ini menuntut Pengembangan Masyarakat harus melihat sebuah fenomena sebagai suatu keterkaitan yang menyeluruh.
2. *Sustainability/Keberlanjutan*. Prinsip ini mengharuskan Pengembangan Masyarakat bisa memelihara sumber daya yang ada dalam waktu yang lama. Prinsip ini menganjurkan untuk meminimalisir penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui dan walaupun memungkinkan tidak digunakan.
3. *Diversity/(menghargai) perbedaan*. Prinsip ini mengarahkan Pengembangan Masyarakat untuk bisa mengelola, mengembangkan dan menyesuaikan perbedaan makhluk hidup dan sistem yang ada.
4. *Equilibrium/Keseimbangan*. Dengan prinsip ini pengembangan masyarakat menghubungkan berbagai sistem dan kebutuhan yang ada. Kebutuhan sosial, ekonomi, politik, budaya, lingkungan dan spiritual mesti seimbang. (h. 25-48)

Perspektif yang kedua dari pengembangan masyarakat adalah keadilan sosial dan hak asasi manusia. Perspektif ini memandang bahwa sistem sosial politik yang tidak adil merugikan kelompok-kelompok tertentu. Dari perspektif ini

muncul beberapa prinsip pengembangan masyarakat sebagaimana pandangan Ife (2006) yaitu (1) Fokus kepada mereka yang kurang beruntung, (2) Melakukan pemberdayaan, (3) Memahami dan komitmen terhadap hak asasi manusia, (4) Menjelaskan apa yang dibutuhkan. (h. 262-267).

Dari pandangan Ife ini, dapat dinyatakan bahwa salah satu tujuan dari pengembangan masyarakat adalah melakukan pemberdayaan.

2.5.1 Pendekatan Pengembangan Masyarakat

Adi (2008) dengan mengutip pandangan Batten (1978) mengemukakan dua pendekatan dalam pengembangan masyarakat yaitu:

1. Pendekatan direktif. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa *community worker* mengetahui apa yang dibutuhkan dan apa yang terbaik untuk masyarakat. *Community worker*-lah yang menetapkan apa yang baik dan buruk bagi masyarakat, cara-cara apa yang perlu dilakukan untuk memperbaikinya dan menyediakan sarana yang dibutuhkan untuk hal itu.
2. Pendekatan nondirektif (partisipatif). Pendekatan ini mengasumsikan bahwa masyarakat sebenarnya telah mengetahui tentang apa sebenarnya yang mereka butuhkan dan apa yang baik untuk mereka. *Community worker* tidak menetapkan apa yang baik atau buruk bagi masyarakat. Pemeran utama dalam perubahan masyarakat adalah masyarakat itu sendiri, *community worker* lebih bersifat menggali dan mengembangkan potensi masyarakat. (h. 227-229)

2.5.2 Tahapan Pengembangan Masyarakat

Twelvetrees (1982) membagi tahap pengembangan masyarakat menjadi tujuh:

1. Menghubungi masyarakat dan membangun sebuah analisis kebutuhan.
2. Membantu masyarakat mengidentifikasi kebutuhan mereka dan membangun keinginan mereka untuk bekerja memenuhi kebutuhan tersebut.
3. Membantu masyarakat untuk beranjak dari sebuah identifikasi masalah ke perumusan tujuan.

4. Membantu masyarakat membentuk dan memelihara sebuah organisasi yang sesuai untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.
5. Membantu masyarakat untuk memilih prioritas, mendisain rencana aksi, membuat tujuan strategis kedalam sebuah tujuan-tujuan turunan dan tugas-tugas.
6. Membantu masyarakat membagi tugas-tugas tersebut diantara mereka dan mengerjakannya.
7. Membantu anggota grup untuk mengevaluasi hasil yang telah dicapai dan mengadopsi tujuan-tujuan yang dirubah.
8. Tahap 3 sampai 7 cenderung menjadi tahap yang permanen (h. 39)

Adi (2008) membagi tahap pengembangan masyarakat dalam 7 tahapan yaitu:

1. *Persiapan*. Pada tahapan ini terdapat dua persiapan : (1). *Persiapan Petugas*. Pada bagian ini dilakukan penyamaan pandangan antara petugas pengembangan masyarakat terutama dalam pendekatan apa yang akan digunakan. (2). *Persiapan Lapangan*. Hal ini dilakukan melalui studi kelayakan terhadap daerah atau lokasi yang dijadikan sasaran pengembangan masyarakat kemudian ditempuh jalur formal untuk memperoleh perizinan.
2. *Assessment*. Dalam proses ini dilakukan pengidentifikasian tentang masalah yang dirasakan atau *felt needs* ataupun kebutuhan yang diekspresikan (*expressed needs*) dan juga sumber daya yang dimiliki komunitas sasaran.
3. *Perencanaan Alternatif Program*. Pada tahap ini pelaku perubahan secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya.
4. *Formulasi Rencana Aksi*. Pada tahap ini pelaku perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang akan mereka lakukan untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi.
5. *Pelaksanaan Program dan Kegiatan*. Tahap ini merupakan salah satu tahap yang sangat krusial dalam proses pengembangan masyarakat,

karena sesuatu yang telah dirancang dengan baik akan dapat melenceng dalam pelaksanaan di lapangan bila tidak ada kerjasama antara pelaku perubahan dan warga masyarakat.

6. Evaluasi. Ini merupakan proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program yang sedang berjalan pada pengembangan masyarakat.
7. Terminasi. Tahap ini merupakan “perpisahan” hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Terminasi sering kali dilakukan bukan karena masyarakat dianggap telah “mandiri”, tidak jarang karena jangka waktu program telah selesai (h. 244-256).

Secara garis besar, dari pandangan beberapa tokoh di atas, tahap pengembangan masyarakat dapat dibagi menjadi lima tahapan, yaitu: 1). Persiapan, 2). *Need Assessment*, 3). Formulasi Rencana, 4). Pelaksanaan Program, 5). Evaluasi Program, 6). Terminasi. Penelitian ini hanya akan melalui tahap 1, 2 dan 3.

2.6 Perencanaan Partisipatoris

2.6.1 Pengembangan Masyarakat dan Perencanaan Partisipatoris

Ife (2006) mengemukakan bahwa inti dari *community development* adalah ide tentang perubahan dari bawah. Ide ini menganggap sebaiknya masyarakat dapat menentukan kebutuhannya sendiri dan bagaimana memenuhinya, hal ini karena masyarakat lebih mengetahui tentang kebutuhannya tersebut (h. 121). Pada titik inilah keterkaitan antara pengembangan masyarakat dengan perencanaan yang berasal dari bawah/masyarakat yang kita kenal dengan perencanaan partisipatoris.

Dalam membicarakan keterkaitan antara pengembangan masyarakat dengan perencanaan partisipatoris, Adi (2007) juga mengemukakan bahwa salah satu inti utama dari diskursus komunitas ataupun metode Intervensi Pengembangan Masyarakat adalah asumsi bahwa “Masyarakat bukanlah sekumpulan orang yang bodoh”, yang hanya akan maju dan berkembang jika mendapat perintah. Akan tetapi masyarakat pada masa kini telah melalui suatu proses evolusi yang cukup panjang, sehingga hampir setiap masyarakat telah

mengembangkan dan memiliki kearifan lokal sejalan dengan upaya mereka mengatasi masalah yang ada. Alasan lain, lanjut Adi, mengapa perencanaan partisipatoris memainkan peran penting dalam pengembangan masyarakat, karena tujuan dari pengembangan masyarakat itu sendiri yang pada umumnya ingin mengangkat taraf hidup masyarakat. Dalam upaya meningkatkan kondisi kesejahteraan masyarakat maka para praktisi harus mengetahui masalah (*problems*), kebutuhan (*needs*) dan kondisi yang diinginkan oleh masyarakat (*expected condition*). Karena itu, warga masyarakat adalah sumber utama yang dapat menjelaskan kebutuhan dan masalah apa yang sedang mereka hadapi (h. 23-25).

Jelaslah bahwa Perencanaan Partisipatoris atau Perencanaan dengan Pendekatan Partisipatif dalam melakukan Pengembangan Masyarakat menjadi suatu hal yang mutlak untuk dilakukan.

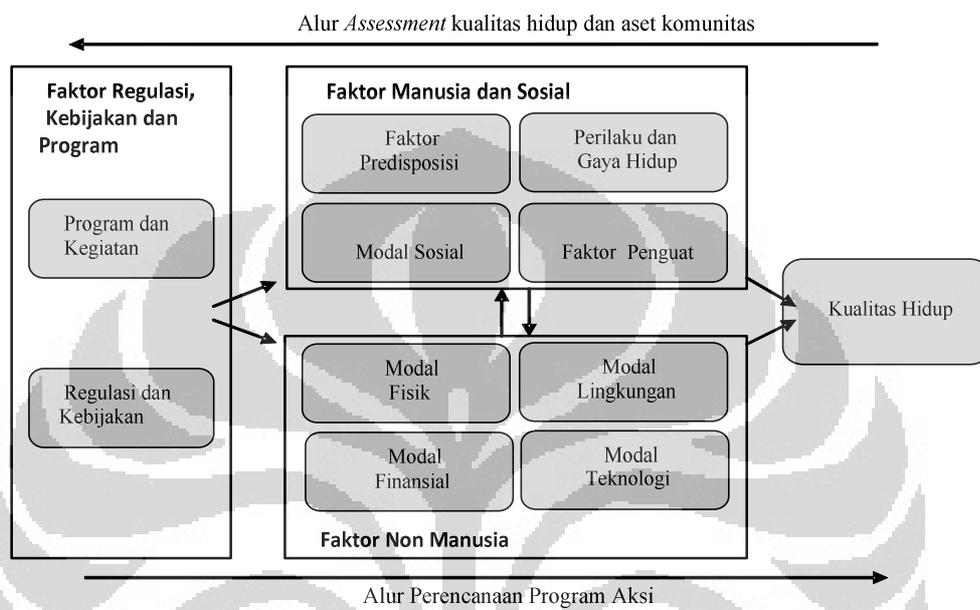
2.6.2 Pengertian Perencanaan Partisipatoris

Perencanaan partisipatoris atau perencanaan dengan pendekatan partisipatif menurut Adi (2007) adalah “proses perencanaan yang dimulai dari tahap *engagement* (persiapan), *assessment*, dan tahap *planning* (perencanaan alternatif program dan kegiatan, serta formulasi rencana aksi” (h. 31). Yang dimaksud dengan perencanaan dengan pendekatan partisipatif dalam kajian ini adalah perencanaan yang dilakukan bersama komunitas sasaran. Adi (2007) memaknai kalimat “dilakukan bersama komunitas sasaran” adalah;

1. Proses *assessment* dilakukan bersama masyarakat, sedangkan proses pembuatan rencana pada awalnya dibuat oleh tim perencana terlebih dahulu kemudian baru disampaikan pada masyarakat dalam satu pertemuan khusus dimana masyarakat diajak untuk memberi masukan terhadap tawaran rencana program aksi yang akan dilakukan.
2. Masyarakat dilibatkan dalam seluruh tahap perencanaan (mulai dari *assessment*, perencanaan program aksi, termaksud pengembangan kriteria capaian) (h. 127-128). Kajian ini lebih cenderung menggunakan pemaknaan yang pertama.

Mengadopsi pandangan Green dan Krueter (1991) Adi mengembangkan sebuah model perencanaan dengan pendekatan partisipatif yang dikenal dengan

Model Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas. Secara garis besar model ini mengandung empat unsur: (1) Kualitas hidup yang menjadi masalah. (2) Faktor Manusia dan Sosial. (3) Faktor Non Manusia dan (4) Faktor Regulasi Kebijakan dan Program (2007, h. 129). Skema pola perencanaan partisipatoris dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 : Model Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas

Sumber : Adi (2007, h. 129)

2.6.3 Tahapan Perencanaan Partisipatoris

Dari kerangka model di atas, maka proses perencanaan partisipatoris yang berbasis aset masyarakat menurut Adi (2007) terdiri dari lima tahapan, yaitu: Pertama; Mengidentifikasi dan mengkaji kualitas hidup komunitas sasaran saat ini. Kedua; Mengidentifikasi dan mengkaji faktor manusia dan sosial yang terkait dengan kualitas hidup masyarakat saat ini. Ketiga; Mengidentifikasi faktor-faktor non manusia yang terkait dengan kualitas hidup masyarakat saat ini. Keempat; Mengidentifikasi faktor regulasi, kebijakan dan program yang terkait dengan timbulnya masalah pada faktor manusia dan modal sosial, juga pada faktor non manusia. Kelima; Mengembangkan rencana program aksi, termaksud menentukan objektif dan kriteria capaian dari berbagai kegiatan yang telah direncanakan. Serta mengembangkan rencana anggaran untuk membiayai program aksi yang telah direncanakan. Langkah pertama sampai keempat adalah proses *assessment*

sedangkan langkah kelima terkait dengan perencanaan (h. 130). Di bawah ini diuraikan secara rinci kelima tahapan tersebut :

1. *Assessment* Kualitas Hidup Masyarakat

Adi (2007) mengungkapkan bahwa pengidentifikasian kualitas hidup yang dirasakan mengganggu komunitas sasaran merupakan langkah awal dalam membuat perencanaan partisipatoris. Pengidentifikasian masalah ini haruslah didefinisikan berdasarkan proses *assessment* yang memperhatikan dan mendukung terartikulasinya suara komunitas sasaran secara relatif menyeluruh. Suara komunitas sasaran yang dianggap paling merisaukan dan perlu diprioritaskan untuk segera ditanganilah yang akan dituliskan dalam kondisi kualitas hidup yang dirasakan mengganggu masyarakat. Kondisi ini selanjutnya dirumuskan secara spesifik, terukur, dapat dilakukan perubahan, relevan dan jelas batas waktunya atau dikenal dengan singkatan SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound*) (h. 131-132).

2. *Assessment* Faktor Manusia dan Sosial

Adi (2007) mengungkapkan bahwa langkah selanjutnya yang harus ditempuh setelah mengetahui kualitas hidup yang dirasakan mengganggu komunitas sasaran adalah menentukan faktor-faktor penyebab yang terkait dengan modal manusia dan sosial yang dimulai dari:

- Faktor perilaku, yaitu gaya hidup merupakan tindakan dari komunitas sasaran yang merupakan cerminan dari kemampuan dan keterampilan dari individu.
- Faktor predisposisi, yaitu sesuatu yang muncul sebelum perilaku itu terjadi dan menyediakan landasan motivasi ataupun rasional terhadap perilaku yang dilakukan oleh seseorang. Faktor predisposisi ini dapat berupa pengetahuan, keyakinan, sikap, cara pandang dan nilai individu dari komunitas sasaran yang banyak mempengaruhi munculnya perilaku mereka.
- Faktor penguat, yaitu dapat berbentuk cara pandang, sikap dan kebiasaan dari agen perubahan yang terkait dengan komunitas tersebut. Sedangkan menurut Green (1991) faktor penguat adalah segala akibat dari tindakan yang menentukan apakah seseorang menerima pengaruh

positif (atau negatif) dan secara sosial pengaruh itu didukung setelah terjadi. Faktor penguat mencakup, dukungan sosial, nasehat dari petugas kesehatan, keuntungan sosial, keuntungan secara fisik, pemberian hadiah dan lain-lain (h. 165).

- Faktor modal sosial, yaitu norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat yang berada di dalamnya, dan mengatur pola perilaku warganya, juga unsur kepercayaan dan jaringan sosial antara warga masyarakat atau kelompok masyarakat. (h. 134-139)

3. *Assessment* Faktor Non Manusia

Menurut Adi (2007) tahap berikutnya yang ditempuh setelah melalui tahap kedua adalah mengidentifikasi dan mengkaji faktor non manusia yang dapat mempengaruhi kualitas hidup komunitas sasaran yang terdiri dari modal fisik, modal lingkungan, modal teknologi dan modal finansial. Uraian faktor-faktor ini telah dibahas pada bagian aset masyarakat di atas (h. 140-141).

4. *Assessment* Regulasi, Kebijakan dan Program Terkait

Menurut Adi (2007) setelah membahas langkah 2 dan 3 maka langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi faktor regulasi, kebijakan, program dan kegiatan yang pernah dilaksanakan dan dianggap mempunyai pengaruh terhadap faktor manusia dan sosial serta faktor non manusia. Program dan regulasi yang didefinisikan pada bagian ini adalah program dan regulasi yang diasumsikan benar-benar terkait atau berpengaruh menyebabkan terjadinya kondisi kehidupan yang tidak menyenangkan saat ini (h. 146). Adi (2007) tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan regulasi dan kebijakan. Tetapi Green (1991) mengemukakan definisi: (1) Kebijakan adalah seperangkat objektif dan aturan-aturan yang mengarahkan aktivitas sebuah organisasi atau sebuah administrasi. (2) Regulasi adalah tindakan untuk melaksanakan kebijakan dan memperkuat aturan atau hukum (h. 190).

Sebelum membahas tentang langkah selanjutnya, Adi (2007) mengungkapkan bahwa dalam melakukan proses *assessment*, data yang dikumpulkan bukan sebatas masalah dan faktor yang menyebabkan masalah tersebut, melainkan proses *assessment* juga menggali potensi-potensi yang ada di

masyarakat untuk memudahkan ketika mengembangkan rencana program aksi guna mengatasi masalah yang ada (h. 147).

Adi (2008) membagi enam aset atau potensi komunitas yang diasumsikan terkait dengan upaya pengembangan masyarakat serta perencanaan partisipatoris, yaitu :

- Modal Fisik. Mengutip Green dan Haines (2002) Adi mengatakan bahwa modal fisik terdiri dari dua kelompok utama yaitu, bangunan dan infrastruktur. Bangunan yang dimaksud disini berupa rumah, gedung, pertokoan, perkantoran dan lain-lain. Sedangkan infrastruktur berupa jalan, jembatan, sarana air bersih, jaringan telepon dan lain-lain.
- Modal Keuangan adalah dukungan keuangan yang dimiliki suatu komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan yang diadakan dalam komunitas tersebut.
- Modal Lingkungan. Berupa potensi yang belum diolah dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi, serta mempunyai nilai yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Aspek lingkungan yang harus diperhatikan adalah bumi, udara, laut, tumbuhan dan binatang.
- Modal Teknologi. Merupakan ketersediaan teknologi tepat guna yang bermanfaat untuk masyarakat, dan bukan sekadar teknologi digital yang canggih, akan tetapi belum tentu bermanfaat bagi masyarakat tersebut.
- Modal Manusia. Merupakan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga dapat menguasai teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, baik itu teknologi yang sederhana maupun yang canggih.
- Modal Sosial. Merupakan norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat yang ada di dalamnya, dan mengatur pola perilaku warga, juga unsur kepercayaan (trust) dan jaringan (networking) antarwarga masyarakat ataupun kelompok masyarakat. (h. 287-308)

Menurut Lawang (2004) kepercayaan adalah “hubungan antara dua pihak atau lebih yang mengandung harapan yang menguntungkan

salah satu atau dua belah pihak melalui interaksi sosial”, dan jaringan adalah “semua hubungan dengan orang atau kelompok lain yang memungkinkan pengentasan masalah dapat berjalan secara efisien dan efektif” (h. 36, 51)

Aset komunitas ini, menurut Adi (2007) selain dapat dilihat sebagai kelebihan yang dimiliki masyarakat, dapat juga dilihat sebagai kekurangan dari masyarakat tersebut yang harus diperbaiki ataupun dikembangkan (h. 35). Adi dalam model perencanaan partisipatoris sebagaimana yang terlihat pada gambar 2.1 di atas memasukkan modal masyarakat ini sebagai faktor yang mempengaruhi masalah suatu komunitas.

5. Pengembangan Rencana Program Aksi

Sebagai tindak lanjut dari langkah 1-4, menurut Adi (2007), adalah merancang program aksi yang dapat digunakan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang telah didefinisikan pada bagian 1-4. Yang harus dipertimbangkan dalam merancang program aksi adalah :

- Apa kegiatan yang akan dilaksanakan ?
- Bagaimana cara melaksanakan kegiatan tersebut ?
- Siapa yang bertanggungjawab, untuk apa dan kapan ?
- Apa sumber daya (input) yang dibutuhkan?
- Apa hasil yang diharapkan (output) ?
- Bagaimana hasil dapat dicapai berdasarkan tujuan kegiatan (objektif) yang ada ? (h. 148)

2.7 Pengertian Komunitas

Rubin (1992) mengemukakan komunitas merujuk kepada tempat dimana pengorganisasian terjadi dan kelompok-kelompok orang dimana pengorganisasian itu berlangsung. “*Community refers both the place in which organizing occurs and to the group among which organizing is happening*” (h. 82).

Jack Rotman (1995) menganggap komunitas adalah kumpulan orang-orang yang memiliki tujuan, peran dan komitmen yang sama yang hidup dalam satu wilayah “*the territorial organization of people, goals, services, and commitments.*” (h. 10).

Ife (2006) menganggap komunitas sebagai sebuah organisasi sosial yang memiliki lima ciri yang saling terkait;

1. *Human scale*/Adanya Kumpulan Manusia. Adanya interaksi manusia dalam jumlah tertentu yang dapat diatur dan dimanfaatkan oleh individu. Kumpulan manusia ini dibatasi oleh kondisi dimana mereka saling mengenal satu dengan yang lainnya karena kebutuhan dan interaksi yang bisa saling menjangkau di antara semua.
2. *Identity and Belonging*/Merasa Memiliki dan Mempunyai Identitas. Ciri yang kedua dari komunitas adalah adanya rasa saling memiliki dalam sebuah kelompok; diterima oleh yang lain, loyal untuk membantu apa yang menjadi perhatian kelompok. Rasa inilah yang akan melegitimasi masuk tidaknya seseorang sebagai anggota masyarakat. Rasa memiliki terhadap masyarakat/kelompok lah yang akan membentuk makna identitas.
3. *Obligations*/Adanya Kewajiban Anggota. Ciri yang ketiga dari masyarakat adalah adanya kewajiban anggota terhadap berlangsungnya sebuah komunitas atau organisasi dalam hal ini adalah partisipasi anggota dalam kegiatan-kegiatan dan berkontribusi untuk memelihara struktur masyarakat tersebut.
4. *Gemeinschaft*. Ciri yang keempat adalah adanya berbagai peran yang dapat menguatkan interaksi antara sesama sebagai sebuah kesatuan.
5. *Culture*/Adanya Budaya. Ciri yang berikut adalah adanya nilai yang dihasilkan dari budaya sebagai karakter yang unik dan menyatu dengan masyarakat tersebut (h. 96-98).

Dengan menambahkan unsur kontinuitas, Koentjaraningrat (2009) mendefinisikan masyarakat sebagai “Kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut satu sistem adat-istiadat tertentu yang bersifat kontinu, dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama.” (h. 118)

Masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat Pulau Panggang yang tinggal di RW 01 Kelurahan Pulau Panggang Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

2.8 Teknik *Assessment* Kebutuhan dan Aset Komunitas

Need Assessment merupakan salah satu tahapan dalam pengembangan masyarakat. Menurut Pharis (1976), Siegel, Attkisson dan Cohn (1977) *need assessment* merupakan bagian dari sebuah proses yang digunakan untuk merencanakan program-program pelayanan sosial. Menurut Warheit (1976) ia digunakan untuk menentukan masalah-masalah dan tujuan-tujuan dari sebuah masyarakat untuk memastikan bahwa sebuah intervensi yang akan dilaksanakan merespon kebutuhan dari masyarakat tersebut (Rothman, 1995, h. 259).

2.8.1 Kebutuhan Komunitas

Adi (2008), mengutip pandangan Bradshaw (1972) dalam Kattner (1990) dan Ife (2002) membagi *need* (kebutuhan masyarakat) menjadi empat kategori, yaitu :

1. Kebutuhan normative (*normative need*), yaitu kebutuhan yang didefinisikan oleh mereka yang mempunyai otoritas berdasarkan norma yang berlaku. Misalnya garis kemiskinan.
2. Kebutuhan yang dipersepsikan (*perceived need*) atau kebutuhan yang dirasakan (*felt need*), yaitu kebutuhan yang mereka pikirkan harus mereka dapatkan atau kebutuhan yang dirasakan oleh komunitas sasaran.
3. Kebutuhan yang diekspresikan (*expressed need*), yaitu kebutuhan yang diungkapkan oleh komunitas sasaran untuk mencari berbagai layanan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
4. Kebutuhan Relatif (*relative need*) atau kebutuhan komparatif (*comparative need*), yaitu kebutuhan yang terjadi karena adanya kesenjangan antara jenis layanan yang diberikan kepada suatu komunitas dengan komunitas yang lain (h. 328-329).

2.8.2 Teknik *Assessment*

Salah satu teknik *assessment* yang dapat digunakan dalam penelitian partisipatif yang lebih dekat dengan pendekatan kualitatif adalah *Participatory Rural Appraisal* (PRA). Adi (2008) mengemukakan bahwa PRA adalah “salah satu bentuk tertentu dari penelitian kualitatif yang digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang situasi komunitas” (h. 341). Menurut

Mikkelsen (2005) PRA adalah teknik yang digunakan dalam mendiagnosis masalah-masalah tertentu dan menyortir solusi-solusi yang memungkinkan (h. 63). Mikkelsen (2005) kemudian membagi beberapa metode, teknik dan *tools* PRA. Diantaranya yaitu :

1. Tinjauan sumber (data) sekunder. Dengan teknik ini, peneliti dapat mencari berbagai sumber informasi yang terkait dengan topik penelitian. Dua jenis sumber (data) yaitu dokumen dan cerita rakyat. Dokumen dapat berupa laporan penelitian (kondisi sosial budaya, politik dan ekologi) data statistik, artikel jurnal, koran dan lain-lain.
2. Observasi Langsung. Observasi terhadap struktur fisik, perbedaan sosial, perilaku, tindakan dan simbol, memberikan informasi penting untuk mengajukan pertanyaan yang mendasar.
3. Wawancara semi terstruktur. Mikkelsen (2005) membagi wawancara semi struktural menjadi : a). Wawancara individu yaitu wawancara yang dilakukan kepada sebuah sampel responden yang dipilih secara sengaja untuk memperoleh informasi yang representatif. b). Wawancara informan kunci yaitu wawancara yang dilakukan terhadap orang yang diharapkan memiliki pemahaman khusus tentang topik penelitian. c). Wawancara kelompok menyediakan akses terhadap pemahaman informasi yang lebih luas. Para peserta bisa diundang pada saat wawancara sedang berjalan. Para anggotanya bisa mencapai 20 – 25 orang. d). Wawancara/diskusi kelompok terfokus memberi penekanan pada sebuah topik yang khusus. Kelompok terfokus terdiri dari 6-8 orang yang berdiskusi tentang satu masalah tertentu secara detail (h. 172-173).
4. *Ranking* dan *scoring*. Menurut Mikkelsen, ada beberapa jenis teknik *ranking* dapat digunakan dalam studi pembangunan, salah satunya adalah *problem ranking* (prioritas masalah). Pada tahap eksplorasi dari sebuah penelitian, perbedaan anggota diskusi dalam memberikan prioritas terhadap suatu masalah akan memberikan sebuah pengaruh terhadap perbedaan kepentingan atau pendapat mereka, yang kemudian dapat dibandingkan, dan kesepakatan bersama akan masalah mana

yang mesti menjadi prioritas dapat dicapai melalui pendekatan diskusi. *Problem ranking* (prioritas masalah) dapat digunakan di sini.

5. Pemetaan. Salah satu bentuk pemetaan yang dikemukakan Mikkelsen adalah pemetaan sosial yakni sebuah metode visual yang dibuat bersama sebuah kelompok dalam bentuk peta.
6. Membuat diagram. Salah satu *tool* yang dikemukakan Mikkelsen terkait dengan diagram adalah diagram Venn. *Tool* ini digunakan untuk menggambarkan perasaan partisipan terkait hubungan mereka dengan kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi lokal (h. 87-96)

2.9 Sampah

Menurut Apriadji (2002) sampah adalah “zat-zat atau benda-benda yang sudah tidak terpakai lagi, baik berupa bahan buangan yang berasal dari rumah tangga maupun dari pabrik sebagai sisa proses industri” (h. 1). Sedangkan menurut Sudrajat (2008) sampah kota ialah “sampah organik dan anorganik yang dibuang oleh masyarakat dari berbagai lokasi di kota tersebut” (h. 5)

Menurut Miller (1988) sampah adalah bahan-bahan padat yang tidak berharga, tidak dikehendaki, sehingga dibuang oleh pemiliknya (Soma, 2010, h. 1). Sedangkan menurut Tchobanoglous (1977) sampah adalah semua jenis bahan buangan baik yang berasal dari manusia atau binatang yang biasanya berbentuk padat. Umumnya bahan-bahan tersebut dibuang karena dirasakan oleh pemiliknya sebagai barang yang tidak bernilai, dan tidak diinginkan (Soma, 2010, h. 11).

John Pichtel mengemukakan “*we can loosely define solid waste as a solid material possessing a negative economic value, which suggests that it is cheaper to discard than to use*” (2005, h. 5). Sampah padat secara sederhana dapat didefinisikan sebagai material padat yang tidak memiliki nilai ekonomis, yang dianggap lebih kecil manfaatnya sehingga lebih baik dibuang daripada digunakan.

Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan sampah dalam kajian ini adalah bahan padat yang tidak dikehendaki oleh pemiliknya dan lebih baik dibuang daripada digunakan.

2.9.1 Pembagian Sampah

Apriadji (2002) menggolongkan sampah menjadi 4 kelompok :

1. Human excreta, merupakan bahan buangan yang dikeluarkan dari tubuh manusia, meliputi tinja (faeces) dan air kencing (urine).
2. Sewage, merupakan air limbah yang dibuang oleh pabrik maupun rumah tangga. Contohnya adalah air bekas cucian pakaian yang masih mengandung larutan deterjen.
3. Refuse, merupakan bahan pada sisa proses industri atau hasil sampingan kegiatan rumah tangga. Contohnya; panci bekas, botol bekas, sisa sayuran dll.
4. Industrial waste, merupakan bahan-bahan buangan dari sisa-sisa proses industri (h. 1).

Bila ditinjau dari macamnya, Apriadji (2002) membagi sampah menjadi dua :

1. Sampah lapuk (Garbage). Sampah golongan ini merupakan sisa-sisa pengolahan atau sisa-sisa makanan dari rumah tangga atau merupakan hasil sampingan kegiatan pasar bahan makanan, seperti pasar sayur-mayur. Contohnya adalah potongan-potongan sayuran yang merupakan sisa-sisa sortasi sayur-mayur di pasar, makanan sisa, kulit pisang, daun pembungkus dan sebagainya.
2. Sampah tak lapuk dan tak mudah lapuk (Rubbish). Sampah tak lapuk adalah sampah yang benar-benar tak akan bisa lapuk secara alami, sekalipun telah memakan waktu bertahun-tahun. Contohnya; plastik, kaca dan mika. Sampah yang tak mudah lapuk adalah sampah yang sangat sulit lapuk, sampah jenis ini membutuhkan proses perlahan-lahan secara alami. Sampah jenis ini terbagi menjadi 2 yaitu sampah yang bisa terbakar seperti kertas dan kayu dan sampah yang tidak bisa terbakar seperti kaleng dan kawat (h. 3)

2.9.2 Bahaya Sampah

Jika sampah tidak terkelola dengan baik, maka akan berdampak buruk baik bagi manusia maupun lingkungan sekitar. Basriyanta (2007) mengemukakan beberapa dampak buruk pengelolaan sampah yang kurang memadai, yaitu:

1. Dampak Bagi Kesehatan Manusia.

Sampah dapat menyebabkan berbagai macam penyakit seperti diare, tifus, muntaber, demam berdarah dan sebagainya yang dapat menyebar dengan cepat karena virus yang berasal dari sampah dengan pengelolaan yang tidak tepat. Jika sampah dibuang ke laut akan mengkontaminasi makhluk hidup seperti ikan, dengan demikian jika ikan tersebut dimakan oleh manusia maka zat yang terkandung dalam sampah seperti merkuri dan raksa akan mengkontaminasi tubuh manusia.

2. Dampak Bagi Lingkungan

Cairan rembesan sampah yang masuk ke dalam aliran air sungai atau aliran air tanah, dapat mencemari air. Berbagai organisme termasuk ikan dapat mati sehingga beberapa spesies akan lenyap, mengakibatkan berubahnya ekosistem perairan biologis.

3. Dampak Sosial Ekonomi

Pengelolaan sampah yang kurang baik akan membentuk lingkungan yang kurang menyenangkan bagi masyarakat, bau yang tidak sedap dan pemandangan yang buruk. Pembuangan sampah padat ke badan sungai dapat menyumbat aliran sungai sehingga mengakibatkan banjir. Di samping itu, meningkatkan jumlah biaya yang harus dikeluarkan untuk pengolahan air. Pengelolaan sampah yang kurang baik juga akan memberi dampak negatif bagi perkembangan pariwisata (h. 13-14)

Selain itu, Sony (2008) mengemukakan bahwa apabila sampah yang tidak dikelola dengan baik dan sehat akan berdampak buruk pada Kesehatan, Lingkungan, Ekonomi dan Sosial (h. 26-27).

Slamet (2000) membagi bahaya sampah terhadap kesehatan menjadi dua : bahaya yang terjadi karena efek langsung dan bahaya yang terjadi karena efek tidak langsung. Yang dimaksud dengan efek langsung adalah efek yang disebabkan karena terjadi kontak langsung dengan sampah tersebut. Misalnya, sampah beracun, sampah yang mengandung kuman patogen sehingga dapat menimbulkan penyakit. Sampah ini bisa berasal dari sampah rumah tangga selain sampah industri. Bahaya yang terjadi karena efek tidak langsung dapat dirasakan

masyarakat akibat proses pembusukan, pembakaran dan pembuangan sampah. Sampah yang ditimbun sembarangan dapat dipakai sarang lalat dan tikus. Lalat adalah vektor berbagai penyakit perut dan tikus membawa pinjal yang dapat menyebarkan penyakit Pest (h. 154-155).

2.9.3 Pengelolaan Sampah

Menurut Tchobanoglous (1977) pengelolaan sampah adalah sebuah upaya komprehensif menangani sampah-sampah yang dihasilkan dari berbagai aktifitas manusia, dikelompokkan menjadi enam elemen terpisah yaitu : 1) Pengendalian bangkitan, 2) Penyimpanan, 3) Pengumpulan, 4) Pemindahan dan pengangkutan, 5) Pemrosesan dan 6) Pembuangan (Soma, 2010, h. 1). Sedangkan menurut Sutjahjo (2007) pengelolaan sampah secara garis besar adalah kegiatan yang berkesinambungan antara 1) Pewadahan, 2) Pengumpulan, 3) Pemindahan, 4) Pengangkutan, dan 5) Pembuangan ke TPA (h. 11).

1. Timbulan

Menurut Tchobanoglous (1977) bangkitan atau timbulan sampah meliputi semua kegiatan membuang sesuatu benda yang dirasakan oleh pemiliknya sebagai tidak memiliki nilai lagi untuk dipertahankan (Soma, 2010, p. 13). Menurut Soma (2010, h. 14) dari segi ekonomi, pengolahan sampah akan lebih sederhana jika tingkat bangkitan sampah ini dapat dikendalikan ataupun lokasinya dapat diminimisasi menjadi titik-titik sumber yang mudah dijangkau.

2. Pewadahan

Menurut Pak (2002) pada tahap pewadahan, sampah dimasukkan ke dalam wadah untuk memudahkan pemindahan. Pada tahap ini perlu adanya partisipasi masyarakat untuk memisahkan sampah organik dan anorganik (Sutjahjo, 2007, h. 11). Menurut Koesrimardiyati (2011, h. 13) kegiatan pewadahan terdiri atas pewadahan individu dan/atau pewadahan komunal. Jumlah wadah sampah minimal 2 buah per rumah untuk pemilihan jenis sampah mulai dari sumber, yaitu wadah sampah organik dan wadah sampah anorganik.

3. Pengumpulan

Menurut Peavy (1985) Pengumpulan merupakan proses pemindahan dari sumber sampah ke tempat penampungan sampah sementara (TPS). Kegiatan pengumpulan ini merupakan tahapan yang paling kompleks dan sulit karena

tersebar nya sumber penghasil sampah. Tahap ini memerlukan biaya yang paling besar dari seluruh operasional pengelolaan sampah, yaitu mencapai 50-70% dari total biaya keseluruhan (Sutjahjo, 2007, h. 11).

4. Pemindahan

Pemindahan menurut Tchobanoglous (1977) adalah kegiatan pemindahan sampah baik yang berasal dari kontainer dan peralatan lainnya ke *transfer depo* atau *transfer station* (Soma, 2010, h. 17). Pengumpulan menurut Peavy (1985) dan pemindahan menurut Tchobanoglous (1977) cenderung sama.

5. Pemrosesan

Pemrosesan menurut Soma (2010) ialah upaya untuk mengurangi jumlah sampah yang harus diangkat, dan dibuang ke TPA dengan cara pemadatan, pemilihan composting dengan tujuan untuk mengubah bentuk fisik sampah atau memanfaatkannya kembali (h. 16).

6. Pembuangan ke TPA

Proses akhir dari pengelolaan sampah adalah pembuangan ke TPA. Canter (1996), Peavy *at al* (1985), Direktorat PLP-PU memasukkan pengelolaan sampah termaksud dalam proses akhir ini. Sedangkan Flintoff (1984) mengemukakan tiga bentuk sistem pengolahan sampah di TPA, yaitu : (1). *Open dumping*, (2). *Controlled Landfill*, dan (3). *Sanitary Landfill*. *Open dumping* merupakan cara yang paling sederhana, sampah dibuang saja di tanah kosong, dan dibiarkan sampai akhirnya membusuk. *controlled landfill* merupakan pengembangan dari sistem *open dumping*, pada sistem ini sampah dibuang dan diratakan dengan alat berat, kemudian ditutup dengan tanah. *Sanitary landfill* merupakan sistem pembuangan sampah yang paling baik dari kedua sistem terdahulu. Pada sistem ini sampah ditimbun pada suatu lubang yang telah disiapkan, dilanjutkan dengan pemadatan, kemudian ditutup dengan tanah sebagai lapisan penutup (Sutjahjo, 2007, h. 12)

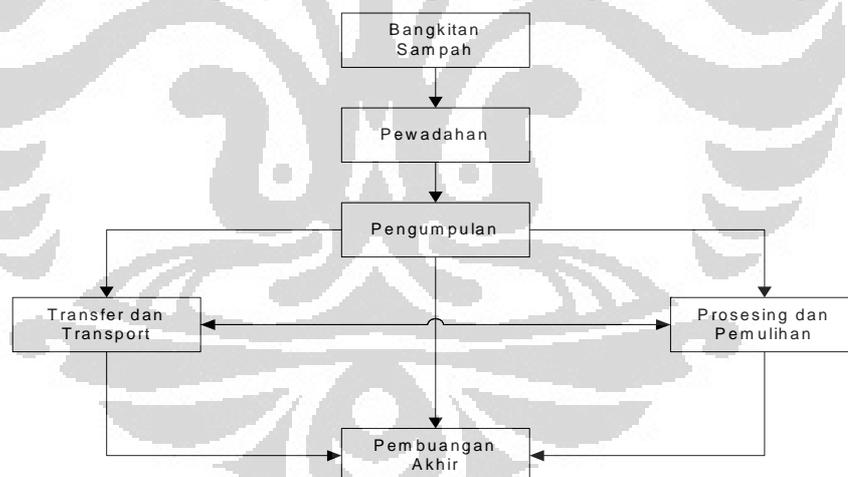
Apriadi (2002) mengemukakan beberapa cara pemusnahan sampah yaitu:

1. Penimbunan tanah (*landfill*), sampah ditimbun begitu saja sampai menggunung, lalu diratakan dan dipadatkan. Jenis sampah yang cocok untuk cara ini adalah sampah *rubbish*. Sebab kalau sampah itu

bercampur dengan *garbage* akan berbau setelah beberapa hari dibuang dan ini akan mendatangkan tikus, kecoa, lalat, anjing dan kucing.

2. Penimbunan tanah secara sehat (*Sanitary landfill*), sampah dibuang dan dibiarkan menggunung seperti cara *landfill*. setelah sampah mencapai ketinggian yang diinginkan, permukaan atasnya segera ditimbun tanah setebal 60 cm. Kedua jenis sampah bisa.
3. Pembakaran sampah (*incineration*), sampah dikumpulkan dan dibakar.
4. Penghancuran (*pulverization*), sampah dihancurkan dengan alat pelumat sampah.
5. Pengomposan (*composting*), sampah-sampah yang mudah lapuk dibusukkan hingga menjadi pupuk kompos.
6. Makanan ternak (*hogfeeding*), sampah yang mudah lapuk dijadikan sebagai makanan ternak.
7. Pemanfaatan ulang/*recycling*, sampah yang masih bisa diolah kembali dipungut dan dikumpulkan kemudian dimanfaatkan lagi (h. 8-11)

Secara sederhana pengelolaan sampah dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.2 : Hubungan elemen fungsional pengelolaan sampah

Sumber: Soma (2010, h. 12)

2.9.3.1 Sistem Pengelolaan Sampah

Menurut Sudradjat (2009) terdapat tiga jenis sistem pengelolaan sampah: sistem sentralisasi, sistem desentralisasi dan sistem sentra-desentralisasi atau se-desentralisasi. Sistem sentralisasi adalah pemusatan pembuangan sampah kota di satu lokasi atau TPA. Sistem desentralisasi adalah membagi tempat pembuangan sampah kota di beberapa TPS. Adapun sistem se-desentralisasi menggabungkan

dua sistem tersebut dengan keberadaan TPA dan TPS (h. 50). Tabel 2.1 berikut menunjukkan perbedaan ketiga sistem ini.

Tabel 2.1 : Perbandingan ketiga sistem pengolahan sampah

No	Kendala	Sentral istik	Desentral istik	Se- desentralistik
1	Luas lahan terbatas	TS	TS	S
2	Volume sampah sangat besar	S	TS	S
3	Pengumpulan sampah kurang efektif	TS	S	S
4	Dana pengelolaan sampah terbatas	TS	S	S
5	Kemampuan teknologi terbatas	S	TS	S
6	Masyarakat tidak kooperatif	S	TS	S
7	Masyarakat tidak kreatif/bisnis	S	TS	S
8	Banyak pengangguran	TS	S	S
9	Dampak luas	TS	S	S
10	Pemda tidak respon	TS	S	S
Jumlah yang sesuai (S)		4	6	10

Keterangan : S=Sesuai; TS=Tidak Sesuai

Sumber : Sudrajat, 2009, h. 51

2.9.3.2 Konsep Zero Waste dalam Pengelolaan Sampah.

Menurut Bebasari (2000) *Zero Waste* merupakan konsep pengelolaan sampah yang mengintegrasikan prinsip 3R yaitu *reduce*, *reuse* dan *recycle* dengan pengolahan sedekat mungkin dengan sumbernya. *Reduce* adalah mengurangi timbunan sampah pada sumbernya. *Reuse* merupakan upaya memanfaatkan kembali sampah atau barang yang tidak berguna lagi, sedangkan *recycle* merupakan pendaurulangan sampah menjadi barang lain yang bernilai ekonomis (Sutjahjo, 2007, h. 14). Morgan (2003) mengatakan bahwa "*recycling is one solution to the solid waste problem*" (h. 119)

Konsep *Zero Waste* ini menurut Sutjahjo (2007) memiliki tiga manfaat, yaitu: 1). Mengurangi ketergantungan terhadap TPA yang semakin sulit didapat, 2). Meningkatkan efisiensi pengolahan sampah perkotaan dan 3). Terciptanya peluang usaha bagi masyarakat (h. 15).

2.9.3.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah

Mengutip beberapa pandangan tokoh, Wardhani (2004) mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan sampah yaitu :

1. Jenis Kelamin. Chan (1998:321) dan De Young (1993:77) menyebutkan bahwa wanita cenderung berpartisipasi lebih aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah domestik berdasarkan suatu program yang diberikan.
2. Usia. Chan (1998:321) juga mengungkapkan bahwa sebagian besar pihak yang aktif dalam pengelolaan sampah domestik adalah mereka yang berusia 30-39 tahun.
3. Pendidikan. Berger (1997:520) mengemukakan bahwa pendidikan mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah.
4. Informasi. De Young (1993: 75, 83) mengatakan bahwa adanya informasi yang didukung dengan alasan-alasan ekonomi dan lingkungan mampu merubah perilaku seseorang tentang sampah.
5. Akses ke program daur ulang. Berger (1997:530) mengemukakan bahwa adanya akses yang mudah ke lokasi-lokasi daurulang atau program-program daurulang mendorong orang lebih aktif dalam kegiatan lingkungan.
6. Insentif. Gardner dan Stern (1996:143) mengatakan bahwa partisipasi masyarakat akan meningkat tajam ketika insentif finansial disediakan bagi program-program berbasis masyarakat yang telah berjalan. (h. 29-30)

Studi ini (Perencanaan Pengelolaan Sampah dengan Pendekatan Partisipatif) berjalan mengikuti tahapan pengembangan masyarakat .

Tahap persiapan dilakukan untuk menentukan kelayakan Pulau Panggang dan RW 01 Kelurahan Pulau Panggang untuk menjadi lokasi penelitian serta penempuhan jalur formal untuk memperoleh izin penelitian dari pemerintah terkait.

Setelah tahap persiapan selesai, tahap *assessment* dilakukan untuk mendeskripsikan : 1. Kualitas hidup yang dirasakan warga RW 01 Kelurahan Pulau Panggang terkait dengan permasalahan sampah., 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi masalah sampah di RW 01 Kelurahan Pulau Panggang dan 3. Aset

komunitas yang dimiliki warga RW 01 Kelurahan Pulau Panggang yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi masalah sampah.

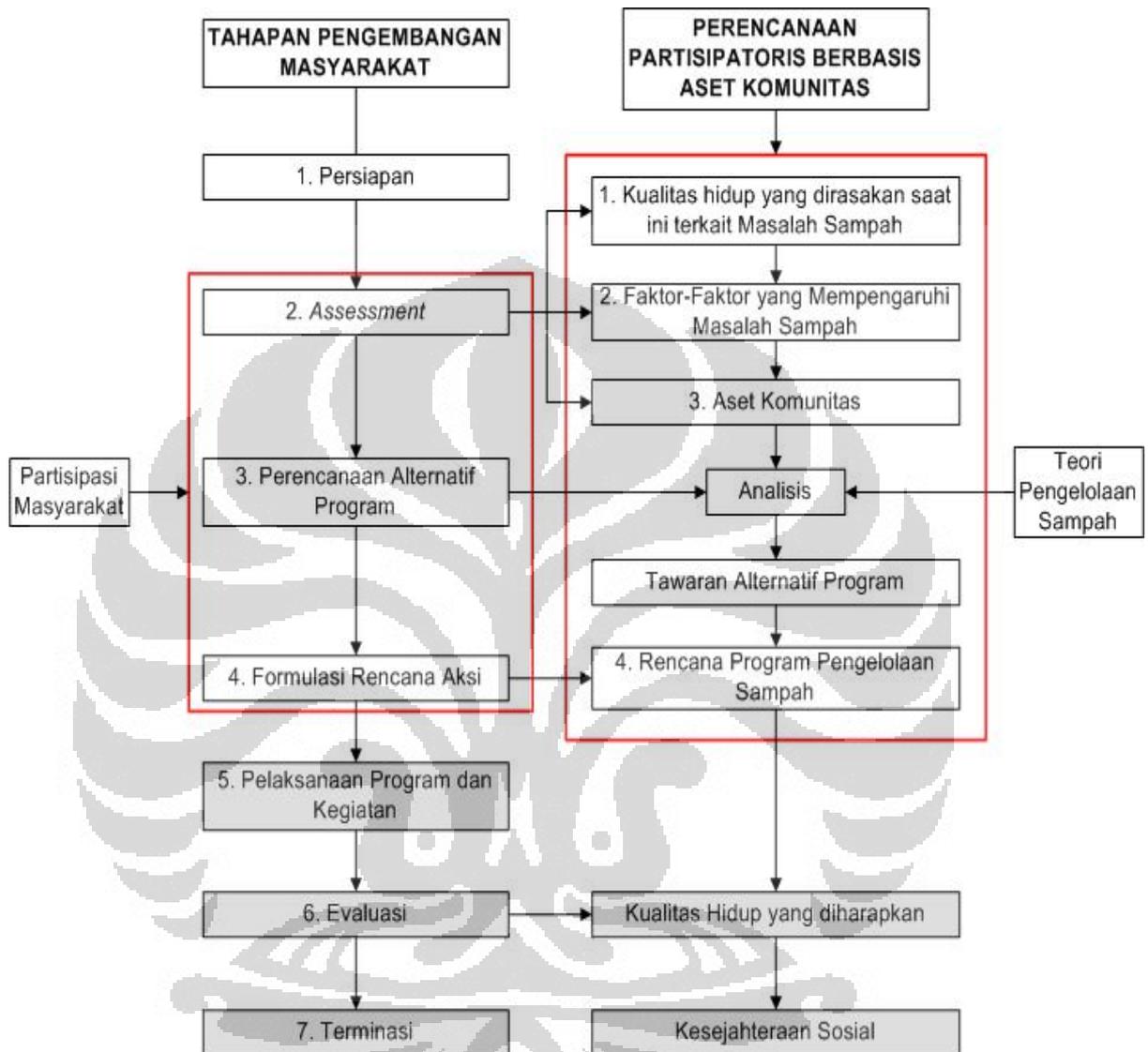
Setelah tahap *assessment* selesai dilakukan, maka dilanjutkan dengan tahap perencanaan alternatif program. Tahap ini dilakukan dengan jalan menganalisis ketiga hal yang telah diperoleh pada tahap *assessment* secara bersamaan dan saling terkait untuk melahirkan sebuah tawaran alternatif program yang secara logis dapat mengurangi masalah sampah yang ada. Analisis ini dilakukan dengan mempertimbangkan teori-teori pengelolaan sampah yang ada. Alternatif program yang dihasilkan dari analisis tersebut kemudian ditawarkan kepada masyarakat dan meminta partisipasi mereka untuk memberikan masukan terhadap alternatif program tersebut.

Setelah tahap perencanaan alternatif program selesai, maka berdasarkan masukan dari masyarakat disusunlah rencana program pengelolaan sampah di RW 01 Kelurahan Pulau Panggang sebagai tahapan terakhir dari penelitian ini.

Tahap *assessment*, perencanaan alternatif program dan formulasi rencana aksi dilakukan dengan melibatkan partisipasi warga RW 01 Kelurahan Pulau Panggang.

Tahapan untuk mendeskripsikan : 1. Kualitas hidup yang dirasakan warga RW 01 Kelurahan Pulau Panggang terkait dengan permasalahan sampah., 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi masalah sampah di RW 01 Kelurahan Pulau Panggang dan 3. Aset komunitas yang dimiliki warga RW 01 Kelurahan Pulau Panggang yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi masalah sampah, sehingga melahirkan rencana program pengelolaan sampah merupakan tahapan dari perencanaan partisipatoris berbasis aset komunitas.

Secara ringkas, kerangka alur pikir penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.3 berikut:



Gambar 2.3 : Alur Pikir

Ket : Kotak yang diberi bayangan hitam menunjukkan tahapan yang tidak dilakukan oleh penelitian ini tetapi memiliki keterkaitan langsung.

BAB 3

GAMBARAN UMUM LOKASI DAN PENGELOLAAN SAMPAH DI RW 01 KELURAHAN PULAU PANGGANG

3.1 Kondisi Geografi Kelurahan Pulau Panggang

Pulau Panggang sebagai tempat yang menjadi lokasi penelitian ini terletak di Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Kepulauan Utara, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta.

Kelurahan Pulau Panggang merupakan gugusan pulau-pulau yang terdiri dari 13 pulau, dimana hanya 2 pulau diperuntukan untuk pemukiman yaitu Pulau Panggang dan Pulau Pramuka. Pulau Panggang terdiri dari 3 RW dan 21 RT, semuanya merupakan pemukiman penduduk. Pulau Pramuka terdiri dari 2 RW dan 8 RT.



Gambar 3.1 : Peta Pulau Panggang

Tabel 3.1 : Keadaan RT/RW di Kelurahan Pulau Panggang

NO.	RW	JUMLAH RT	KETERANGAN
1	01	7	Pulau Panggang bagian barat, lingkungan pemukiman penduduk.
2	02	7	Pulau Panggang bagian tengah, lingkungan pemukiman penduduk, sekolah, dan puskesmas.
3	03	7	Pulau Panggang bagian timur, lingkungan pemukiman penduduk, sekolah, dan rumah dinas guru.
4	04	4	Pulau Pramuka bagian utara, lingkungan pemukiman penduduk, gedung balai warga, rumah dinas, rumah sakit, penginapan, TPI dan PHKA.
5	05	4	Pulau Pramuka bagian selatan, lingkungan pemukiman penduduk, kabupaten, sekolah, asrama, gedung serba guna, penginapan, perhubungan dan DEPAG.

Sumber : Laporan Bulanan Kel. Pulau Panggang (Februari, 2012, h. 4)

3.2 Demografi Kelurahan Pulau Panggang

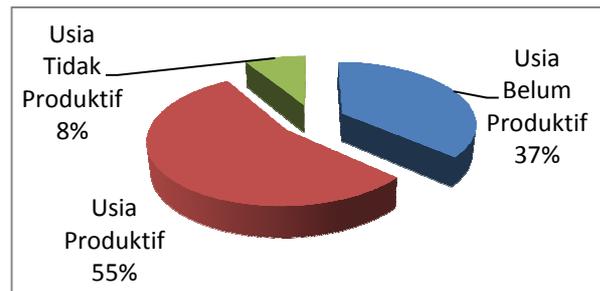
Pada abad ke-20, secara kasar jumlah populasi di Pulau Panggang berkisar ratusan dan melonjak menjadi ribuan pada akhir abad ke-20 (Irsyad, 2012, h. 26) Data Kelurahan Pulau Panggang per Februari 2011 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kelurahan Pulau Panggang adalah 5.790 orang dan bertambah 60 orang pada tahun 2012 bulan Februari menjadi 5.850 dengan komposisi laki-laki 2.981 dan perempuan 2.867.

Tabel 3.2 : Perkembangan jumlah penduduk P. Panggang dan Pulau-pulau lain

Tahun/Kel.	1905	1906	1960	1994	1999	2010	2011	2012
Panggang	212	274	1635	3718	4081	5768	5790	5850
Kelapa	504	602		5772	4786		-	-
Tidung	136	155		4224	3495		-	-
Untung Jawa	73	92		1354	3422		-	-
Kelor	123	155	-	-	-		-	-
Ubi	-	-	-	-	-		-	-
Pari				1770				

Sumber : Winkler (1905), Selleger (1906), Muchtar (1960), Iskandar (1996), Kab. Adm. Kep.Seribu (1999) dalam Irsyad (2012) dan Kel. P. Panggang (2010, 2011 dan 2012)

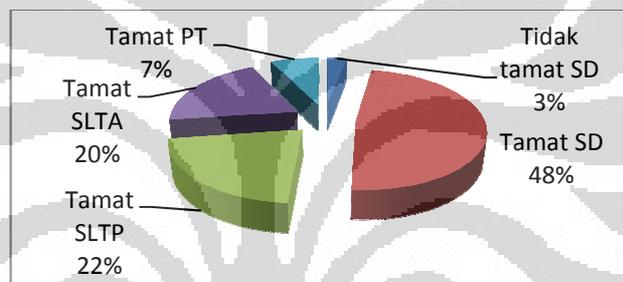
Irsyad (2012) dengan mengutip data kelurahan Pulau Panggang tahun 2011 mengemukakan bahwa jumlah penduduk dengan usia produktif (16-55 tahun) adalah 3.201 orang melebihi jumlah yang sudah tidak produktif (di atas 55 tahun) yakni 501 orang dan belum produktif (usia di bawah 16 tahun) yaitu 2135 orang. Besarnya jumlah anak kecil dan usia remaja bersama kombinasi dewasa tanggung dan dewasa menampilkan tentang perspektif masa depan Pulau Panggang. Perluasan lahan menjadi sulit, meski reklamasi pantai masih terjadi, dan diperkirakan tidak dapat menampung pemukiman dan kegiatan ekonomi masyarakat di masa mendatang (h. 26). Hal ini terlihat pada gambar 3.2 berikut:



Gambar 3.2 : Persentase jumlah penduduk usia produktif

Sumber : Telah diolah kembali

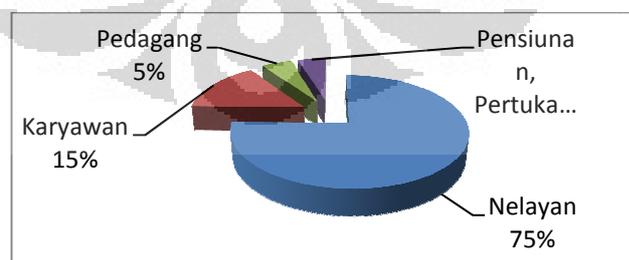
Berdasarkan Laporan Bulanan Kel. Pulau Panggang (2012), dari segi pendidikan, sebagian besar jumlah penduduk Kel. P. Panggang adalah tamat SD (688 orang), disusul dengan tamat SLTP (310 orang), kemudian tamat SLTA (285 orang) dan tamat PT (103 orang), sedangkan yang tidak tamat SD adalah 42 orang. Persentase terlihat pada gambar 3.3 berikut:



Gambar 3.3 : Persentase jumlah penduduk berdasarkan pendidikan

Sumber : Telah diolah kembali

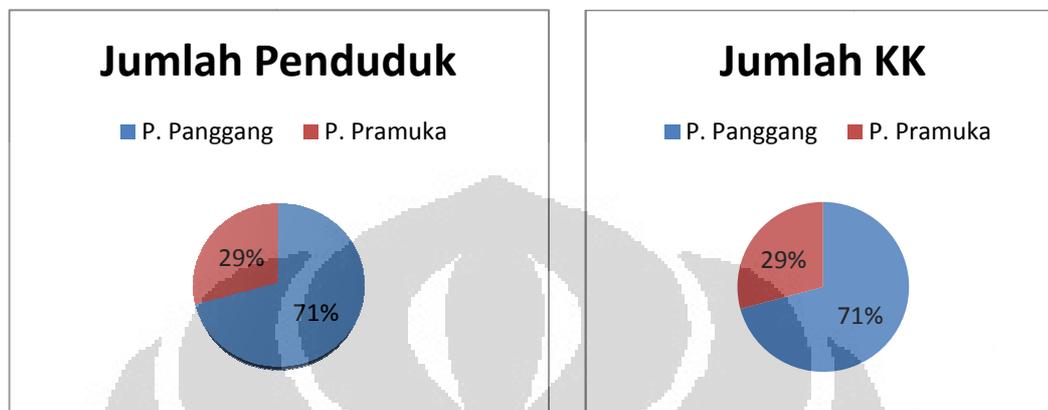
Sedangkan dari segi mata pencaharian, sebagian besar penduduk Kel. Pulau Panggang adalah nelayan (1722 orang), disusul karyawan (348 orang), pedagang (114 orang), lain-lain (58 orang), pertukangan (22 orang), dan pensiunan (24 orang) (h. 15-16). Persentasenya terlihat pada gambar 3.4 berikut:



Gambar 3.4 : Persentase jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan

Sumber : Telah diolah kembali

Laporan Bulanan Kel. P. Panggang (2012) juga menyebutkan bahwa jumlah penduduk Kel. P. Panggang tersebar di 5 RW yaitu sebanyak 4.134 jiwa di Pulau Panggang, dan sebanyak 1.716 jiwa di Pulau Pramuka. Sedangkan sebaran KK di 5 RW yaitu 1.191 KK di Pulau Panggang dan 492 KK di Pulau Pramuka.



Gambar 3.5 : Perbandingan persentase jumlah penduduk dan KK antara P. Pramuka dan P. Panggang

Sumber : Telah diolah kembali

3.3 Penggunaan Lahan

Laporan Akhir Program Muhammad Husni Thamrin (MHT) Plus Kepulauan Seribu tahun 2010 (h. 74) menyebutkan bahwa salah satu permasalahan yang menonjol di Pulau Panggang adalah tidak sebandingnya luasan tanah yang ada dengan pertumbuhan penduduk. Hal ini mengakibatkan berbagai permasalahan, diantaranya tidak tertatanya pemukiman terutama yang berada di pinggir laut. Besar kemungkinan hal inilah yang menjadi salah satu faktor kuat dari masuknya beberapa RW di Pulau Panggang ke dalam daftar RW kumuh versi BPS.

Pengadaan lahan dilakukan dengan cara mengurug pantai (reklamasi) dengan cara menumpuk sampah yang mengapung dari Jakarta dan dari Pulau Panggang, untuk kemudian ditumpuk dengan batu karang. Kondisi tersebut menjadikan rumah dan lingkungannya terlihat kotor dan kumuh. Hal ini sudah dilakukan warga semenjak bertahun-tahun yang lalu. Berdasarkan keterangan dari narasumber awalnya luas daratan Pulau Panggang—bukan kelurahan Pulau Panggang—hanya 6 Ha, namun saat ini sudah meluas menjadi 9 Ha, karena adanya pembukaan lahan untuk pemukiman dengan jalan pengurukan.

3.4 Pengelolaan Sampah di RW 01 Kelurahan Pulau Panggang

1. Pewadahan

Masyarakat Pulau Panggang khususnya di RW 01 mewadahi sampah rumah tangga mereka ke wadah sampah yang ada di rumah mereka masing-masing. Wadah yang digunakan sebagian besar dibuat sendiri oleh warga. Sebagian disediakan oleh RW, RT dan bantuan dari LMK dan Pemerintah. Masyarakat Pulau Panggang jarang melakukan pemilihan antara sampah organik dan anorganik. Tidak ada wadah yang terpisah antara wadah untuk sampah organik dan wadah untuk sampah anorganik. Gambar 3.6 berikut menunjukkan tempat sampah warga RW 01 yang terbuat dari drum, keranjang dan kaleng dan tidak terpisah antara wadah untuk sampah organik dan wadah untuk sampah anorganik, semuanya menjadi satu.



Gambar 3.6 : Tempat sampah warga

Sumber : Dokumen pribadi

2. Pemrosesan

Beberapa warga yang mempunyai keahlian dalam membuat kerajinan tangan dari sampah, melakukan pemrosesan dengan jalan membuat tas, dompet, gelang dan lain-lain dari sampah plastik. Sampah plastik yang dianggap bisa digunakan untuk membuat kerajinan tangan dipisahkan dengan sampah yang lain. Gambar 3.7 berikut menunjukkan hasil kerajinan tangan dari sampah plastik dalam bentuk tas dan gelang tangan.



Gambar 3.7 : Hasil kerajinan tangan buatan ibu-ibu RW 01

Sumber : Dokumen pribadi

3. Pengumpulan/Pemindahan

Sebelum tahun 2012 sampah-sampah yang sudah diwadahi akan diangkut oleh petugas pengangkut sampah dan dikumpulkan di Lokasi Pembuangan Sampah (LPS) dengan menggunakan gerobak sampah. Semenjak memasuki tahun 2012 sudah tidak ada lagi yang mengangkut sampah masyarakat. Akhirnya masyarakat secara individu melakukan proses pengumpulan/pengangkutan. Gambar 3.8 berikut menunjukkan gerobak sampah RW 01 yang pernah digunakan untuk mengangkut sampah warga RW 01 dan dibuang ke LPS sebagaimana terlihat pada gambar 3.9.



Gambar 3.8 : Gerobak Sampah RW 01

Sumber : Dokumen pribadi



Gambar 3.9 : Lokasi Pembuangan Sampah RW 01

Sumber : Dokumen pribadi

4. Pemusnahan

Sebagian besar masyarakat memusnahkan sampah dengan jalan di timbun begitu saja dan dibakar. Pada gambar 3.10 berikut, menunjukkan sampah warga RW 01 yang dimusnahkan dengan jalan ditimbun di urukan. Sedangkan gambar 3.11 menunjukkan sampah warga RW 01 yang dimusnahkan dengan jalan dibakar.



Gambar 3.10 : Pemusnahan sampah dengan ditimbun

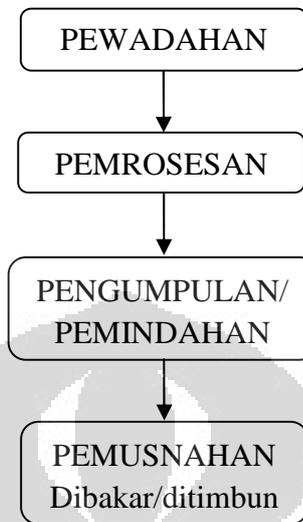
Sumber : Dokumen pribadi



Gambar 3.11 : Pemusnahan sampah dengan dibakar

Sumber : Dokumen pribadi

Dari uraian di atas, pola pengelolaan sampah di RW 01 Pulau Panggang dapat ditunjukkan dengan gambar 3.12 berikut:



Gambar 3.12 : Pola Pengelolaan Sampah di RW 01 Pulau Panggang

BAB 4

TEMUAN LAPANGAN

4.1 Masalah Sampah di RW 01 Kelurahan Pulau Panggang

Dari hasil wawancara kelompok terfokus terhadap tokoh masyarakat dan ibu rumah tangga yang ada di RW 01 Kelurahan Pulau Panggang menemukan bahwa yang menjadi masalah di Pulau Panggang terutama di RW 01 terkait dengan masalah sampah adalah sebanyak 70 – 80 % sampah rumah tangga masyarakat RW 01 tidak berakhir di Lokasi Pembuangan Sampah (LPS), tetapi di sekitar urukan, pemukiman warga dan di laut.

Beberapa informan mengungkapkan akan masalah sampah ini, sebagaimana MN dan SY:

“Hanya 10 % lah sampah yang di buang ke LPS” (MN, Agustus 2012)

“Banyak lah (sampah) yang bertebaran. Bisa 80-75 % lah.” (SY, Agustus 2012)

Dari hasil observasi menunjukkan bahwa sampah yang dihasilkan masyarakat Pulau Panggang khususnya RW 01 sebagian besar bertebaran di sekitar pemukiman warga dan laut. Dan hanya sebagian kecil yang berakhir di LPS. Gambar 4.1 berikut menunjukkan sampah warga RW 01 yang bertebaran di sekitar pemukiman warga, Gambar 4.2 menunjukkan sampah warga RW 01 yang bertebaran di laut dan Gambar 4.3 menunjukkan sampah warga RW 01 yang berakhir di LPS.



Gambar 4.1 : Sampah yang tersebar di lingkungan warga
Sumber : Dokumen pribadi



Gambar 4.2 : Sampah yang berakir di laut

Sumber : Dokumen pribadi



Gambar 4.3 : Sampah yang berakir di Lokasi Pembuangan Sampah

Sumber : Dokumen pribadi

Dengan mempertimbangkan semua data yang ada, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi masalah di Pulau Panggang terutama di RW 01 terkait dengan sampah adalah “Sebanyak 85 % sampah rumah tangga masyarakat RW 01 Kelurahan Pulau Panggang pada Tahun 2012 tidak berakhir di Lokasi Pembuangan Sampah (LPS), tetapi di sekitar pemukiman warga dan di laut”

Masalah ini dengan asumsi bahwa 1 Kepala Keluarga (KK) di RW 01 setiap hari menghasilkan sampah sebanyak 1 ember atau 1 jerigen dan sebagian besar adalah sampah plastik/non organik, sebagaimana diungkapkan oleh beberapa informan :

“Paling satu emberlah sehari. Kebanyakan yang kering seperti kantong plastik” (SH, Agustus 2012)

“Kalau sehari 1 jerigen ada juga, 1 ember.” (NJ, Agustus 2012)

“Paling satu emberlah sehari. Kebanyakan yang kering seperti kantong plastik” (SH, Agustus 2012)

Ini berarti bahwa jika ada 423 KK di RW 01 pada tahun 2012, maka setiap hari mereka menghasilkan sampah sebanyak 423 ember/jerigen. Ini menunjukkan bahwa sebanyak 85% dari sampah tersebut atau 359,6 ember/jerigen sampah rumah tangga masyarakat RW 01 Kelurahan Pulau Panggang pada Tahun 2012 tidak berakhir di Lokasi Pembuangan Sampah (LPS), tetapi di sekitar pemukiman warga dan di laut.

Masalah ini menyebabkan bau yang tidak sedap dan lingkungan yang tampak kotor. Informan HR dan NJ menuturkan hal ini :

“Di tempat dermaga ada yang bolong, sebelah utara. Di RT 7 lokasinya. Mana yang peduli. Lihat itu sampah itu di situ. Udah baunya, udah enggak sedap dicium, baunya juga. (HR, Agustus 2012)

“Entar kalau ada angin beterbangan sampahnya. Kita lah yang dekat yang dapat, baunya. Apalagi sisa nasi yang basah itu yang sehari-hari di rumahnya, kalau dia buang ke situ, udah ke sini baunya. Abis dia mau buang kemana lagi, enggak ada tempatnya” (NJ, Agustus 2012)

4.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masalah Sampah di RW 01

4.2.1 Faktor Manusia dan Sosial

Faktor manusia dan sosial yang mempengaruhi masalah sampah di Kelurahan Pulau Panggang RW 01 dapat dikategorikan menjadi faktor perilaku, predisposisi, penguat dan modal sosial.

4.2.1.1 Faktor Perilaku

Beberapa perilaku pengelolaan sampah yang dilakukan masyarakat Pulau Panggang yang ada di RW 01 adalah kegiatan pewadahan, pengumpulan/pengangkutan, pemrosesan dan pemusnahan.

1. Pewadahan

Pada saat melakukan pewadahan, masyarakat Pulau Panggang di RW 01 tidak melakukan pemisahan antara sampah organik dan sampah non organik. Sebagian besar dari mereka mencampurnya menjadi satu.

“Dicampur aduk. Kalau di Pulo ma enggak ada yang organik non organik. Jadi dicampur organik dan non organik. Jadi satu disitu dia ma.” (HR, Agustus 2012)

“enggak dipisahin. Taunya dia ma jadi sampah buang” (HL, Agustus 2012)

“Digabung. di sini enggak ada yang milah-milah itu.” (MN, Agustus 2012)

“Kalau di Pulo dicampur, organik dan non organik jadi satu. Dibilang juga (untuk dipisahin) cuma masyarakat dibuang aja jadi satu” (SH, Agustus 2012)

“Kalau dipisahkan (sampah organik dan non organik) belum” (SR, Agustus 2012)

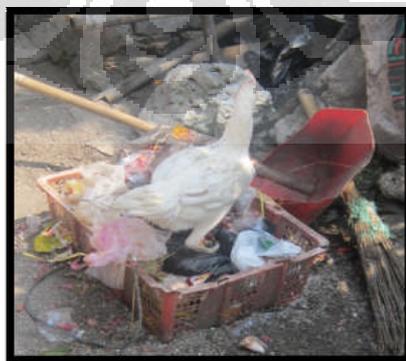
“Mau kering, basah di situ aja” (NJ, Agustus 2012)

Hal ini karena wadah/tempat sampah yang mereka buat sendiri tidak terpisah antara tempat sampah organik dan tempat sampah non organik.

“Kalau di sini jadi satu aja, yang kering dan yang basah. Abis tempat sampahnya enggak ada. Tempat sampahnya bikin sendiri dari jerigen.” (NP, Agustus 2012)

“Langsung dicampur sih. Soalnya tempat sampahnya ya model itu tu.” (MK, Agustus 2012)

Gambar 4.4 berikut menunjukkan tempat pewadahan sampah warga RW 01 yang tidak terpisah antara tempat sampah organik dan tempat sampah non organik.



Gambar 4.4 : Tempat pewadahan sampah masyarakat RW 01
Sumber : Dokumen pribadi

Bahkan salah satu pemimpin masyarakat menganggap tidak ada untungnya melakukan pemisahan antara sampah organik dan sampah non organik.

“Tidak dipisahin, jadi satu. Di sini siapa yang mau begitu, malas. Tidak ada untungnya juga sih.” (SY, Agustus 2012)

Bagi mereka yang rumahnya berdekatan dengan lokasi urukan langsung dibuang sampahnya setelah disapu tanpa diwadahi terlebih dahulu, Sebagaimana penuturan SY dan SH :

“Masyarakat ya nampungnya di kantong plastik. Atau nyapu langsung buang” (SY, Agustus 2012)

“Kalau sampah sore, pagi, langsung dibuang, enggak ditampung. Misalnya sore ada sampah, pagi disapu lagi, langsung dibuang” (SH, Agustus 2012)

Bagi masyarakat yang aktif memanfaatkan sampah untuk kerajinan tangan memisahkan antara sampah organik dan sampah non organik (yang bisa dimanfaatkan), sebagaimana yang dikemukakan oleh SB dan AS :

“Kalau saya pisahin mana sampah plastik yang bisa digunakan” (SB, Agustus 2012)

“Ya kalau semacam sampah kopi, kan bisa kita pisahkan buat bikin dompet. Trus sampah plastik juga kita gunakan. Kalau semacam sampah nasi atau bekas sayur-sayuran itu dibuang. Tidak digunakan. Kalau sedotan juga bisa kita gunakan” (AS, Agustus 2012)

Dari gambaran diatas dapat disimpulkan bahwa 95 % masyarakat warga RW 01 Kelurahan Pulau Panggang pada tahun 2012 tidak memisahkan sampah organik dan non organik saat diwadahi. Tidak adanya tempat sampah organik dan anorganik, adanya pandangan dari RW bahwa pewadahan tidak mendatangkan keuntungan menjadi penyebabnya.

2. Pengumpulan/Pengangkutan

Pada saat melakukan pengumpulan/pengangkutan sampah, masyarakat RW 01 Pulau Panggang membuang sampah mereka ke tiga tempat : urukan, laut dan Lokasi Pembuangan Sampah (LPS).

Informan HR, FD dan MN mengatakan bahwa warga membuang sampah mereka ke urukan dan LPS.

“Masyarakat membuang khusus di urukan, dia punya lokasi 15 x 8, contohnya kan begitu.” (HR, Agustus 2012)

“Masyarakat buangnya sembarangan. Sudah kita adain tempat pembuangan sampah sama aja. Mereka buat tempat dan dibuang sampah. Jadi enggak peduli kalau di RW 1 tentang sampah. (FD, Agustus 2012)

“Kenapa demikian, karena kesadaran masyarakat itu kurang. Masyarakat buang sampah seenaknya saja. Padahal sudah kita sediakan tempat sampah akhir itu, ternyata (kebanyakan) enggak sampai ke sana masyarakat buang. Di pekarangan orang juga dia buang, tempat reklamasi, urukan.” (MN, Agustus 2012)

Gambar 4.5 menunjukkan sampah warga RW 01 yang dibuang ke urukan dan Gambar 4.6 menunjukkan sampah warga RW 01 yang dibuang ke LPS.



Gambar 4.5 : Sampah yang dibuang ke urukan

Sumber : Dokumen pribadi



Gambar 4.6 : Sampah yang dibuang ke LPS

Sumber : Dokumen pribadi

Informan SR, NP, NJ, MK dan AS mengatakan bahwa warga membuang sampah mereka ke urukan dan laut.

“Memang di sini masih buang sampah sembarangan. Ada juga yang di buang di bawah rumah seperti lagun, ada genangan air, di situ juga ada sampah. Kesadarannya masih kurang. Ada yang (buang) di belakang, di depan, ada juga yang dilempar aja begitu.” (SR, Agustus 2012)

“Buang ke laut kalau sini ma”. (NP, Agustus 2012)

“Pembuangannya di situ tu (urukan). Enggak ada pembuangannya. Ada yang ke laut. Banyak yang rebut sih, enggak ada pembuangannya, sampah. Pada buangnya ke laut aja.” (NJ, Agustus 2012)

“Padahal sudah dibikin tempat ini nih, tapi warganya buangnya sembarangan.” (MK, Agustus 2012)

“Kalau sampah sisa nasi, perut ikan, langsung dibuang ke laut. Kalau enggak dibuang bau. Kalau yang lain ditaruh aja di tempat sampah, kalau udah penuh, buang ke urukan. Masyarakat di sini buang sampahnya kalau tidak di laut, di urukan” (AS, Agustus 2012)

Gambar 4.7 menunjukkan sampah warga RW 01 yang dibuang ke laut.



Gambar 4.7 : Sampah yang dibuang ke laut

Sumber : Dokumen pribadi

Dari ketiga tempat pembuangan sebagian besar masyarakat membuang sampah mereka ke urukan :

“Di RW 1 kan sudah ada tempat pembuangan sampah tu, cuma kebanyakan warga itu membuangnya enggak ke sana LPS, jadi di sana itu enggak penuh-penuh. Jadi membuangnya itu, kalau yang pada punya urukan di laut dibuang di urukannya. Terkadang juga buang ke laut.” (HL, Agustus 2012)

“Bisa lah 20 % (yang buang ke LPS). Itu pun kalau sampah banyak sekali, semisal gedoran rumah, kalau di (urukan) orang udah penuh dilemparkan ke LPS. Sisanya ke tempatnya masing-masing urukan” (HR, Agustus 2012)

“Rata-rata 35% lah yang buang ke LPS. Tapi itu hanya RT 3, 5 dan 4. Cuma tiga RT. Paling 35-40 % lah yang buang ke situ. Kalau saya lihat rata-rata di pinggir pantai semua. Rata-rata 30 % lah yang buang ke laut” (FD, Agustus 2012)

“Saya pikir kalau sekarang, tidak ada sekali yang buang sampah ke sana. Kalau 10 % pun jarang yang buang ke situ (MN, Agustus 2012)

“Di sini masyarakatnya buang sampah ke laut. Ada juga yang di urukan. Tapi lebih banyak yang di urukan. Sekitar 70 %.” (SH, Agustus 2012)

“Kalau dia punya lahan, ya dia buang ke situ. Lebih banyak yang buang ke urukan daripada ke laut. Yang ke urukan paling 70 %, 30 % nya ke laut.” (SB, Agustus 2012)

“Kalau dibagi 100% itu sih kebanyakan ke urukan. Minimal 75% kali lah, enggak terlalu banyak.” (NP, Agustus 2012)

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa “Sebanyak 75 % masyarakat RW 01 Kelurahan Pulau Panggang pada tahun 2012 membuang sampah rumah tangga mereka ke urukan”, “Sebanyak 5 % masyarakat RW 01 Kelurahan Pulau Panggang pada tahun 2012 membuang sampah rumah tangga mereka ke laut” dan “Hanya 15 % masyarakat RW 01 Kelurahan Pulau Panggang pada Tahun 2012 membuang sampah rumah tangga mereka ke LPS.”

3. Pemrosesan

Pada tahap pemrosesan masyarakat Pulau Panggang memanfaatkan sampah plastik untuk kerajinan tangan seperti tas, dompet, topi dan lain-lain.

“Ada (yang memanfaatkan) sampah kopi kapal api, kopi mix, terus.., banyak kegunaannya itu. Bakal tas, dompet. (HR, Agustus 2012)

“Sebenarnya (program) dari masyarakat juga ada, seperti sampah kopi, plastik, dibuat tas, macam-macam lah” (SY, Agustus 2012)

“Memang ada yang manfaatin, sampah kering. Seperti sampah kantong, ada yang buat tas, buat topi.” (NJ, Agustus 2012)

Akan tetapi kegiatan ini tidak berjalan lama, sebagaimana diungkapkan HL dan MK :

Jadi sampah yang bekas kopi, minyak, bimoli yang saset itu, dikumpulkan. Memang waktu itu pernah dianjurkan juga, disosialisasi untuk dikumpulin, nanti dibawa ke Pulau Pramuka, tempat anu, buat tas-tas itu. Dibeli katanya ma. Cuma sekarang sudah ngga ada lagi. Dipanggil musim-musiman ma di Pulo. Pertamanya doang. Sebulan dua bulan dan seterusnya ma udah (tidak jalan lagi).” (HL, Agustus 2012)

“Kemarin-kemarin ada yang buat dompet, tapi ngga lama” (MK, Agustus 2012)

Hal ini karena belum ada pemasaran yang baik untuk hasil karya mereka sehingga penghasilannya pun tergantung pesanan, sebagaimana yang diungkapkan HR, SY dan AS :

“Tapi marketingnya ini, ngga ada. (HR, Agustus 2012)

“Lagian kalau barangnya (tas, dompet dll.) jadi, mau dibawa kemana? Siapa yang mau nampung ?” (SY, Agustus 2012)

“Kalau penghasilannya ma ngga tentu. soalnya kalau disini tu pak, rata-rata ada yang senang, dia pesan suruh kita buat. (Rp.) 100.000 sih ngga sampai sebulan” (AS, Agustus 2012)

Walaupun demikian, beberapa warga yang tergabung dalam kelompok perajin sampah (hanya 3 rumah tangga) tetap memanfaatkan sampah untuk kerajinan tangan, sebagaimana diungkapkan AS dan SB :

“Ya kalau semacam sampah kopi, kan bisa kita pisahkan buat bikin dompet. Trus sampah plastik juga kita gunakan. Kalau semacam sampah nasi atau bekas sayur-sayuran itu dibuang. Tidak

digunakan. Kalau sedotan juga bisa kita gunakan” (AS, Agustus 2012)

“Sekarang enggak ada lagi. Kalau saya ya tetap lakukan ini (membuat kerajinan tangan dari sampah)” (SB, Agustus 2012)

Mereka beranggapan bahwa ini menjadi tanggungjawab mereka terhadap lingkungan agar sampah tidak berkeliaran.

“Mungkin karena satu kita ada kemauan. Keduanya kita jangan sampai sampah berkeliaran, jadi kita gunakan supaya dibutuhkan, bisa digunakan untuk bikin dompet” (AS, Agustus 2012)

“Yang pertama ini tanggungjawab kita terhadap lingkungan. Yang kedua ya untuk masyarakat kita juga” (SB, Agustus 2012)

Gambar 4.8 menunjukkan hasil kerajinan tangan dari sampah plastik dalam bentuk tas dan dompet.



Gambar 4.8 : Hasil kerajinan tangan dari sampah plastik

Sumber : Dokumen pribadi

Ada beberapa warga yang memanfaatkan sampah plastik untuk dijual sebagaimana yang diungkapkan MK dan HL :

“Kalu yang manfaatin botol aqua ma banyak, pemulung lah.” (MK, Agustus 2012)

“Yang ngumpulin aqua bekas untuk dijual ma ada juga” (HL, Agustus 2012)

Gambar 4.9 menunjukkan sampah yang dimanfaatkan warga RW 01 dengan jalan dijual.



Gambar 4.9 : Sampah yang siap untuk dijual

Sumber : Dokumen pribadi

Gambar 4.10 menunjukkan lapak penjual sampah RW 01.



Gambar 4.10 : Lapak tempat penjualan sampah.

Sumber : Dokumen pribadi

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hanya 5 % masyarakat RW 01 Kelurahan Pulau Panggang pada Tahun 2012 yang memanfaatkan sampah.

4. Pemusnahan

Untuk memusnahkan sampah, warga RW 01 Kelurahan Pulau Panggang sebagian besar melakukannya dengan cara ditimbun begitu saja. Bagi mereka yang punya urukan dimana sampah dibuang disitu, kadang memusnahkan sampahnya dengan dibakar jika urukan mereka sudah penuh, agar menjadi tanah. Beberapa informan mengatakan :

“Ya itu nanti timbun di situ. Lama kelamaan ya ini , jadi tanah. Entar kan mereka bakar. Tiap hari kalau sampah penuh dibakar sama yang punya urukannya itu.” (HR, Agustus 2012)

“Dibiarkan aja begitu. Dibakar itu, ada juga, cuma jarang. Ditinggalin aja. Lempar teng. Maka di sini dipanggil RW terkumuh.” (HL, Agustus 2012)

“Kalau yang rajin dibakar, kalau yang engga ya udah sampai seumur hidup di situ. Kalau sampah plastik kan enggak bisa rusak. Sebagian besar dibakar sih.” (FD, Agustus 2012)

“Kadang-kadang kalau udah penuh dibakar, ya kadang-kadang lah. Cuma kebanyakan dibiarin aja. Ini kan nanti hancur sendiri.” (SY, Agustus 2012)

“Kalau kemarin masyarakat kita bakar. Setelah ada katanya larangan dibakar, ya dibuang aja begitu di pekarangan orang.” (MN, Agustus 2012)

“Kalau saya secara pribadi banyak dibakar. Tiap hari kalau saya ma. Tapi kalau masyarakat lebih banyak dibiarin aja begitu” (SH, Agustus 2012)

“Kalau enggak dibakar, ditimbun. Bayak sekali yang ditimbun.” (SB, Agustus 2012)

“Dibakar ya udah hilang sendiri. Kalau dibakar kan padat jadi tanah. Yang lainnya dibiarin aja gitu” (NP, Agustus 2012)

“Itu kalau udah penuh dibakar.” (NJ, Agustus 2012)

“Ya sampahnya hancur begitu, enggak diapa-apain. Maksud kita kan biar jadi tanah sampah itu. Lama-lama kita buang terus. Kalau memang banyak dibakar, nanti turun-turun.” (MK, Agustus 2012)

Dapat disimpulkan bahwa masyarakat RW 01 Kelurahan Pulau Panggang pada Tahun 2012 memusnahkan sampah rumah tangga mereka dengan 2 cara. Ditimbun begitu saja dan dibakar, namun sebagian besar ditimbun.

Beberapa faktor perilaku yang secara langsung mempengaruhi masalah sampah “Sebanyak 85 % sampah rumah tangga masyarakat RW 01 Kelurahan Pulau Panggang pada Tahun 2012 tidak berakhir di Lokasi Pembuangan Sampah (LPS), tetapi di sekitar pemukiman warga dan di laut.” Yaitu :

1. Sebanyak 75 % KK di RW 01 Kelurahan Pulau Panggang pada Tahun 2012 yang masih membuang sampah rumah tangga mereka ke urukan.
2. Sebanyak 5 % KK di RW 01 Kelurahan Pulau Panggang pada Tahun 2012 masih membuang sampah rumah tangga mereka ke laut.
3. Hanya 15 % KK di RW 01 Kelurahan Pulau Panggang pada Tahun 2012 membuang sampah rumah tangga mereka ke LPS.

4. Hanya 5 % KK di RW 01 Kelurahan Pulau Panggang pada Tahun 2012 yang memanfaatkan sampah.

4.2.1.2 Faktor Predisposisi

Walaupun sebagian besar warga RW 01 Kelurahan Pulau Panggang masih membuang sampah tidak pada tempatnya, sebagian besar mereka tahu bahwa sampah dapat menimbulkan penyakit. Hal ini diungkapkan oleh FD, SR dan MK :

“Sebenarnya mereka tau kalau bisa bau, seperti buang pempers anak-anak, tapi tetap aja buang di urukan. Mereka juga tau kalau sampah bisa menyebabkan penyakit, sering kita arahkan kalau sampah itu bisa menyebabkan penyakit malaria, termaksud ISPA, tapi enggak ngerti-ngerti juga. Tau tapi enggak ngerti” (FD, Agustus 2012)

“Kalau masyarakat sih udah tau kalau sampah bisa menyebabkan penyakit (SR, Agustus 2012)

“Sampah dibuang sembarangan kan dasarnya penyakit.” (MK, Agustus 2012)

Bahkan MK tahu kalau sampah tidak boleh dibuang ke laut:

Sampah kan enggak boleh buang ke laut, pencemaran ikan kan lain. (MK, Agustus 2012)

Motivasi yang melandasi perilaku masyarakat tidak membuang sampah mereka ke LPS adalah karena mereka menganggap bahwa yang harus melakukan itu adalah pemerintah (RT, RW, Kelurahan).

(Kalau harus buang ke LPS) yang harus didorong adalah program pemerintah, RT, RW itu. Kalau dia mau kerjain programnya. Kita ya tetap mendukung” (SB, Agustus 2012)

“Mungkin dia (masyarakat) berharap itu (sampah) menjadi tanggungjawab RT, RW, bukan tanggungjawab sendiri. Makanya buang-buang aja. Tapi sudah dikasi saran sih, tapi masyarakat tetap buang-buang aja” (SH, Agustus 2012)

“Sampah di sini ma tanggungjawab masing-masing (buangnya). Harusnya kan ada petugasnya (dari pemerintah)” (NJ, Agustus 2012)

Kalau sampah harusnya ada petugasnya dari pemerintah. (MK, Agustus 2012)

Tanggungjawab pemerintah itu dijalankan dengan menggaji petugas pengangkut sampah untuk mengangkut sampah warga ke LPS. Hal ini karena mereka menganggap pemerintah lah (terutama kelurahan) yang memiliki anggaran untuk hal tersebut. Bukan dari mereka dananya.

“Ya kalau dibebani masyarakat lagi untuk membayar petugas (sampah). Untuk apa diadakan pemerintahan ?” (MK, Agustus 2012)

“Anggapannya (masyarakat) untuk apa punya pemerintahan, punya kelurahan” (HL, Agustus 2012)

“Kalau dari sananya (Kelurahan) enggak ngasih, ya enggak mungkin. Kalau dari pemerintah ngasih, ya dilaksanain. Hanya di masyarakat doang. Paling sebulan 5 ribu pada ngasi, 10 ribu” (NJ, Agustus 2012)

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor predisposisi yang melandasi warga RW 01 Kelurahan Pulau Panggang tidak membuang sampah rumah tangga mereka ke LPS dan hanya dibuang di urukan atau laut adalah masyarakat memandang bahwa pemerintah (RT, RW terutama kelurahan) yang bertanggungjawab terhadap masalah sampah, terutama untuk membayar petugas sampah. Karena mereka menganggap pemerintah, terutama kelurahan mempunyai dana untuk hal itu.

4.2.1.3 Faktor Penguat

Faktor penguat yang mempengaruhi masyarakat tidak membuang sampah rumah tangga mereka ke LPS dan membuangnya sembarangan adalah karena belum ada kerjasama antara RT, RW, LMK dan Kelurahan untuk menggerakkan masyarakat agar mengatasi masalah sampah secara bersama-sama. Hal ini terlihat dari masing-masing pihak yang saling melempar tanggungjawab.

Ketua-ketua RT, HR, HL dan FD, menganggap bahwa ketua RW tidak peduli lagi dengan masalah sampah, sementara itu adalah tanggungjawab RW.

“RW sudah sama sekali enggak peduli. Malah kita (RT) yang dia bebaskan. Harusnya kan itu program RW bukan RT. Kalau program RT kan khusus di warga kita aja kan. Udah, urus aja RT dia kata. Buat apa ada pengurus RW. Jangan ke RT lagi. Sebab kalau kita sudah cukup membantu.” (HR, Agustus 2012)

“RW saya, RW 1 begitu mas, enggak peduli. Paling RT-RTnya yang kompak anuin sampah. Di sini dipanggilnya enggak maju-maju. Abis, bagaimana masyarakatnya mau peduli kalau RWnya enggak peduli. Susah mas di sini RWnya enggak peduli. Paling masing-masing RT yang peduli dengan warganya.” (HL, Agustus 2012)

“Jadi enggak peduli kalau di RW 1 tentang sampah. RWnya juga kurang peduli. Kalau di RT 3 sampai kemana pun saya yang ngurus. Saya sendiri aja.” (FD, Agustus 2012)

RW menganggap bahwa seharusnya sampah menjadi tanggungjawab pemerintah/kelurahan, tapi kelurahan tidak peduli akan hal itu.

“Orang tugasnya pemerintah, masyarakat hanya membantu pemerintah (kelurahan). Kalau sekarang koordinatnya, pemerintah, tidak bergerak ? Jadi sebenarnya dari pemerintahnya itu kurang peduli pak” (SY, Agustus 2012)

LMK (Lembaga Musyawarah Kelurahan) menganggap bahwa menggerakkan RT/RW untuk mengatasi masalah sampah adalah sesuatu yang mungkin dilakukan, akan tetapi kelurahan harus tetap bertanggungjawab karena RW 01 merupakan wilayahnya kelurahan.

“Sebenarnya memungkinkan kita mengumpulkan RT/RW (untuk bergerak mengatasi masalah sampah) dan mengenyampingkan kelurahan. Tapi kelurahan tetap harus peduli karena wilayah dia. (MN, Agustus 2012)

Kelurahan sendiri menganggap bahwa kelurahan hanya sebagai koordinator dan masalah sampah adalah tanggungjawab masyarakat dan RW karena itu berada di wilayah mereka, sehingga mereka harus peduli. Hal ini disampaikan oleh lurah HS.

“Maksud saya kalau sampah itu kan, karena ini kampung dia (masyarakat) sendiri, peduli lah dengan sampah itu kan. *Image* itu yang perlu dirubah.” (HS, Agustus 2012)

“Petugas sampah itu masih jalan, itu di kelola oleh masing-masing RW. Nanti RW bertanggungjawab ke kelurahan karena itu program RW. Kelurahan ini kan ada petugas kebersihannya (sendiri). Jadi kelurahan ini hanya sebagai koordinator.” (HS, Agustus 2012)

Saling melempar tanggungjawab ini disebabkan karena masing-masing pihak merasa keberatan dengan anggaran yang harus dikeluarkan jika ingin menggerakkan masyarakat mengatasi masalah sampah.

“Boleh kita menggerakkan masyarakat (tanpa pemerintah/kelurahan), tapi apakah RW harus ngorban (uang) ? Kan harus ada air minum, uang rokoknya. (SY, Agustus 2012)

“Masyarakat ngga mau (bekerjasama mengatasi masalah sampah). Maunya ada ininya (uang). Dikasi uang rokok, ya ngga maulah kalau cuma uang rokok” (FD, Agustus 2012)

“Ya kalau masyarakat ma oke aja kalau diajak Jum’at bersih, umpama kita kerja bakti, untuk ini, untuk sampah, ya semacam gotong royong lah, itu mereka mau aja. Yang penting mereka taunya ma ada minum, rokok, itu aja intinya kalau masyarakat” (HR, Agustus 2012)

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa faktor penguat yang mempengaruhi sebagian besar masyarakat belum membuang sampah rumah tangga mereka ke LPS adalah: 1) belum adanya kerjasama antara RT, RW, LMK dan kelurahan untuk menggerakkan masyarakat, 2) karena adanya saling melempar tanggungjawab terhadap masalah sampah antara RT, RW, LMK dan Kelurahan 3) dan hal ini disebabkan karena masing-masing pihak merasa keberatan dengan anggaran yang harus dikeluarkan jika ingin menggerakkan masyarakat mengatasi masalah sampah.

4.2.1.4 Faktor Modal Sosial

Faktor modal sosial yang mempengaruhi faktor predisposisi “pandangan masyarakat RW 01 Kelurahan Pulau Panggang bahwa masalah sampah adalah tanggungjawab pemerintah/kelurahan karena pemerintah/kelurahan lah yang mempunyai anggaran untuk hal itu” dan faktor penguat “1) belum adanya kerjasama antara RT, RW, LMK dan kelurahan untuk menggerakkan masyarakat, 2) karena adanya saling melempar tanggungjawab terhadap masalah sampah antara RT, RW, LMK dan Kelurahan 3) dan hal ini disebabkan karena masing-masing pihak merasa keberatan dengan anggaran yang harus dikeluarkan jika ingin menggerakkan masyarakat mengatasi masalah sampah.” adalah karena berkembang sebuah norma di masyarakat RW 01 Kelurahan Pulau Panggang

bahwa dalam setiap acara/kegiatan/program pasti ada uangnya dan mereka mesti dapat jika mereka dilibatkan baik dalam bentuk uang tunai atau dikonversi dalam bentuk lain. Beberapa warga mengatakan :

“Jadi setiap ada acara (masyarakat menganggap) ada duitnya. Ilmunya tidak pernah diserap. Jadi tujuannya dapat amplop” (SB, Agustus 2012)

“Biasanya ada uang. Kalau ngga dikasi ada juga yang ngomong, ngga dikasih ta.” (NP, Agustus 2012)

“Ada juga yang keberatan sih (untuk kerja bakti). Kebanyakan nganggap suka ada dana dari sana gitu : dari kelurahan, dari kabupaten. Kalau kita bersihkan itu ngga ada minuman-minumannya kan ? Masa kita mau minum langsung ke rumah kita sendiri. Mana minumannya ? Aqua. Ngga mungkin dari kantong mereka. Harusnya kan disediakan begitu. Ya cemilan.” (MK, Agustus 2012)

Soalnya orang sekarang sudah pintar mas. Dia bekerja itu harus ada uangnya, walau pun kerja bakti (SY, Agustus 2012)

Ini juga diungkapkan oleh mereka yang sering melibatkan masyarakat dalam kegiatan mereka, sebagaimana dikemukakan oleh SR dan HS.

“Soalnya kebiasaan masyarakat sini kalau kita undang harus ada transport. Misalnya penyuluhan demam berdarah, kita undang. Trus kita sangkutin ke masalah sampah” (SR, Agustus 2012)

“Masyarakat itu banyak membebankan kepada kelurahan. Tidak keluar dari dirinya sendiri. Apalagi kalau ngga ada duitnya.” (HS, Agustus 2012)

Bahkan menurut informan SY, jangankan masyarakat, RT/RW juga tidak mau kerja jika tidak ada uangnya.

“Kadang-kadang kalau ngga ada duitnya, walau RT, RW juga ngga mau kerja, ngapain.” (SY, Agustus 2012)

4.2.2 Faktor Non Manusia

Beberapa faktor non manusia yang turut mempengaruhi masalah “Sebanyak 85 % sampah rumah tangga masyarakat RW 01 Kelurahan Pulau Panggang pada Tahun 2012 tidak berakhir di Lokasi Pembuangan Sampah

(LPS), tetapi di sekitar pemukiman warga dan di laut.” Yaitu : faktor finansial, faktor teknologi, faktor lingkungan dan faktor fisik.

4.2.2.1 Faktor Finansial

Faktor finansial yang mempengaruhi masalah sampah di RW 01 Kelurahan Pulau Panggang adalah tidak adanya lagi anggaran yang diberikan oleh kelurahan sebesar Rp. 150.000 perbulan kepada RW untuk menambah dana yang dikumpulkan RT/RW buat gaji petugas pengangkut sampah. Kondisi ini berdampak langsung terhadap terhentinya kegiatan petugas sampah untuk mengangkut sampah warga ke LPS. Hal ini diungkapkan oleh ketua RT, RW dan LMK.

“Sampai sekarang sudah ngga jalan, tersendat dana anggaran dari kelurahan itu, yang sebulan itu pego (Rp. 150.000). Itu juga tiap 3 bulan sekali di potong uang pembinaannya/operasionalnya (RT, RW) untuk mereka itu, yang ngangkut sampah, tadinya awalnya, tapi sekarang sudah ngga peduli. (HR, Agustus 2012)

“Sebenarnya dulu ada petugas sampahnya. Kendalanya itu, dari pihak kelurahan, pemerintahan. Dulu ma ngasi subsidi ke kita itu setiap bulan 150 ribu, sekaranag stop. Abis orang yang kerja ngangkut sampah itu mau makan apa?” (SY, Agustus 2012)

“Dulu waktu saya masih jadi RW, petugas sampahnya jalan. Ngga tau kenapa sekarang tidak ada lagi. Alasannya dana dari kelurahan sudah tidak turun” (MN, Agustus 2012)

Bekas petugas sampah RW 01 juga mengungkapkan hal ini :

“Semenjak setahun yang lalu sudah tidak ngangkut sampah lagi,. Gajinya ngga jelas. Kalau masyarakat sebulan itu ngasi, ya syukur. Kalau ngga ?. Paling kita usaha lain. Dari kelurahan juga ngga ngasih. Dananya sih ada, kemungkinan ngga nyampe.” (HU, Agustus 2012)

Akan tetapi pihak kelurahan mengatakan bahwa mereka setiap bulan masih memberikan anggaran tersebut, sebagaimana informan HS mengungkapkan:

“Untuk pembiayaan, pembiayaan itu, dari RW itu ada menyisikan perorang itu, lupa saya berapa itu. Ada itu. Tapi dari kelurahan juga. Dari Kelurahan (Rp.) 150.000 tambah dari swadaya

masyarakat. Dari RT (Rp.) 25.000/bulan. Itu masih jalan.” (HS, Agustus 2012)

Sementara salah satu petugas kelurahan yang membidangi masalah ini menganggap bahwa tidak berjalannya petugas sampah karena RW yang tidak bergerak dan anggaran yang dikelola oleh lurah sendiri :

“Karena disini tidak ada gerakanya. Petugas RW melempem, ya kepala seksinya juga tidak dipercaya memegang anggaran, dikelola oleh lurah (sendiri), ya itu dia akhirnya begitu” (AM, Agustus 2012)

Tidak berjalannya petugas sampah ini juga diungkapkan oleh masyarakat RW 01, sebagaimana penuturan mereka :

“Waktu bulan-bulan yang lalu ma ada (petugas sampah), tapi sekarang sudah ngga ada. Ngga tau kenapa” (SH, Agustus 2012)

“Kalau dulu ada petugasnya, tapi sekarang ngga jalan.” (SB, Agustus 2012)

“Kalau di Pulo Pramuka ma ada yang ngurusin, kalau di sini ma ngga ada. Tinggal dibayar aja perbulannya berapa” (NP, Agustus 2012)

“Kalau memang ada petugas yang ngumpulin pada mau. Cuma ngga ada. Biasanya kan ada yang ngambil setiap hari. Ngga ada sekarang ma. Ngga ada uang operasionalnya kali. Hanya masyarakat doang yang ngasih. (NJ, Agustus 2012)

Ngga ada petugasnya sih. Petugas yang bawaain dari rumah, pakai gerobak gitu. Harusnya kan gitu. Harusnya ada petugasnya. Kalau saya lihat di seberang sih ada. Seperti Puaa Harapan, Pulau Kelapa itu.” (MK, Agustus 2012)

“Kalau kemarin-kemarin ma ada yang ngangkutin, tapi sekarang tidak lagi.” (AS, Agustus 2012)

Hanya tiga RW yang berjalan, RW 02 04 dan 05 masih berjalan (pengangkutan sampahnya), itu dari RW sendiri yang bayar. Yang duanya lagi (RW 01, dan 03 (pengangkutan sampahnya sudah tidak berjalan.” (AM, Agustus 2012)

Sementara masyarakat RW 01 kelurahan Pulau Panggang sendiri keberatan untuk mengeluarkan iuran restribusi untuk sampah kecuali bagi mereka yang mempunyai warung :

“Kalau uangnya dari masyarakat, keberatan. Dari kita aja pemimpin. Kalau mau ada kerja bakti, kita upayakan mereka. Dia kan perlu ngerokok, perlu minum, ya harus kita ada pengeluaran” (HR, Agustus 2012)

“Kalau disini berat mas. Masyarakatnya enggak perduli. Orang saya pernah RT jalan, terjun untuk minta kewarung-warung. Kalau ada yang ngasih ma ngasih, kalau yang ngerti ma. Kalau yang enggak ngerti ma sama aja begitu” (HL, Agustus 2012)

“Tapi waktu saya menjadi RW, saya tidak bebankan masyarakat. Sebulan berapa gitu untuk kebersihan. Karena masyarakat, jangankan untuk sampah, untuk RK (Rukun Kematian) yang sebulan Rp. 1000 tidak berjalan. Padahal kan untuk kita semua. Apalagi untuk sampah.” (MN, Agustus 2012)

“Kalau masyarakat yang bayar (petugas sampah) enggak mau. Mendingan buang sembarangan, ia. (MK, Agustus 2012)

“Sejak 2009 RT/RW sudah tidak lagi menarik iuran kepada warganya untuk biaya mengangkut sampah.” (AM, Agustus 2012)

“Kalau masyarakat diajak untuk iuran (sampah) enggak mau mereka. Paling yang punya warung. Soalnya masyarakat sampahnya enggak pernah diangkat, hanya yang punya warung aja. Sampahnya banyak. Kalau masyarakat setiap hari buang sendiri sampahnya, petugasnya enggak pernah angkat. Mungkin yang punya warung ngasih uang *tip* untuk yang angkatnya itu. Kalau masyarakat ma enggak.” (SH, Agustus 2012)

Jika dilihat dari segi pendapatan, sebagian besar masyarakat RW 01 Kelurahan Pulau Panggang adalah nelayan dengan pendapatan yang tidak menentu (tergantung pada cuaca laut). Kondisi ini menjadi berat bagi mereka untuk berpartisipasi membayar iuran restribusi sampah.

“Dari swadaya masyarakat enggak ada. Ya penghasilan masyarakat paling berapa. Paling beberapa orang aja. Sedangkan petugas sampahnya itu enggak sendiri, berdua.” (SY, Agustus 2012)

Kalau nelayan enggak bisa gitu jalannya (membayar iuran sampah). Pendapatan kita juga sehari kadang-kadang dapat, kadang-kadang engga. Kalau alamnya lagi bagus kadang (Rp.) 150

(ribu) penghasilannya(per hari). Kalau sekarang lagi banyak (ikan) tongkol, kalau kemarin-kemarin sedikit ngelu lah. Jadi pasarnya paceklik” (MK, Agustus 2012)

“Kalau penghasilan di sini kebanyakan nelayan. Engga tentu mas. Tergantung alamnya di sini ma. Walaupun alamnya teduh kalau ikannya enggak makan, kadang-kadang kosong. Kadang-kadang 20 ribu sehari, kadang-kadang kosong, 20 ribu ke atas. Kalau alamnya lagi musim angin mas, kadang-kadang dua bulan, kemarin enam bulan mas nelayannya enggak bisa pergi (melaut). Yang pergi itu kecuali udah nekat. Abis kalau dirumahnya enggak ada apa-apa.” (HL, Agustus 2012)

“Rata-rata pendapatan 2 juta lah sebulan. Kalau sehari kadang-kadang 30 ribu, 200 ribu, 50, enggak nentu. Ya rata-ratanya dua juta lah” ” (FD, Agustus 2012)

“Kalau pendapatan nelayan enggak tentu sih. Tergantung cuaca : kalau lagi dapat ya dapat, kalau lagi enggak, ya engga sama sekali” (SH, Agustus 2012)

“Jadi kalau nelayan berbeda dengan petani. Kalau nelayan, hari dapat, hari habis. Besok cari lagi” (SB, Agustus 2012)

“Kalau pendapatan enggak tentu mas. Ada yang 50 ribu sehari. Kadang-kadang kalau lagi berurus suka enggak dapat. Kalau ikannya banyak ya banyak, pendapatannya gede.” (NP, Agustus 2012)

“Kalau nelayan pendapatannya sehari bisa 30, 50 sehari, paling kecil ya 20.” (NJ, Agustus 2012)

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor finansial yang ikut mempengaruhi masalah sampah di RW Pulau Panggang adalah tidak diberikannya lagi anggaran dari kelurahan untuk gaji petugas sampah membuat petugas sampah tidak mengangkut sampah warga ke LPS lagi. Sementara masyarakat keberatan untuk membayar iuran untuk sampah, kecuali mereka yang memiliki warung. Hal ini karena penghasilan masyarakat, yang sebagian besar nelayan, tidak menentu.

4.2.2.2 Faktor Teknologi

Terkait dengan faktor teknologi yang mempengaruhi masalah “Sebanyak 85 % sampah rumah tangga masyarakat RW 01 Kelurahan Pulau Panggang pada Tahun 2012 tidak berakhir di Lokasi Pembuangan Sampah (LPS), tetapi di sekitar

pemukiman warga dan di laut.” Adalah tidak termanfaatkannya mesin pembakar sampah/*incinerator* yang ada di Pulau Panggang baik yang sebelumnya ditempatkan di LPS RW 01, kini sudah tidak ada lagi, dan yang kini ada di LPS RW 03. Beberapa informan mengungkapkan hal ini :

“Di sini ada diadakan mesin pencacah, cuma mesinnya enggak digunain. Kemarin ada di RW 1. Enggak tau dari dana apa itu. Cuma sekarang sudah ditarik kembali, karena dewannya sudah ganti. ke RW 2 atau RW 3 gitu.” (HL, Agustus 2012)

“Kalau waktu itu ada alat penghancurnya, tapi sekarang enggak ada. Itu tempatnya. (MK, Agustus 2012)

Tahun kemarin (2011) kita dapat mesin pembakar sampah, sekarang ada di RW 03. Tapi sampai sekarang belum jalan” (AM, Agustus 2012)

“*Incinerator* di sini di Pulau Panggang ada satu, di Pulau Pramuka juga ada satu. Jadi ada 2 *incinerator*.” (HS, Agustus 2012)

Gambar 4.11 menunjukkan tempat bekas mesin pembakar sampah yang dulu pernah di LPS RW 01 dan mesin pembakar sampah yang kini ada di LPS RW 03.



Gambar 4.11 : Bekas tempat mesin pembakar sampah/*incinerator* di LPS RW 01 (kiri) dan mesin pembakar sampah/*incinerator* di LPS RW 03 (kanan)
Sumber : Dokumen pribadi

4.2.2.3 Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan turut mempengaruhi masalah “Sebanyak 85 % sampah rumah tangga masyarakat RW 01 Kelurahan Pulau Panggang pada Tahun 2012 tidak berakhir di Lokasi Pembuangan Sampah (LPS), tetapi di sekitar pemukiman warga dan di laut.” adalah masyarakat mereklamasi (menguruk) pantai dengan

batu karang dan sampah untuk lahan tempat tinggal mereka. Beberapa informan mengatakan hal ini :

“Di sini kan butuh lahan (untuk tempat tinggal), keterbatasan lahan.” (SB, Agustus 2012)

“Di urukan. Jadi bikin rumah di samping laut. Biasanya gitu. Dikumpulin dulu. Ke laut jarang juga. Kebanyakan (buang sampahnya) ke urukan untuk bikin rumah di pinggir pantai” (NP, Agustus 2012)

“Untung ada yang butuh tempat tinggal, itu yang membantu penyelamatan sampah, kalau abang lihat di situ sampah dibuang di urukan” (AM, Agustus 2012)

Hal ini menyebabkan luas wilayah Pulau Panggang pada umumnya dan RW 01 pada khususnya terus bertambah.

“Waktu itu luasnya 9 ha. Tapi sudah nambah karena reklamasi, 9 ha. lebih. (HR, Agustus 2012)

Selain karena kebutuhan lahan untuk tempat tinggal yang tinggi, keinginan masyarakat RW 01 untuk tinggal berdekatan dengan keluarga juga membuat mereka tidak ingin pindah ke wilayah lain dan terpaksa menguruk pantai di RW 01. Beberapa informan mengatakan :

“Masyarakat tidak mau pindah, karena dia pikir dekat sama orang tua, walau pun lahannya sudah kurang” (HR, Agustus 2012)

“Saya sering nanya kenapa enggak pindah aja. Disini kan udah enggak ada tanah. Alasannya enggak betah, jauh dari orang tua” (FD, Agustus 2012)

“Istilah orang Pulo ma, makan enggak makan ya harus kumpul. Lagian kalau mau ke luar harus ada duit (untuk) beli tanahnya. Jadi di sini kan dia nguruk” (SY, 2012)

“Ada masyarakat kita, jangan ke Jakarta, antara dari Pulo Panggang ke Pulo Pramuka aja enggak mau. Karena dari dulunya ada istilah ‘makan enggak makan ngumpul’. Makanya walaupun diuruk yang penting di Pulo panggang” (MN, Agustus 2012)

Faktor lain adalah mahalnya lahan tempat tinggal jika mereka harus beli dibandingkan dengan mereka menguruk. Beberapa informan mengatakan :

“Sebabnya untuk kebutuhan masyarakat, buat rumah, tempat berlindung. Kalau cara beli kan mahal. Kalau seperti ini kan batu karang dia ambil sendiri, nanti dia timbun (dengan sampah).” (SY, Agustus 2012)

“Mungkin kendala ekonomi. Kalau pindah kan butuh dana lagi. Di pramuka sekarang sudah puluhan juta, beli tanah untuk rumah. Kalau ngurukan masyarakat, sedikit-sedikit.” (SH, Agustus 2012)

“Kalau di pramuka sudah punya orang semua. 1 kapling bisa 100 juta. Paling murahnya itu 70-80 juta.” (MK, Agustus 2012)

Gambar 4.12 menunjukkan reklamasi pantai yang dilakukan warga RW 01 untuk lahan tempat tinggal dengan batu karang dan sampah.



Gambar 4.12 : Reklamasi pantai untuk kebutuhan lahan tinggal dengan karang dan sampah

Sumber : Dokumen pribadi

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor lingkungan yang mempengaruhi masalah sampah ialah banyak masyarakat RW 01 yang mereklamasi (menguruk) pantai dengan batu dan sampah untuk tempat tinggal mereka, membuat luas wilayah Pulau Panggang secara umum terus bertambah. Kondisi ini karena masyarakat lebih senang tinggal berdekatan dengan keluarga mereka dan ditambah harga tanah untuk rumah yang menurut mereka mahal dibanding mereka nguruk pantai. Ini menyebabkan masyarakat sebagian besar membuang sampah mereka ke urukan sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya pada pembahasan faktor perilaku.

4.2.2.4 Faktor Fisik

Faktor fisik yang mempengaruhi masalah sampah “Sebanyak 85 % sampah rumah tangga masyarakat RW 01 Kelurahan Pulau Panggang pada Tahun

2012 tidak berakhir di Lokasi Pembuangan Sampah (LPS), tetapi di sekitar pemukiman warga dan di laut.” ialah karena akses Lokasi Pembuangan Sampah (LPS) jauh dari rumah warga, sehingga mereka membuang sampah ke lokasi yang lebih dekat dengan rumah mereka, walaupun RT/RW sudah menyuruh untuk buang sampah ke LPS.

“Alasannya (tidak buang ke LPS) jauh lah, panas lah, banyak alasannya. Buangnya juga di sini nyolong-nyolong, magrib, subuh,sembunyi-sembunyi..” (FD, Agustus 2012)

“Mungkin jauh. Lebih dekat buang ke urukan” (SH, Agustus 2012)

“Semua petugas juga, LMK juga suru buang ke LPS. Cuma masyarakatnya lebih dekat aja (buangnya)” (SH, Agustus 2012)

Kalau di sana (LPS) ma jauh.” (NJ, Agustus 2012)

“Soalnya disana (LPS) kan jauh. Habis dia mau buang ke mana ?” (NP, Agustus 2012)

“Kalau saya buangnya kemari (LPS). Soalnya tempat (LPS) dan rumah kan berdekatan, kalau yang lain kan jauh. Kebanyakan tu yang di seberang sana tu ya, taru lah jaraknya 25-50 meter, kebanyakan buangnya enggak kemari (LPS), (tapi) di lokasi yang cepat, dekat aja gitu. Contohnya itu kan kosong (urukan), di situ dibuang. (MK, Agustus 2012)

“Kalau RT, RW bentur terus. Bu! sudah ada tempatnya kalau bisa buang lah di tempatnya. Cuma namanya warga kan enggak begitu. Yang satu ngarti, yang lain ? Agak jauh lah, gitu alasannya” (MK, Agustus 2012)

“Ya jadi itu, malas buang ke sana (LPS). Jauh” (AS, Agustus 2012)

4.2.3 Faktor Regulasi, Kebijakan dan Program Terkait

Faktor ini merupakan faktor yang mempengaruhi faktor modal manusia dan sosial, serta faktor non manusia. Diantara faktor ini yaitu : 1. Faktor Program dan Kegiatan, 2. Faktor Regulasi dan Kebijakan

4.2.3.1 Faktor Program dan Kegiatan

Terkait dengan program atau kegiatan yang berhubungan dengan sampah sudah banyak dilakukan baik oleh pemerintah setempat atau swasta. Sebagian

besar kegiatan yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi tentang sampah. Beberapa masyarakat menyebutkan :

“Ada juga sosialisasi tentang sampah, dari kelurahan, instansi-instansi, puskesmas” (SH, Agustus 2012)

“Sebenarnya itu sering disosialisasikan oleh dinas kesehatan. Tapi sosialisasinya itu tidak dibarengi dengan kegiatan yang sesungguhnya. Kalau memang mau, praktekin biar mereka tau. Jangan cuma di ruangan di kasi tau.” (SB, Agustus 2012)

“Ada sosialisasi ma. Dari anak kuliahan, dari kelurahan, dari kabupaten. Itu sosialisasi tentang sampah” (NP, Agustus 2012)

“Kalau program sosialisasi ada juga sih. Cuma enggak setiap bulan. Dari bagian posyandu, puskesmas.” (NJ, Agustus 2012)

Salah satu petugas puskesmas juga mengungkapkan hal serupa :

“Kita sih sering sosialisasi, penyuluhan, cuma karena di sini terbentur lahannya enggak ada, jadi orang juga bingung mau buang ke mana. Kemarin juga kita kunjungan dengan dinas kesehatan bagian malaria, sekalian sosialisasi tentang penyakit diare” (SR, Agustus 2012)

“Kalau kita penyuluhannya rutin, karena kita jumantik. Seminggu sekali untuk jumantik. Kita sebulan 2 kali turun ke lapangan, karena kita melihat sampah ya kita spontan kasi penyuluhan. Kita juga punya jadwal, tapi terbentur anggaran untuk ngundang. Tapi kalau untuk kita bicara langsung, itu sering kita. Jadi kalau kita lihat sampah sembarangan kita kasi penyuluhan. Penyuluhan itu kan kita enggak harus ngumpul orang banyak. (SR, Agustus, 2012)

Kegiatan dalam bentuk pelatihan kadang diikuti oleh masyarakat, sebagaimana AS mengungkapkan :

“Kadang-kadang ada pelatihan (cara membuat kerajinan tangan dari sampah) dari Jakarta, dari negara luar. (AS, Agustus 2012)

Program yang melibatkan masyarakat secara langsung untuk membersihkan sampah juga pernah ada tapi sekarang tidak berjalan lagi, sebagaimana beberapa informan mengatakan :

“Tahun 2011 tuh sering ada kerja bakti. Tapi ini saya perhatin belum ada lagi. Biasanya RT, RW ngundang.” (MK, Agustus 2012)

“Jarang ada program (kerja bakti di sini) kalau dari atasan enggak anuin, enggak bakalan ada. Biasanya setiap Jum’at. Sekarang ma enggak ada.” (NJ, Agustus 2012)

“Program kita untuk mengatasi masalah sampah itu ada Jum’at bersih. Khusus di Pulau Paramuka ada laut bersih. UPT itu hanya menempatkan PHL mereka di sini.” (HS, Agustus 2012)

Sayangnya, program dan kegiatan yang dilakukan untuk masyarakat tersebut membiasakan memberikan uang kepada masyarakat, sebagaimana diungkapkan oleh SB dan MK:

“Kalau setiap kegiatan ya pasti ada duitnya. (MK, Agustus 2012)

“Pemerintah sendiri, selalu mengajarkan masyarakatnya bodoh. Kenapa ? Karena setiap kali ada acara, sosialisasi, pemerintah selalu memberikan uang, uang dan uang.” (SB, Agustus 2012)

Kondisi ini ditambah lagi dengan program-program yang berhubungan dengan sampah yang hanya sebatas proyek atau tidak melihat manfaat jangka panjang yang bisa didapatkan masyarakat. Kondisi ini tergambar dari program pengadaan alat pembakar sampah di Pulau Panggang selama dua kali yang keduanya tidak termanfaatkan dan hanya menjadi pajangan sebagai penanda adanya kepedulian pihak pemberi program akan masalah sampah di Pulau Panggang. Hal ini telah dijelaskan pada modal teknologi di atas. Informan MN dan SB juga mengungkapkan keresahan mereka akan hal ini :

Jadi hanya sebatas proyek aja. Dimanfaatkan atau tidak, ngga jadi masalah” (MN, Agustus 2012)

“saya sering bilang agar Pulo Seribu jangan jadi objek proyek. Saya ngga mau masyarakat disini jadi wayang. Mau saya masyarakat diajak, diberitahu. Jangan hanya mengejar proyek aja” (SB, Agustus 2012)

Dari uraian di atas, terdapat beberapa faktor program yang mempengaruhi faktor manusia dan sosial, serta faktor non manusia, yaitu :

1. Seringnya program-program atau kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat RW 01 Kelurahan Pulau Panggang membiasakan memberikan uang atau amplop ke masyarakat.

Hal ini berdampak pada berkembangnya faktor modal sosial di masyarakat sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya.

2. Masih adanya program tentang sampah yang berorientasi proyek sehingga berdampak pada modal teknologi yang tidak termanfaatkan.
3. Belum adanya program pengelolaan sampah secara menyeluruh dan terpadu. Masing-masing pihak melakukan program mereka sendiri-sendiri : yang satu melakukan sosialisasi yang lain melakukan pelatihan dan yang lainnya lagi kerja bakti bersama. Satu dan yang lainnya tidak terkoordinasi untuk mencapai tujuan bersama (mengatasi masalah sampah).

4.2.3.2 Faktor Regulasi dan Kebijakan

Faktor regulasi dan kebijakan yang turut mempengaruhi masalah sampah adalah sistem demokrasi kita yang sudah sampai pada tingkat yang paling bawah (RT/RW) tidak bisa dikontrol dengan baik sehingga menimbulkan praktek politik uang di setiap pemilihan langsung. Kondisi ini tergambar jelas dari penuturan warga RW 01 Kel. Pulau Panggang dimana mereka menjatuhkan pilihan mereka kepada kandidat RT/RW yang memberikan mereka uang. MK dan AM mengemukakan kondisi ini :

“Pemilihan RT, RW juga ada duitnya. Soalnya suara yang diambil. Suara satu aja bisa menentukan masa depan. Nah! Pemilihan RT, RW itu, apalagi pemilihan pejabat tinggi. Waktu itu saya ya, saya buka terus terang aja pak. Ada (si A) yang datang ke saya waktu pemilihan RW, dia bilang kalau bisa pilih RW yang ini aja ya. 3 keluarga dikasi (Rp.) 100 (ribu). Kalau uang entar dulu saya bilang, soalnya saya belum pasti (pilihannya). Terus besoknya itu mau pemilihan, malamnya (si B) datang ngasi pegu (Rp. 150.000) untuk 3 keluarga. Akhirnya kita ambil (tawaran si B) satu orang gocap (Rp. 50.000). Kita kan bisa hitung. (Pemilihan) RT tidak punya uang, (dikasih) mi. Uang (Rp.) 10.000 mi 5. Yang penting pilih suara dia. Berkorban dulu. Semua begitu.” (MK, Agustus 2012)

“Apalagi saat pemilihan RT/RW. Siapa yang punya duit ya bisa jadi RT/RW. Calon ketua RT/RW harus mengeluarkan dana untuk masyarakat agar dia terpilih.” (AM, Agustus 2012)

Hal ini tergambar pada pemilihan tingkat kecil RT dan RW. Bagaimana dengan pemilihan di tingkat Calon Legislatif dan Gubernur ?. Yang pasti masyarakat RW 01 Kelurahan Pulau Panggang telah diajarkan untuk bertindak berdasarkan berapa jumlah uang yang diperoleh. Kondisi ini jelas memupuk faktor modal sosial di masyarakat RW 01 Kelurahan Pulau Panggang untuk terus berkembang.

Selain itu adanya kebijakan untuk menghapus Suku Dinas (Sudin) Kebersihan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu turut mempengaruhi masalah sampah di Pulau Panggang. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh informan HS :

“Dulu ada Sudin Kebersihan. Entah bagaimana Sudin Kebersihan itu sudah enggak ada lagi.” (HS, Agustus 2012)

4.3 Aset Komunitas

4.3.1 Modal Fisik

Modal fisik yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah sampah di RW 01 Kel. Pulau Panggang adalah tersedianya LPS (Lokasi Pembuangan Sampah) di RW 01 yang bisa dimanfaatkan untuk pembuangan sampah warga. Informan AM mengemukakan hal ini :

“Di Pulau Panggang juga punya dua LPS, di RW 01 dan RW 03. Di RW 02 sudah penuh, tidak ada lagi lokasinya. Kita juga punya gerobak sampah, satu masing-masing RW.” (AM, Agustus 2012)

Gambar 4.13 menunjukkan LPS yang ada di RW 01



Gambar 4.13 : Lokasi Pembuangan Sampah (LPS) RW 01

Sumber : Dokumen pribadi

Modal fisik lain yang bisa dimanfaatkan untuk mengatasi masalah sampah di RW 01 adalah adanya kantor sekretariat RW 01 yang bisa dimanfaatkan untuk pertemuan warga, sebagaimana terlihat pada gambar 4.14 berikut:



Gambar 4.14 : Kantor Sekretariat RW 01 Kelurahan Pulau Panggang

Sumber : Dokumen pribadi

4.3.2 Modal Teknologi

Salah satu modal teknologi yang dimiliki warga RW 01 adalah gerobak pengangkut sampah yang diberikan oleh kelurahan, sebagaimana terlihat pada gambar 4.15 berikut:



Gambar 4.15 : Gerobak Pengangkut Sampah RW 01

Sumber : Dokumen pribadi

4.3.3 Modal Manusia

Terkait dengan modal manusia yang bisa dimanfaatkan untuk mengatasi masalah sampah di RW 01 Kel. Pulau Panggang adalah adanya beberapa ibu rumah tangga mempunyai keahlian dan masih aktif untuk membuat kerajinan tangan dari sampah.

Mereka sebagian bisa (buat kerajinan tangan), orang Pulau Panggang. Dari pada dia nganggur dia bilang begitu, maka dia buat tas lah.” (HR, Agustus 2012)

“Kalau di RW 01 ada Ibu Sumiyati, Aang dan saya yang masih buat ini (kerajinan tangan dari sampah). Yang lain bisa juga, tapi sudah enggak ada lagi” (AS, Agustus 2012)

Gambar 4.16 menunjukkan aktifitas para ibu rumah tangga RW 01 yang sedang mendaur ulang sampah.



Gambar 4.16 : Aktifitas daur ulang sampah oleh beberapa ibu Rumah Tangga RW 01 Kel. Pulau Panggang

Sumber : Dokumen pribadi

Selain itu, modal manusia lain adalah adanya bekas petugas pengangkut sampah yang siap untuk bekerja lagi jika gaji lancar, sebagaimana HU mengungkapkan :

“Kalau iurannya lancar, selagi kita ada umur ya kita kerjain” (HU, Agustus 2012)

4.3.4 Modal Sosial

Modal sosial yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah sampah di Pulau Panggang adalah adanya hubungan yang dekat antar warga RW 01 dengan beberapa lembaga. Hal ini tergambar dari *assessment* yang dilakukan peneliti kepada masyarakat RW 01 Kel. Pulau Panggang dengan teknik wawancara dan diskusi kelompok serta menggunakan *tool* diagram venn. Adanya hubungan yang dekat ini terlihat pada gambar 4.17 berikut :



Gambar 4.17 : Partisipasi warga RW 01 Kel. P. Panggang dalam membuat diagram Venn

Sumber : Dokumen pribadi

Beberapa informan juga menyampaikan tentang hubungan yang mereka miliki dengan beberapa lembaga yang dapat membantu masalah sampah mereka, sebagaimana SH, SB dan AS menyampaikan:

“Paling yang sering membantu masyarakat dari CNOOC. LMK juga, ya kelurahan juga bantu” (SH, Agustus 2012)

“Kalau CNOOC punya program, punya dana untuk membantu masyarakat. Makanya harus kita kejar biar jatuh ke kita. Sekarang kan engga. SINOX itu pingin masyarakat langsung menghadap. Kita pernah ngajui untuk mesin jahit, dapat.” (SB, Agustus 2012)

Saya juga punya kelompok di Samo-samo, jadi setiap minggunya saya ke sana (Pramuka), saya praktek” (AS, Agustus 2012)

Dari gambaran di atas, hubungan atau jaringan yang warga RW 01 miliki dengan beberapa lembaga yang dapat membantu masalah sampah mereka bisa dikategorikan sebagai berikut :

1. Jaringan dengan Perusahaan Minyak CNOOC, melalui CSR (*Cooperation Social Responsibility*), yang sering memberikan bantuan kepada warga RW 01, dan Jaringan dengan Kelurahan Pulau Panggang yang beberapa waktu yang lalu rutin memberikan dana untuk operasional petugas pengangkut sampah di RW 01.
2. Jaringan dengan Rumah Sakit Atma Jaya dan Puskesmas Kelurahan Pulau Panggang yang sering memberikan sosialisasi tentang masalah sampah di RW 01.

3. Jaringan dengan Samo-Samo dan PKK Kelurahan Pulau Panggang yang sering membuat pelatihan kerajinan tangan dari sampah dan memasarkan.

Berikut adalah rangkuman dari penjelasan temuan lapangan di atas:

Tabel 4.1 : Rangkuman Temuan Lapangan

Masalah :		
"Sebanyak 85 % sampah rumah tangga masyarakat RW 01 Kelurahan Pulau Panggang pada Tahun 2012 tidak berakhir di Lokasi Pembuangan Sampah (LPS), tetapi di sekitar pemukiman warga dan di laut." dengan asumsi bahwa 1 Kepala Keluarga (KK) di RW 01 setiap hari menghasilkan sampah sebanyak 1 ember atau 1 jerigen (Bab 2, h. 59).		
No	Dimensi yang mempengaruhi	Aset Komunitas
A. Faktor Manusia dan Sosial		
1	Perilaku : 1) Sebanyak 75 % KK di RW 01 Kelurahan Pulau Panggang pada Tahun 2012 yang masih membuang sampah rumah tangga mereka ke urukan, 2) Sebanyak 5 % KK di RW 01 Kelurahan Pulau Panggang pada Tahun 2012 masih membuang sampah rumah tangga mereka ke laut, 3) Hanya 15 % KK di RW 01 Kelurahan Pulau Panggang pada Tahun 2012 membuang sampah rumah tangga mereka ke LPS, 4) Hanya 5 % KK di RW 01 Kelurahan Pulau Panggang pada Tahun 2012 yang memanfaatkan sampah. (Bab 2, h. 69-70).	Modal Fisik 1. Tersedianya LPS di RW 01 yang bisa dimanfaatkan untuk pembuangan sampah warga. 2. Adanya kantor sekretariat RW 01 yang bisa dimanfaatkan untuk pertemuan warga (Bab 2, h. 86-87).
2	Predisposisi : Pada tahun 2012 Masyarakat memandang bahwa pemerintah (RT, RW terutama kelurahan) yang bertanggungjawab terhadap masalah sampah, terutama untuk membayar petugas sampah. Karena mereka menganggap pemerintah, terutama kelurahan mempunyai dana untuk hal itu (Bab 2, h. 71).	Modal Teknologi : Adanya gerobak pengangkut sampah yang dapat digunakan untuk mengangkut sampah warga ke LPS (Bab 2, h. 87)
3	Penguat : 1) belum adanya kerjasama antara RT, RW, LMK dan kelurahan untuk menggerakkan masyarakat, 2) karena adanya saling melempar tanggungjawab terhadap masalah sampah antara RT, RW, LMK dan Kelurahan 3) dan hal ini disebabkan karena masing-masing pihak merasa keberatan dengan anggaran yang harus dikeluarkan jika ingin menggerakkan masyarakat mengatasi masalah sampah (Bab 2, h. 73).	Modal Manusia : 1. Beberapa ibu rumah tangga yang memiliki keahlian dan aktif mendaur ulang sampah plastik.
4	Modal Sosial : Berkembang sebuah norma di masyarakat RW 01 Kelurahan Pulau Panggang bahwa dalam setiap acara/kegiatan/program pasti ada imbalannya dan mereka mesti dapat, jika mereka dilibatkan, baik dalam bentuk uang tunai atau dikonversi dalam bentuk lain (Bab 2, h. 73-74).	2. Bekas pengangkut sampah yang siap untuk bekerja lagi (Bab 2, h. 87-88)
B. Faktor Non Manusia		
5	Finansial : Tidak diberikannya lagi anggaran dari kelurahan untuk gaji petugas sampah membuat petugas sampah tidak mengangkut sampah warga ke LPS lagi. Sementara masyarakat keberatan untuk membayar iuran untuk sampah, kecuali mereka yang memiliki warung. Hal ini karena penghasilan masyarakat, yang sebagian besar nelayan, tidak menentu (Bab 2, h. 78)	Modal Sosial : 1. Jaringan dengan Perusahaan Minyak CNOOC, melalui CSR (Cooperation Social Responsibility), yang sering memberikan bantuan kepada warga RW 01, dan Jaringan dengan Kelurahan Pulau Panggang yang beberapa waktu yang lalu rutin memberikan dana untuk operasional petugas pengangkut sampah di
6	Teknologi : Tidak termanfaatkannya mesin pembakar sampah/incinerator yang ada di Pulau Panggang baik yang sebelumnya ditempatkan di LPS RW 01 (kini sudah tidak ada lagi) dan yang kini ada di LPS RW 03 (Bab 2, h. 79).	
7	Lingkungan : Banyak masyarakat RW 01 yang mereklamasi (menguruk) pantai dengan batu dan sampah untuk tempat tinggal mereka, membuat luas wilayah Pulau Panggang secara umum terus bertambah. Kondisi ini karena masyarakat lebih senang tinggal berdekatan dengan keluarga mereka dan ditambah harga tanah untuk rumah yang menurut mereka mahal dibanding mereka menguruk pantai (Bab 2, h. 81).	

Lanjutan	
8	Fisik : Akses Lokasi Pembuangan Sampah (LPS) jauh dari rumah warga, sehingga mereka membuang sampah ke lokasi yang lebih dekat dengan rumah mereka (Bab 2, h. 82)
C. Regulasi, Kebijakan dan Program	
9	<p>Kegiatan dan Program :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seringnya program-program atau kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat RW 01 Kelurahan Pulau Panggang membiaskan memberikan uang atau amplop ke masyarakat. Hal ini berdampak pada berkembangnya faktor modal sosial di masyarakat sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya. 2. Masih adanya progam tentang sampah yang berorientasi proyek sehingga berdampak pada modal teknologi yang tidak termanfaatkan. 3. Belum adanya program pengelolaan sampah secara menyeluruh dan terpadu. Masing-masing pihak melakukan program mereka sendiri-sendiri: yang satu melakukan sosialisasi yang lain melakukan pelatihan dan yang lainnya lagi kerja bakti bersama. Satu dan yang lainnya tidak terkoordinasi untuk mencapai tujuan bersama (mengatasi masalah sampah) (Bab 2, h. 84-85).
10	<p>Regulasi dan Kebijakan : 1) Sistem demokrasi kita yang sudah sampai pada tingkat yang paling bawah (RT/RW) tidak bisa dikontrol dengan baik sehingga menimbulkan praktek politik uang di setiap pemilihan langsung. Ini menyebabkan masyarakat RW 01 Kelurahan Pulau Panggang telah diajarkan untuk bertindak berdasarkan berapa jumlah uang yang diperoleh. 2) Penghapusan Sudin Kebersihan Kab. Kepulauan Seribu (Bab 2, h. 85 dan 86).</p>

RW 01.

2. Jaringan dengan Rumah Sakit Atma Jaya dan Puskesmas Kelurahan Pulau Panggang yang sering memberikan sosialisasi tentang masalah sampah di RW 01.
3. Jaringan dengan Samo-Samo dan PKK Kelurahan Pulau Panggang yang sering membuat pelatihan kerajinan tangan dari sampah dan memasarkan (Bab 2, h. 89-90)

BAB 5

ANALISIS DAN USULAN PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH DI PULAU PANGGANG

Analisis pada bagian ini berdasarkan dengan tahapan perencanaan partisipatoris yang dikemukakan oleh Adi (Bab 2, h. 33-36).

5.1 Masalah Sampah di RW 01 (Tahap 1)

Untuk merumuskan masalah sampah yang dihadapi masyarakat Pulau Panggang RW 01, dilakukan melalui wawancara kelompok terfokus kepada tokoh masyarakat dan ibu-ibu rumah tangga dengan mengambil topik utama “apa masalah sampah yang paling utama yang dihadapi warga RW 01 Kelurahan Pulau Panggang”. Cara ini menurut Mikkelsen (Bab 2, h. 39) merupakan bagian dari *tools* PRA. Hanya saja peserta wawancara kelompok terfokus hanya berkisar 3-4 orang. Hal ini karena keterbatasan sumber daya peneliti untuk mengundang warga yang mesti diberikan uang/amplop untuk hal itu. Oleh karena ini peneliti mendatangi langsung warga yang berkumpul untuk melakukan wawancara kelompok terfokus.

Dari ke empat wawancara kelompok terfokus menyimpulkan bahwa masalah sampah yang dihadapi masyarakat Pulau Panggang RW 01 adalah sebagian besar sampah yang dihasilkan rumah tangga mereka tidak berakhir di Lokasi Pembuangan Sampah (LPS) melainkan di urukan, laut dan lingkungan rumah. Masalah ini dengan asumsi bahwa 1 Kepala Keluarga (KK) di RW 01 setiap hari menghasilkan sampah sebanyak 1 ember atau 1 jerigen.

Ini berarti bahwa dengan 423 KK yang dimiliki RW 01 pada tahun 2012, maka setiap hari mereka menghasilkan sampah sebanyak 423 ember/jerigen. Ini menunjukkan bahwa sebanyak 85% dari sampah tersebut atau 359,6 ember/jerigen sampah rumah tangga masyarakat RW 01 Kelurahan Pulau Panggang pada Tahun 2012 tidak berakhir di Lokasi Pembuangan Sampah (LPS), tetapi di sekitar pemukiman warga dan di laut. Jika ini terus dibiarkan selama satu bulan, maka akan ada 10.786,5 ember/jerigen sampah yang bertebaran di sekitar pemukiman warga dan di laut. Kondisi ini lah yang disebut Adi (Bab 2, h. 33) sebagai kualitas hidup yang dirasakan mengganggu masyarakat.

Kondisi ini menyebabkan bau yang tidak sedap dan lingkungan yang tampak kotor dan hal ini lah yang menurut Basriyanta (Bab 2, h. 42) sebagai dampak sosial ekonomi dari sampah.

5.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masalah Sampah di RW 01

5.2.1 Faktor Manusia dan Sosial (Tahap 2)

Salah satu faktor yang mempengaruhi masalah sampah di Pulau Panggang adalah hanya sebagian kecil saja warga di RW 01 yang membuang sampah rumah tangga mereka ke Lokasi Pembuangan Sampah (LPS) yang telah disediakan di RW 01. Hal ini menurut Adi (Bab 2, h. 33) merupakan faktor perilaku.

Perilaku ini disebabkan karena masyarakat memandang bahwa pemerintah (RT, RW terutama kelurahan) yang bertanggungjawab terhadap masalah sampah, terutama untuk membayar petugas sampah. Karena mereka menganggap pemerintah, terutama kelurahan mempunyai dana untuk hal itu. Faktor ini yang menurut Adi (Bab 2, h. 33) sebagai faktor predisposisi. Selain faktor predisposisi, perilaku warga juga dipengaruhi oleh kondisi dimana 1) belum adanya kerjasama antara RT, RW, LMK dan kelurahan untuk menggerakkan masyarakat (dukungan sosial), 2) karena adanya saling melempar tanggungjawab terhadap masalah sampah antara RT, RW, LMK dan Kelurahan (sikap agen perubahan), 3) dan hal ini disebabkan karena masing-masing merasa keberatan dengan anggaran yang harus dikeluarkan jika ingin menggerakkan masyarakat mengatasi masalah sampah (kerugian secara keuangan). Ketiga kondisi ini yang menurut Adi (Bab 2, h. 33-34) dan Green (Bab 2, h. 33-34) sebagai faktor penguat.

Faktor predisposisi dan faktor penguat disebabkan karena berkembang sebuah norma di masyarakat RW 01 Kelurahan Pulau Panggang bahwa dalam setiap acara/kegiatan/program pasti ada imbalannya dan mereka mesti dapat jika mereka dilibatkan, baik dalam bentuk uang tunai atau dikonversi dalam bentuk lain. Faktor ini menurut Adi (Bab 2, h. 34) adalah faktor modal sosial.

5.2.2 Faktor Non Manusia (Tahap 3)

Faktor non manusia yang ikut mempengaruhi masalah sampah di RW 01 Kelurahan Pulau Panggang adalah: 1) Tidak diberikannya lagi anggaran dari

kelurahan untuk gaji petugas sampah membuat petugas sampah tidak mengangkut sampah warga ke LPS lagi, 2) Sementara masyarakat keberatan untuk membayar iuran untuk sampah, kecuali mereka yang memiliki warung, 3) Hal ini karena penghasilan masyarakat, yang sebagian besar nelayan (Bab 3, h. 52), tidak menentu. Apalagi sebagian besar dari mereka adalah berpendidikan tamat SD (Bab 3, h. 52). Kondisi ini, menurut Adi (Bab 2, h. 34, 35) adalah faktor finansial. Selain itu, alat pembakar sampah yang sebelumnya ada di LPS RW 01 dan kini di LPS RW 03 tidak dimanfaatkan menjadi penyebab lain dari masalah sampah. Penyebab ini menurut Adi (Bab 2, h. 34, 35) sebagai faktor teknologi.

Faktor lain yang mempengaruhi masalah sampah yaitu : 1) banyak masyarakat RW 01 yang mereklamasi (menguruk) pantai dengan batu dan sampah untuk tempat tinggal mereka, membuat luas wilayah Pulau Panggang secara umum terus bertambah. Kondisi ini disebabkan karena 2) jumlah penduduk Pulau Panggang secara umum yang terus meningkat (Bab 3, h. 51) dan luas lahan yang hanya berkisar 9 ha (Bab 3, h. 53) menyebabkan semakin tinggi permintaan lahan untuk tempat tinggal, 3) masyarakat lebih senang tinggal berdekatan dengan keluarga mereka dan ditambah 4) harga tanah untuk rumah yang menurut mereka mahal dibanding mereka menguruk pantai. Konsekuensi logis dari kondisi ini, masyarakat sebagian besar membuang sampah rumah tangga mereka ke urukan untuk reklamasi dari pada di LPS. Hal ini menurut Adi (Bab 2, h. 34, 35) adalah faktor lingkungan yang turut mempengaruhi masalah sampah.

Jauhnya jarak antara LPS dan rumah warga sehingga warga tidak membuang sampah rumah tangga mereka ke LPS juga menjadi faktor yang mempengaruhi masalah sampah di RW 01 Kelurahan Pulau Panggang. Menurut Adi (hal. 34, 35) kondisi ini adalah faktor fisik. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Berger (Bab 2, h. 47) sebagai faktor akses.

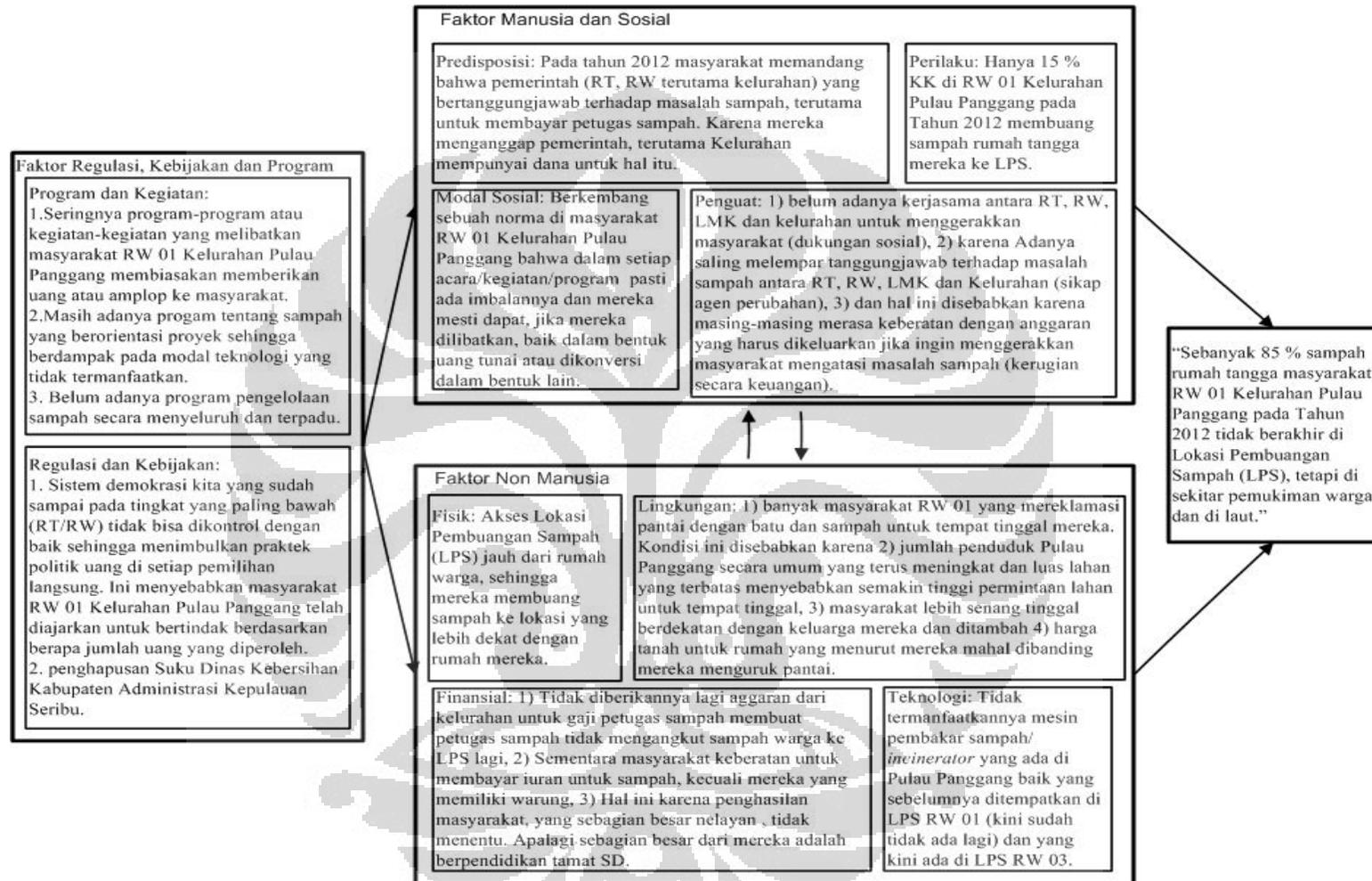
5.2.3 Faktor Regulasi, Kebijakan dan Program (Tahap 4)

Selain faktor manusia dan sosial serta faktor non manusia, faktor program dan kegiatan yang menurut Adi (Bab 2, h. 34) juga mempengaruhi masalah sampah dengan mempengaruhi faktor manusia dan sosial serta faktor non manusia terlebih dahulu. Faktor Program dan kegiatan ini adalah : 1) Seringnya program-program atau kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat RW 01 Kelurahan

Pulau Panggang membiasakan memberikan uang atau amplop ke masyarakat. Hal ini berdampak pada berkembangnya faktor modal sosial di masyarakat sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, 2) Masih adanya program tentang sampah yang berorientasi proyek sehingga berdampak pada modal teknologi yang tidak dimanfaatkan, 3) Belum adanya program pengelolaan sampah secara menyeluruh dan terpadu. Masing-masing pihak melakukan program mereka sendiri-sendiri : yang satu melakukan sosialisasi yang lain melakukan pelatihan dan yang lainnya lagi kerja bakti bersama. Satu dan yang lainnya tidak terkoordinasi untuk mencapai tujuan bersama (mengatasi masalah sampah).

Adi (Bab 2, h. 34) juga mengemukakan faktor regulasi dan kebijakan yang turut mempengaruhi masalah sampah. Faktor tersebut adalah : 1) Sistem demokrasi kita yang sudah sampai pada tingkat yang paling bawah (RT/RW) tidak bisa dikontrol dengan baik sehingga menimbulkan praktek politik uang di setiap pemilihan langsung. Kondisi ini jelas memupuk faktor modal sosial di masyarakat RW 01 Kelurahan Pulau Panggang untuk terus berkembang, 2) Penghapusan Suku Dinas Kebersihan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Masalah sampah yang dialami masyarakat RW 01 Kelurahan Pulau Panggang sebagaimana yang dijelaskan di atas bila dirumuskan dengan pola perencanaan partisipatoris berbasis aset komunitas sebagaimana yang dikemukakan oleh Adi (Bab 2, h. 32) dapat dilihat dengan gambar berikut berikut:



Gambar 5.1 : Faktor-Faktor yang mempengaruhi masalah sampah berdasarkan model perencanaan partisipatoris berbasis aset komunitas

Selain faktor-faktor yang mempengaruhi masalah sampah di atas, terdapat juga beberapa hal yang turut memperburuk masalah sampah yang ada di RW 01 Kelurahan Pulau Panggang. Hal ini terkait dengan pengelolaan sampah yang dilakukan warga RW 01, sebagaimana berikut :

Sebagian besar sampah yang dihasilkan masyarakat RW 01 adalah jenis sampah plastik yang menurut Apriaji (Bab 2, h. 41) adalah sampah *rubbish*. Sebagian besar mereka juga telah membuang sampah mereka ke wadah yang mereka sediakan sendiri dan ini menurut Pak (Bab 2, h. 43) bagian dari pengelolaan sampah pada tahap pewadahan. Hanya saja, sebagian besar pewadahan yang dilakukan warga belum memisahkan antara sampah organik dan sampah non organik sebagaimana yang dikemukakan oleh Pak (Bab 2, h. 43) kecuali sebagian kecil dari mereka. Hanya sebagian kecil dari mereka yang membuang sampah yang telah mereka wadahi ke Lokasi Pembuangan Sampah (LPS) yang menurut Peavy (Bab 2, h. 44) adalah kegiatan pengumpulan, sedangkan menurut Tchobanoglous (Bab 2, h. 44) adalah kegiatan pemindahan. Sedangkan yang lainnya membuang sampah ke urukan, laut dan lingkungan rumah. Hanya beberapa orang saja yang sampai sekarang masih memanfaatkan sampah untuk kerajinan tangan dan dijual. Kedua kegiatan ini menurut Beassari (Bab 2, h. 46) adalah *recycle* dan *reuse* dan menurut Soma (Bab 2, h. 44) merupakan bagian dari pemrosesan. Belum adanya pemasaran yang baik dari hasil kerajinan tangan yang sebelumnya telah dibuat oleh warga RW 01 dan kemudian membuat mereka menghentikan kegiatan ini menurut Gardner dan Stern (Bab 2, h. 47) sebagai faktor insentif.

Karena tidak adanya TPA maka sampah yang tidak diproses dibuang dan dibiarkan begitu saja atau dibakar di LPS, urukan atau lingkungan rumah. Kegiatan ini menurut Apriaji (Bab 2, h. 45) bagian dari cara pemusnahan sampah yaitu penimbunan tanah (*landfill*). Sayangnya menurut Apriaji cara ini hanya cocok untuk jenis sampah *rubbish* atau anorganik, sementara warga RW 01 melakukan penimbunan dengan mencampur antara sampah organik atau *garbage* dengan sampah anorganik. Kondisi ini menurut Apriaji (Bab 2, h. 45) akan menimbulkan bau dan mendatangkan tikus, kecoa, lalat, anjing dan kucing. Ini

tentunya akan membahayakan kesehatan sebagaimana yang dikatakan Slamet (Bab 2, h. 42-43).

Belum optimal kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan warga RW 01 sebagaimana yang dijelaskan di atas bisa dipahami karena sebagian besar warga Pulau Panggang dan warga RW 01 yang ada di dalamnya berpendidikan rendah (Bab 2, h. 52) yaitu SD. Sedangkan pendidikan menurut Berger (Bab 2, h. 47) sebagai faktor yang turut mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah.

Jika merujuk pada pendapat Sudradjat (Bab 2, h. 46) dengan kondisi yang ada : 1) Luas lahan terbatas, 2) Pengumpulan sampah tidak efektif, 3) Dana terbatas, 4) Masyarakat tidak kooperatif, 5) Masyarakat tidak kreatif, 6) Pemda tidak respon, maka pengelolaan sampah di RW 01 lebih sesuai menggunakan sistem se-desentralistik.

5.3 Aset Komunitas

Setelah mengetahui masalah yang ada dan faktor-faktor penyebabnya, dalam melakukan Pengembangan Masyarakat, potensi yang dimiliki masyarakat setempat perlu diketahui agar bisa digunakan untuk mengembangkan rencana program aksi guna mengatasi masalah yang ada, sebagaimana yang dikemukakan Adi (Bab 2, h. 34-35).

Aset komunitas yang dimiliki warga RW 01 adalah : 1) Adanya Lokasi Pembuangan Sampah (LPS) di RW 01 yang bisa digunakan untuk tempat membuang sampah warga RW 01, 2) Adanya kantor sekretariat RW 01 yang bisa dimanfaatkan untuk pertemuan warga. Menurut Adi (Bab 2, h. 35) keduanya adalah modal fisik. Aset komunitas lain yang dimiliki warga RW 01 adalah gerobak sampah yang bisa dimanfaatkan untuk mengangkut sampah warga dari rumah ke LPS. Aset ini menurut Adi (Bab 2, h. 35) termasuk dalam modal teknologi.

Selain itu, adanya beberapa ibu rumah tangga yang mempunyai keahlian dan masih aktif untuk membuat kerajinan tangan dari sampah dan bisa dimanfaatkan untuk mengajari ibu-ibu rumah tangga yang lain, serta bekas petugas pengangkut sampah yang siap untuk bekerja lagi merupakan aset

komunitas RW 01, yang menurut Adi (Bab 2, h. 35) termaksud dalam modal manusia.

Beberapa jaringan yang dimiliki warga RW 01 seperti: 1) Jaringan dengan Perusahaan Minyak CNOOC, melalui *CSR (Cooperation Social Responsibility)*, yang sering memberikan bantuan kepada warga RW 01, dan jaringan dengan Kelurahan Pulau Panggang yang beberapa waktu yang lalu rutin memberikan dana untuk operasional petugas pengangkut sampah di RW 01, 2) Jaringan dengan Rumah Sakit Atma Jaya dan Puskesmas Kelurahan Pulau Panggang yang sering memberikan sosialisasi tentang masalah sampah di RW 01, 3) Jaringan dengan Samo-Samo dan PKK Kelurahan Pulau Panggang yang sering membuat pelatihan kerajinan tangan dari sampah dan memasarkan. Jaringan ini menurut Lawang (Bab 2, h. 35-36) dan Adi (35) adalah bagian dari modal sosial.

5.4 *Planning (Tahap 5)*

Dalam tahap perencanaan, kajian ini menggunakan pemaknaan “dilakukan bersama komunitas sasaran” sebagai proses *assessment* dilakukan bersama masyarakat, sedangkan proses pembuatan rencana pada awalnya dibuat oleh tim perencana terlebih dahulu kemudian baru disampaikan pada masyarakat dalam satu pertemuan khusus dimana masyarakat diajak untuk memberi masukan terhadap tawaran rencana program aksi yang akan dilakukan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Adi (Bab 2, h. 31).

5.4.1 Rencana Program Aksi

Dengan mempertimbangkan masalah yang dihadapi oleh warga RW 01 dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta aset komunitas yang mereka miliki, maka pada bagian ini ditawarkan program dan kegiatan untuk menangani masalah tersebut.

Untuk merubah perilaku warga RW 01 dalam membuang sampah maka ditawarkan tiga program yaitu :

1. Program Membuang Sampah Pada Tempatnya

Program ini diusulkan karena hanya sebagian kecil dari warga RW 01 yang membuang sampah mereka ke LPS, sedangkan yang lainnya dibuang ke laut, urukan dan lingkungan rumah. Jika kondisi ini terus dibiarkan maka masalah

sampah di RW 01 akan semakin parah. Oleh karena itu, program ini diusulkan dengan tujuan merubah perilaku warga RW 01 tersebut, sehingga mereka mau membuang sampah rumah tangga mereka pada tempatnya. Indikator keberhasilan dari program ini adalah setelah satu tahun program berjalan diharapkan 30 % masyarakat RW 01 Kelurahan Pulau Panggang membuang atau diangkut sampah rumah tangganya ke LPS. Program ini didukung oleh beberapa sub program yaitu:

a. Program Sadar Sampah

Program ini diusulkan untuk meningkatkan rasa tanggungjawab warga RW 01 terhadap masalah sampah, mengingat warga RW 01 masih memandang bahwa masalah sampah adalah tanggungjawab RT, RW dan kelurahan. Karena pandangan inilah sehingga hanya sebagian kecil warga RW 01 yang membuang sampah rumah tangga mereka ke Lokasi Pembuangan Sampah (LPS) yang telah disediakan dan yang lainnya mereka buang ke urukan, laut dan lingkungan rumah. Indikator keberhasilan program ini adalah setelah satu tahun program berjalan diharapkan masyarakat berpandangan bahwa masalah sampah adalah tanggungjawab bersama antara warga, RT, RW dan kelurahan.

Kegiatan yang akan dilakukan dalam program ini adalah :

- Mensosialisasikan masalah sampah kepada warga RW 01

Selain itu, program ini diusulkan karena aset komunitas warga RW 01 menunjang untuk dilaksanakannya program ini. Aset komunitas yang dimaksud adalah :

- Adanya kantor sekretariat RW 01 yang bisa dimanfaatkan untuk pertemuan warga.
- Adanya jaringan dengan Rumah Sakit Atma Jaya dan Puskesmas Kelurahan Pulau Panggang yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan sosialisasi tentang masalah sampah bagi warga RW 01.

b. Program Pemilahan sampah

Program ini diusulkan karena mengingat masih 95 % warga RW 01 yang tidak melakukan pemilahan antara sampah organik dan sampah non organik pada saat diwadahi di tempat sampah. Hal ini disebabkan karena warga RW 01 tidak mempunyai tempat sampah yang terpisah untuk mewadahi sampah organik dan sampah non organik. Indikator keberhasilan dari program ini adalah setelah satu

tahun program berjalan diharapkan hanya 50 % warga RW 01 yang tidak melakukan pemilahan antara sampah organik dan sampah non organik pada saat diwadahi di tempat sampah.

Kegiatan yang dilakukan untuk menunjang program ini yaitu :

- Menyediakan tempat sampah organik dan tempat sampah non organik di setiap KK di RW 01.
- Mencari dana untuk memenuhi kegiatan yang pertama.

Selain karena masalah diatas, program ini diusulkan karena aset komunitas warga RW 01 menunjang untuk dilaksanakannya program ini. Aset komunitas yang dimaksud adalah :

- Adanya Jaringan dengan Perusahaan Minyak CNOOC, melalui *CSR (Cooperation Social Responsibility)*, dan jaringan dengan Kelurahan Pulau Panggang yang dapat dimanfaatkan untuk menambah pendanaan program.

c. Program Pengangkutan Sampah

Program ini diusulkan karena salah satu faktor yang menyebabkan masalah sampah di RW 01 adalah tidak berjalannya lagi petugas pengangkut sampah RW 01 karena gaji yang tidak lancar. Selain itu, alasan lain warga tidak membuang sampah mereka ke LPS adalah karena akses LPS yang jauh dari rumah mereka. Oleh karena itu, program ini bertujuan untuk menjalankan kembali petugas pengangkut sampah RW 01 agar bisa memfasilitasi warga yang rumahnya jauh dari LPS. Indikator keberhasilan dari program ini adalah petugas pengangkut sampah beroperasi lagi untuk mengangkut sampah warga RW 01 ke LPS selama satu tahun program berjalan.

Kegiatan yang dilakukan untuk menunjang program ini yaitu :

- Mencari dana untuk gaji petugas sampah.

Aset komunitas yang menunjang program ini yaitu :

- Adanya bekas petugas pengangkut sampah yang bersedia kerja lagi, jika gajinya lancar.
- Adanya Lokasi Pembuangan Sampah (LPS) di RW 01.
- Adanya gerobak sampah yang dapat digunakan untuk mengangkut sampah warga RW 01 ke LPS.

- Adanya Jaringan dengan Perusahaan Minyak CNOOC, melalui *CSR (Cooperation Social Responsibility)*, dan jaringan dengan Kelurahan Pulau Panggang yang dapat dimanfaatkan untuk menambah pendanaan program.
- 2. Program Peningkatan Kerjasama diantara pengurus RT, RW, LMK dan Kelurahan dalam menangani masalah sampah.

Program ini diusulkan karena mengingat belum adanya kerjasama antara RT, RW, LMK dan Kelurahan untuk menggerakkan masyarakat mengatasi masalah sampah, karena adanya saling lempar tanggungjawab terhadap masalah sampah, dan ini disebabkan karena masing-masing pihak merasa keberatan untuk mengeluarkan anggaran untuk menggerakkan masyarakat. Tujuan dari program ini adalah terciptanya rasa tanggungjawab bersama diantara pengurus, RT, RW dan LMK untuk menggerakkan masyarakat menangani masalah sampah. Indikator keberhasilan dari program ini adalah terjalin kerjasama antara RT, RW, LMK dan Kelurahan untuk menggerakkan masyarakat mengatasi masalah sampah setelah satu tahun program berjalan.

Kegiatan yang dapat dilakukan untuk menunjang program ini adalah :

- Meningkatkan pemahaman RT, RW, LMK dan Kelurahan tentang peran dan fungsi masing-masing serta pentingnya kerjasama antara pihak dalam mengatasi suatu masalah.

3. Program Pemanfaatan Sampah Plastik

Program ini diusulkan karena mengingat hanya 5 persen warga RW 01 yang memanfaatkan sampah plastik untuk kerajinan tangan, padahal sebagian besar sampah yang dihasilkan oleh warga RW 01 adalah sampah plastik. Tujuan dari program ini adalah merubah perilaku warga RW 01 agar bersedia memanfaatkan sampah plastik menjadi kerajinan tangan. Indikator keberhasilannya adalah setelah satu tahun program berjalan diharapkan ada 15 persen warga RW 01 yang memanfaatkan sampah plastik untuk kerajinan tangan.

Kegiatan yang dilakukan untuk menunjang program ini yaitu :

- Melatih warga RW 01 untuk membuat kerajinan tangan dari sampah.
- Mencari pasar untuk menjual hasil kerajinan tangan dari sampah yang dibuat warga RW 01.

Aset komunitas yang menunjang untuk melaksanakan program ini yaitu :

1. Adanya beberapa ibu rumah tangga di RW 01 yang memiliki keahlian dan aktif membuat kerajinan tangan dari sampah. Mereka bisa dimanfaatkan untuk melatih ibu-ibu rumah tangga yang lain membuat kerajinan tangan dari sampah.
2. Adanya jaringan dengan Samo-Samo dan PKK Kelurahan Pulau Panggang yang dapat dimanfaatkan untuk membuat pelatihan kerajinan tangan dari sampah dan memasarkannya.
3. Adanya kantor sekretariat RW 01 untuk pertemuan warga RW 01.

Analisis masalah, faktor penyebab, aset komunitas dan tawaran program di atas dapat disimpulkan dengan tabel berikut ini :



Tabel 5.1 : Rangkuman faktor-faktor yang mempengaruhi masalah sampah, aset komunitas dan tawaran program

Masalah : "Sebanyak 85 % sampah rumah tangga masyarakat RW 01 Kelurahan Pulau Panggang pada Tahun 2012 tidak berakhir di Lokasi Pembuangan Sampah (LPS), tetapi di sekitar pemukiman warga dan di laut." dengan asumsi bahwa 1 Kepala Keluarga (KK) di RW 01 setiap hari menghasilkan sampah sebanyak 1 ember atau 1 jerigen (Bab 4, h. 59).			
No	Dimensi yang mempengaruhi Faktor Manusia dan Sosial	Aset Komunitas	Usulan Program Pengelolaan Sampah
1	Perilaku : 1) Sebanyak 75 % KK di RW 01 Kelurahan Pulau Panggang pada Tahun 2012 yang masih membuang sampah rumah tangga mereka ke urukan, 2) Sebanyak 5 % KK di RW 01 Kelurahan Pulau Panggang pada Tahun 2012 masih membuang sampah rumah tangga mereka ke laut, 3) Hanya 15 % KK di RW 01 Kelurahan Pulau Panggang pada Tahun 2012 membuang sampah rumah tangga mereka ke LPS, 4) Hanya 5 % KK di RW 01 Kelurahan Pulau Panggang pada Tahun 2012 yang memanfaatkan sampah. (Bab 4, h. 69-70).	Modal Fisik : 1. Tersedianya LPS di RW 01 yang bisa dimanfaatkan untuk pembuangan sampah warga. 2. Adanya kantor sekretariat RW 01 yang bisa dimanfaatkan untuk pertemuan warga (Bab 5, h. 98).	1. Program Membuang Sampah Pada Tempatnya. Merubah perilaku warga RW 01 tersebut, sehingga mereka mau membuang sampah rumah tangga mereka pada tempatnya. Beberapa program pendukung yaitu : a. Program sadar sampah Memberikan kesadaran akan bahaya dan manfaat sampah, serta menjadi tanggungjawab bersama. Memanfaatkan Jaringan untuk sosialisasi sampah.
2	Predisposisi : Pada tahun 2012 Masyarakat memandang bahwa pemerintah (RT, RW terutama Kelurahan) yang bertanggungjawab terhadap masalah sampah, terutama untuk membayar petugas sampah. Karena mereka menganggap pemerintah, terutama kelurahan mempunyai dana untuk hal itu (Bab 5, h. 93).	Modal Teknologi : Adanya gerobak pengangkut sampah yang dapat digunakan untuk mengangkut sampah warga ke LPS (Bab 5, h. 98).	b. Program Pemilihan Sampah Merubah perilaku masyarakat dalam melakukan pewardahan sampah. Memanfaatkan jaringan dengan perusahaan minyak CNOOC, melalui CSR (<i>Cooperation Social Responsibility</i>).
3	Penguat 1) belum adanya kerjasama antara RT, RW, LMK dan kelurahan untuk menggerakkan masyarakat, 2) karena adanya saling melempar tanggungjawab terhadap masalah sampah antara RT, RW, LMK dan Kelurahan 3) dan hal ini disebabkan karena masing-masing pihak merasa keberatan dengan anggaran yang harus dikeluarkan jika ingin menggerakkan masyarakat mengatasi masalah sampah (Bab 5, h. 93).	Modal Manusia : 1. Beberapa ibu rumah tangga yang memiliki keahlian dan aktif mendaurulang sampah plastik. 2. Bekas petugas pengangkut sampah yang siap untuk bekerja lagi (Bab 5, h. 98-99).	c. Program Pengangkutan Sampah
4	Modal Sosial : Berkembang sebuah norma di masyarakat RW 01 Kelurahan Pulau Panggang bahwa dalam setiap acara/kegiatan/program pasti ada imbalannya dan mereka mesti dapat, jika mereka dilibatkan, baik dalam bentuk uang tunai atau dikonversi dalam bentuk lain (Bab 5, h. 93).	Modal Sosial : 1. Jaringan dengan perusahaan minyak CNOOC, melalui	
	Faktor Non Manusia		
5	Finansial : 1) Tidak diberikannya lagi anggaran dari kelurahan untuk gaji petugas sampah membuat petugas sampah tidak mengangkut sampah warga ke LPS lagi, 2) Sementara masyarakat keberatan untuk membayar iuran untuk sampah, kecuali mereka yang memiliki warung, 3) Hal ini karena penghasilan masyarakat, yang sebagian besar nelayan, tidak menentu. Apalagi sebagian besar dari mereka adalah berpendidikan tamat SD (Bab 5, h. 93-94).		

Lanjutan

6	Teknologi : Tidak termanfaatkannya mesin pembakar sampah/ <i>incinerator</i> yang ada di Pulau Panggang baik yang sebelumnya ditempatkan di LPS RW 01 (kini sudah tidak ada lagi) dan yang kini ada di LPS RW 03 (Bab 5, h. 94).	<p><i>CSR (Cooperation Social Responsibility)</i>, yang sering memberikan bantuan kepada warga RW 01, dan jaringan dengan Kelurahan Pulau Panggang yang beberapa waktu yang lalu rutin memberikan dana untuk operasional petugas pengangkut sampah di RW 01.</p> <p>2. Jaringan dengan Rumah Sakit Atma Jaya dan Puskesmas Kelurahan Pulau Panggang yang sering memberikan sosialisasi tentang masalah sampah di RW 01.</p> <p>3. Jaringan dengan Samo-Samo dan PKK Kelurahan Pulau Panggang yang sering membuat pelatihan kerajinan tangan dari sampah dan memasarkan (Bab 5, h. 99)</p>	<p>Untuk menjalankan kembali petugas pengangkut sampah RW 01 agar bisa memfasilitasi warga yang rumahnya jauh dari LPS. Memanfaatkan petugas sampah, LPS, gerobak sampah dan perusahaan minyak CNOOC, melalui <i>CSR (Cooperation Social Responsibility)</i>.</p> <p>2. Program peningkatan rasa tanggungjawab bersama diantara pengurus RT, RW, LMK dan Kelurahan dalam menangani masalah sampah Untuk menciptakan rasa tanggungjawab bersama diantara pengurus, RT, RW dan LMK dalam menangani masalah sampah RW 01.</p> <p>3. Program Pemanfaatan Sampah Plastik : Merubah perilaku warga RW 01 agar bersedia memanfaatkan sampah plastik menjadi kerajinan tangan. Memanfaatkan jaringan dengan Samo-Samo dan PKK Kelurahan Pulau Panggang., beberapa ibu rumah tangga yang memiliki keahlian dan aktif mendaur ulang sampah plastik, serta kantor sekretariat RW 01.</p>		
7	Lingkungan : 1) banyak masyarakat RW 01 yang mereklamasi (menguruk) pantai dengan batu dan sampah untuk tempat tinggal mereka, membuat luas wilayah Pulau Panggang secara umum terus bertambah. Kondisi ini disebabkan karena 2) jumlah penduduk Pulau Panggang secara umum yang terus meningkat dan luas lahan yang terbatas menyebabkan semakin tinggi permintaan lahan untuk tempat tinggal, 3) masyarakat lebih senang tinggal berdekatan dengan keluarga mereka dan ditambah 4) harga tanah untuk rumah yang menurut mereka mahal dibanding mereka menguruk pantai (Bab 5, h. 94).			<p>2. Jaringan dengan Rumah Sakit Atma Jaya dan Puskesmas Kelurahan Pulau Panggang yang sering memberikan sosialisasi tentang masalah sampah di RW 01.</p> <p>3. Jaringan dengan Samo-Samo dan PKK Kelurahan Pulau Panggang yang sering membuat pelatihan kerajinan tangan dari sampah dan memasarkan (Bab 5, h. 99)</p>	<p>2. Program peningkatan rasa tanggungjawab bersama diantara pengurus RT, RW, LMK dan Kelurahan dalam menangani masalah sampah Untuk menciptakan rasa tanggungjawab bersama diantara pengurus, RT, RW dan LMK dalam menangani masalah sampah RW 01.</p> <p>3. Program Pemanfaatan Sampah Plastik : Merubah perilaku warga RW 01 agar bersedia memanfaatkan sampah plastik menjadi kerajinan tangan. Memanfaatkan jaringan dengan Samo-Samo dan PKK Kelurahan Pulau Panggang., beberapa ibu rumah tangga yang memiliki keahlian dan aktif mendaur ulang sampah plastik, serta kantor sekretariat RW 01.</p>
8	Fisik : Akses Lokasi Pembuangan Sampah (LPS) jauh dari rumah warga, sehingga mereka membuang sampah ke lokasi yang lebih dekat dengan rumah mereka. (Bab 5, h. 94).				
D. Regulasi, Kebijakan dan Program		<p>2. Jaringan dengan Rumah Sakit Atma Jaya dan Puskesmas Kelurahan Pulau Panggang yang sering memberikan sosialisasi tentang masalah sampah di RW 01.</p> <p>3. Jaringan dengan Samo-Samo dan PKK Kelurahan Pulau Panggang yang sering membuat pelatihan kerajinan tangan dari sampah dan memasarkan (Bab 5, h. 99)</p>	<p>2. Program peningkatan rasa tanggungjawab bersama diantara pengurus RT, RW, LMK dan Kelurahan dalam menangani masalah sampah Untuk menciptakan rasa tanggungjawab bersama diantara pengurus, RT, RW dan LMK dalam menangani masalah sampah RW 01.</p> <p>3. Program Pemanfaatan Sampah Plastik : Merubah perilaku warga RW 01 agar bersedia memanfaatkan sampah plastik menjadi kerajinan tangan. Memanfaatkan jaringan dengan Samo-Samo dan PKK Kelurahan Pulau Panggang., beberapa ibu rumah tangga yang memiliki keahlian dan aktif mendaur ulang sampah plastik, serta kantor sekretariat RW 01.</p>		
9	<p>Kegiatan dan Program :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seringnya program-program atau kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat RW 01 Kelurahan Pulau Panggang membiasakan memberikan uang atau amplop ke masyarakat. Hal ini berdampak pada berkembangnya faktor modal sosial di masyarakat sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya. 2. Masih adanya program tentang sampah yang berorientasi proyek sehingga berdampak pada modal teknologi yang tidak termanfaatkan. 3. Belum adanya program pengelolaan sampah secara menyeluruh dan terpadu. Masing-masing pihak melakukan program mereka sendiri-sendiri: yang satu melakukan sosialisasi yang lain melakukan pelatihan dan yang lainnya lagi kerja bakti bersama. Satu dan yang lainnya tidak terkoordinasi untuk mencapai tujuan bersama (mengatasi masalah sampah) (Bab 5, h. 94-95). 			<p>2. Jaringan dengan Rumah Sakit Atma Jaya dan Puskesmas Kelurahan Pulau Panggang yang sering memberikan sosialisasi tentang masalah sampah di RW 01.</p> <p>3. Jaringan dengan Samo-Samo dan PKK Kelurahan Pulau Panggang yang sering membuat pelatihan kerajinan tangan dari sampah dan memasarkan (Bab 5, h. 99)</p>	<p>2. Program peningkatan rasa tanggungjawab bersama diantara pengurus RT, RW, LMK dan Kelurahan dalam menangani masalah sampah Untuk menciptakan rasa tanggungjawab bersama diantara pengurus, RT, RW dan LMK dalam menangani masalah sampah RW 01.</p> <p>3. Program Pemanfaatan Sampah Plastik : Merubah perilaku warga RW 01 agar bersedia memanfaatkan sampah plastik menjadi kerajinan tangan. Memanfaatkan jaringan dengan Samo-Samo dan PKK Kelurahan Pulau Panggang., beberapa ibu rumah tangga yang memiliki keahlian dan aktif mendaur ulang sampah plastik, serta kantor sekretariat RW 01.</p>
10	Regulasi dan Kebijakan : 1) Sistem demokrasi kita yang sudah sampai pada Tingkat yang paling bawah (RT/RW) tidak bisa dikontrol dengan baik sehingga menimbulkan praktek politik uang di setiap pemilihan langsung. Ini menyebabkan masyarakat RW 01 Kelurahan Pulau Panggang telah diajarkan untuk bertindak berdasarkan berapa jumlah uang yang diperoleh. 2) Penghapusan Sudin Kebersihan Kab. Kepulauan Seribu (Bab 5, h. 95).	<p>2. Jaringan dengan Rumah Sakit Atma Jaya dan Puskesmas Kelurahan Pulau Panggang yang sering memberikan sosialisasi tentang masalah sampah di RW 01.</p> <p>3. Jaringan dengan Samo-Samo dan PKK Kelurahan Pulau Panggang yang sering membuat pelatihan kerajinan tangan dari sampah dan memasarkan (Bab 5, h. 99)</p>	<p>2. Program peningkatan rasa tanggungjawab bersama diantara pengurus RT, RW, LMK dan Kelurahan dalam menangani masalah sampah Untuk menciptakan rasa tanggungjawab bersama diantara pengurus, RT, RW dan LMK dalam menangani masalah sampah RW 01.</p> <p>3. Program Pemanfaatan Sampah Plastik : Merubah perilaku warga RW 01 agar bersedia memanfaatkan sampah plastik menjadi kerajinan tangan. Memanfaatkan jaringan dengan Samo-Samo dan PKK Kelurahan Pulau Panggang., beberapa ibu rumah tangga yang memiliki keahlian dan aktif mendaur ulang sampah plastik, serta kantor sekretariat RW 01.</p>		

5.4.2 Indikator Keberhasilan Program dan Alur Perubahan

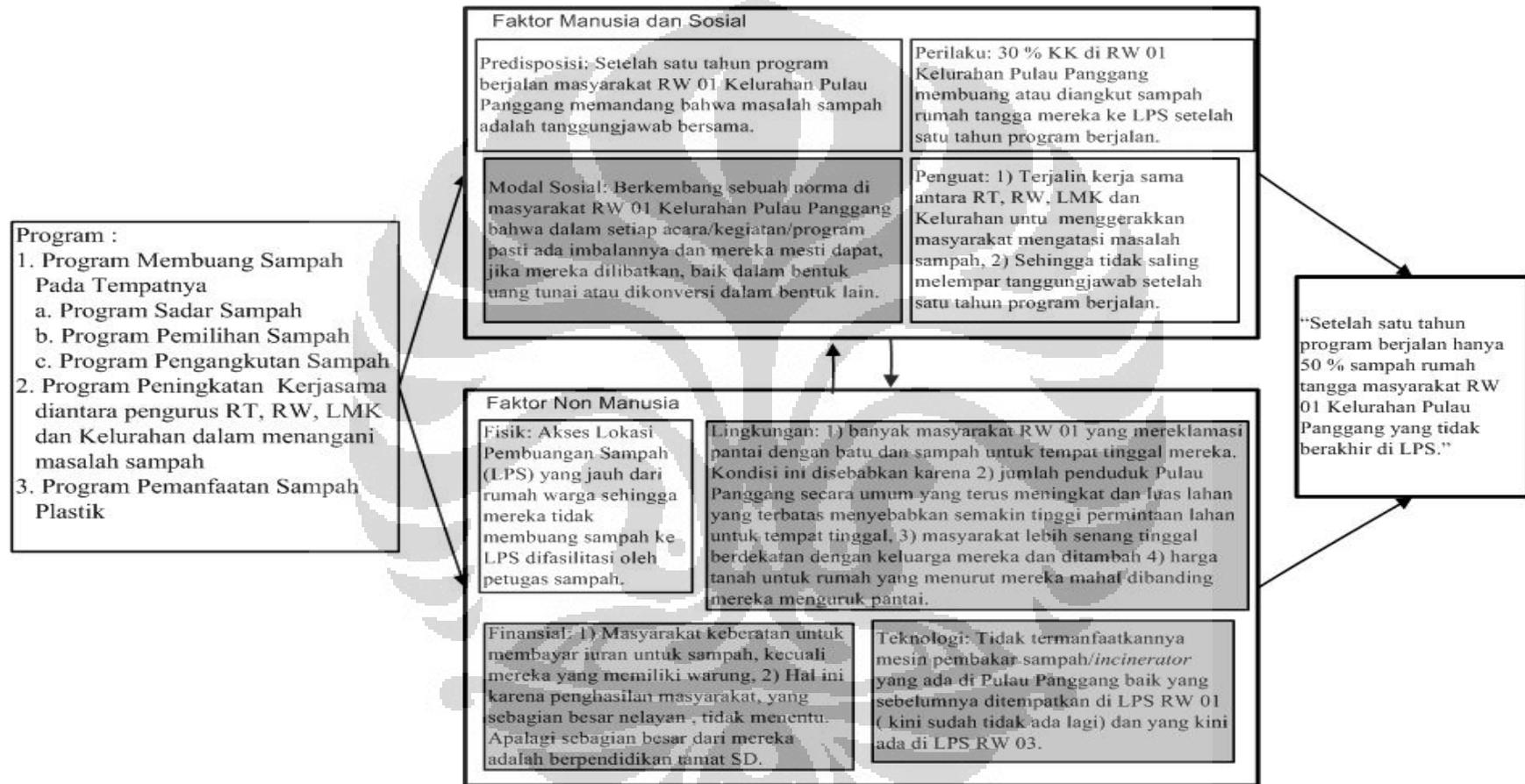
Pada bagian ini dikemukakan indikator keberhasilan setiap program yang ditawarkan dan bagaimana program-program tersebut menciptakan perubahan.

Indikator keberhasilan setiap program digambarkan melalui tabel berikut :

Tabel 5.2 : Indikator Keberhasilan Program

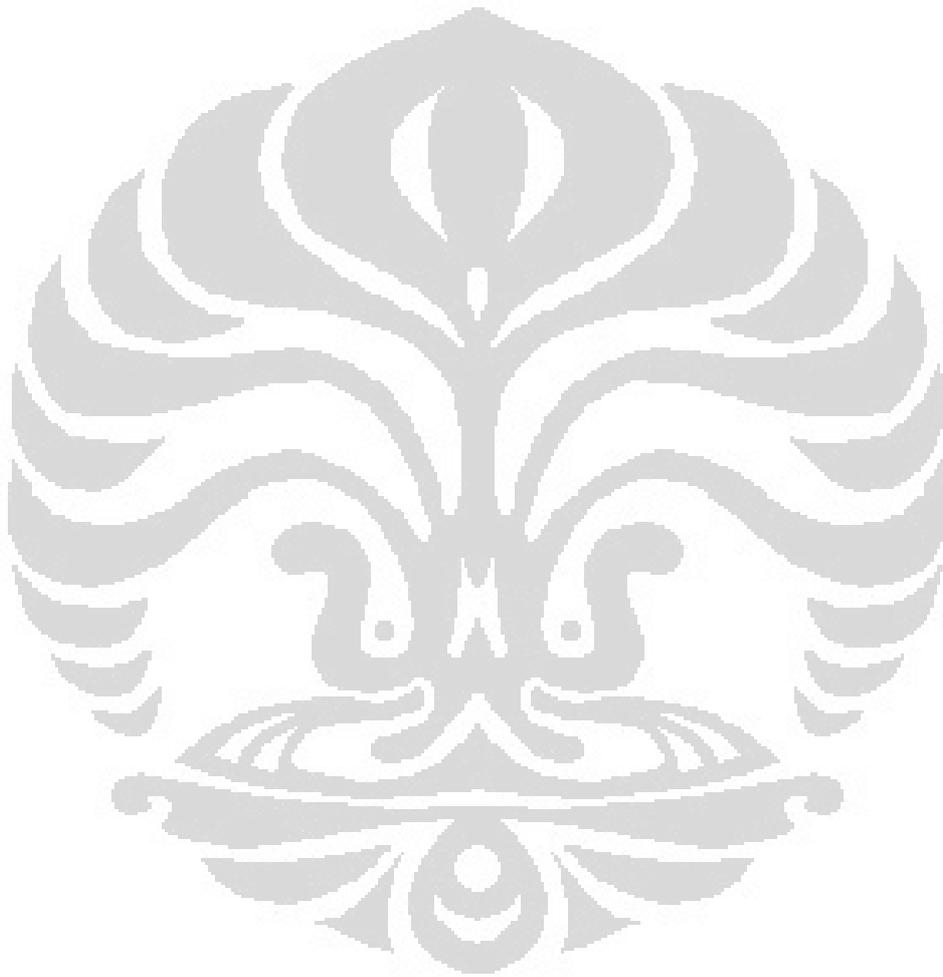
No	Nama Program	Temuan Lapangan	Indikator Keberhasilan	Sumber Pembuktian
1	Program Membuang Sampah Pada Tempatnya	Hanya 15 % KK di RW 01 Kelurahan Pulau Panggang pada Tahun 2012 membuang sampah rumah tangga mereka ke LPS, lainnya dibuang ke urukan dan laut (Bab 4, h. 68).	30 % KK RW 01 Kelurahan Pulau Panggang membuang atau diangkut sampah rumah tangganya ke LPS.	Hasil Laporan Evaluasi
	a. Program Sadar Sampah	Pada tahun 2012 masyarakat RW 01 Kelurahan Pulau Panggang memandang bahwa pemerintah (RT, RW terutama kelurahan) yang bertanggungjawab terhadap masalah sampah, terutama untuk membayar petugas sampah. Karena mereka menganggap pemerintah, terutama Kelurahan mempunyai dana untuk hal itu (Bab 5, h. 93)	Setelah satu tahun program berjalan masyarakat RW 01 Kelurahan Pulau Panggang memandang bahwa masalah sampah adalah tanggungjawab bersama.	Hasil Laporan Evaluasi
	b. Program Pemilahan Sampah	Pada tahun 2012 masih 95 % warga RW 01 Kelurahan Pulau Panggang yang tidak melakukan pemilahan antara sampah organik dan sampah non organik pada saat diwadhahi di tempat sampah (Bab 4, h. 62)	Setelah satu tahun program berjalan hanya 50 % warga RW 01 yang tidak melakukan pemilahan antara sampah organik dan sampah non organik pada saat diwadhahi di tempat sampah	Hasil Laporan Evaluasi
	c. Program Pengangkutan Sampah	Pada tahun 2012 petugas pengangkut sampah RW 01 tidak berjalan lagi karena gaji yang tidak lancar dan warga RW 01 Kelurahan Pulau Panggang yang tidak membuang sampah mereka ke LPS karena akses LPS yang jauh dari rumah mereka (Bab 5, h. 94)	Selama satu tahun program berjalan petugas pengangkut sampah aktif mengangkut sampah warga RW 01 Kelurahan Pulau Panggang ke LPS sehingga bisa memfasilitasi akses LPS yang jauh dari rumah warga.	Hasil Laporan Evaluasi
2	Program Peningkatan Kerjasama dalam menangani masalah sampah	1) belum adanya kerjasama antara RT, RW, LMK dan Kelurahan untuk menggerakkan masyarakat, 2) karena adanya saling melempar tanggungjawab terhadap masalah sampah antara RT, RW, LMK dan Kelurahan (Bab 5, h. 93).	Terjalin kerjasama antara RT, RW, LMK dan Kelurahan untuk menggerakkan masyarakat mengatasi masalah sampah sehingga tidak saling melempar tanggungjawab setelah satu tahun program berjalan.	Hasil Laporan Evaluasi
3	Program Pemanfaatan Sampah Plastik	Hanya 5 % KK di RW 01 Kelurahan Pulau Panggang pada Tahun 2012 yang memanfaatkan sampah ((Bab 4, h. 70))	setelah satu tahun program berjalan ada 15 persen warga RW 01 Kelurahan Pulau Panggang yang memanfaatkan sampah plastik untuk kerajinan tangan.	Hasil Laporan Evaluasi

Alur perubahan yang dihasilkan setiap program terlihat dalam gambar berikut :



Gambar 5.2 : Alur Perubahan Program

Kotak yang diberi bayangan hitam adalah faktor-faktor penyebab masalah sampah yang tidak bisa dijangkau oleh semua program yang ditawarkan. Oleh karena itu, alur perubahan hanya terjadi pada kotak yang tidak diberi bayangan hitam.



BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian ini akan diuraikan kesimpulan pada bab 5 dan saran yang masing-masing diuraikan secara terpisah.

6.1 Kesimpulan

- a. Berdasarkan temuan lapangan dan analisis disimpulkan bahwa kualitas hidup yang terkait dengan masalah sampah yang dirasakan oleh warga RW 01 adalah sebagian besar sampah yang dihasilkan oleh warga RW 01 tidak berakhir di Lokasi Pembuangan Sampah (LPS) melainkan di urukan, laut dan lingkungan rumah. Kondisi ini dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut:
 - Hanya sebagian kecil saja warga di RW 01 yang membuang sampah rumah tangga mereka ke Lokasi Pembuangan Sampah (LPS) yang telah disediakan di RW 01. Sebagian besar mereka membuang sampah mereka ke urukan untuk reklamasi pantai. Faktor ini disebut sebagai faktor perilaku.
 - Masyarakat memandang bahwa pemerintah (RT, RW terutama kelurahan) yang bertanggungjawab terhadap masalah sampah, terutama untuk membayar petugas sampah. Karena mereka menganggap pemerintah, terutama kelurahan mempunyai dana untuk hal itu. Faktor ini disebut sebagai faktor predisposisi yang mempengaruhi faktor perilaku.
 - Belum adanya kerjasama antara RT, RW, LMK dan kelurahan untuk menggerakkan masyarakat, karena adanya saling melempar tanggungjawab terhadap masalah sampah antara RT, RW, LMK dan Kelurahan, dan hal ini disebabkan karena masing-masing pihak merasa keberatan dengan anggaran yang harus dikeluarkan jika ingin menggerakkan masyarakat untuk mengatasi masalah sampah. Faktor ini disebut sebagai faktor penguat yang turut mempengaruhi faktor perilaku.

- Berkembang sebuah norma di masyarakat RW 01 Kelurahan Pulau Panggang bahwa dalam setiap acara/kegiatan/program pasti ada imbalan dan mereka mesti dapat jika mereka dilibatkan baik dalam bentuk uang tunai atau dikonversi dalam bentuk lain. Faktor ini disebut sebagai faktor modal sosial yang mempengaruhi faktor predisposisi dan faktor penguat.
- Tidak adanya anggaran dari kelurahan dan masyarakat untuk membiayai petugas sampah yang mengangkut sampah dari rumah warga ke LPS dan masyarakat keberatan untuk membayar iuran untuk sampah karena kondisi ekonomi masyarakat yang sebagian besar nelayan tidak menentu, kecuali bagi mereka yang berpenghasilan lebih. Apalagi tingkat pendidikan masyarakat Pulau Panggang sebagian besar tamat SD dan berpenghasilan sebagai nelayan. Faktor ini disebut sebagai faktor finansial.
- Tidak termanfaatkannya mesin pembakar sampah/*incinerator* yang ada di Pulau Panggang baik yang sebelumnya ditempatkan di LPS RW 01 (kini sudah tidak ada lagi) dan yang kini ada di LPS RW 03. Faktor ini disebut sebagai faktor teknologi.
- Banyak masyarakat RW 01 yang mereklamasi (menguruk) pantai dengan batu dan sampah untuk tempat tinggal mereka, membuat luas wilayah Pulau Panggang secara umum terus bertambah. Kondisi ini disebabkan karena jumlah penduduk Pulau Panggang secara umum yang terus meningkat dan luas lahan yang terbatas. Ini menyebabkan semakin tinggi permintaan lahan untuk tempat tinggal dan masyarakat lebih senang tinggal berdekatan dengan keluarga mereka disamping harga tanah untuk rumah yang menurut mereka mahal dibanding mereka menguruk pantai. Faktor ini disebut sebagai faktor lingkungan.
- Jauhnya jarak antara LPS dan rumah warga membuat warga tidak membuang sampah rumah tangga mereka ke LPS. Faktor ini disebut sebagai faktor fisik.
- Seringnya program-program atau kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat RW 01 Kelurahan Pulau Panggang membiasakan

memberikan uang atau amplop ke masyarakat. Hal ini berdampak pada berkembangnya faktor modal sosial yang mempengaruhi faktor predisposisi dan faktor penguat. Masih adanya program tentang sampah yang berorientasi proyek sehingga berdampak pada modal teknologi yang tidak termanfaatkan. Belum adanya program pengelolaan sampah secara menyeluruh dan terpadu. Faktor ini disebut sebagai faktor program.

- Sistem demokrasi yang sudah sampai pada tingkat yang paling bawah (RT/RW) tidak bisa dikontrol dengan baik sehingga menimbulkan praktek politik uang di setiap pemilihan langsung. Kondisi ini jelas memupuk faktor modal sosial di masyarakat RW 01 Kelurahan Pulau Panggang untuk terus berkembang ditambah penghapusan Suku Dinas Kebersihan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Faktor ini disebut sebagai faktor kebijakan

Selain kualitas hidup yang terkait dengan masalah sampah yang dirasakan oleh warga RW 01 dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, penelitian ini juga menyimpulkan beberapa aset yang dimiliki warga RW 01 yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi masalah yang ada. Aset tersebut yaitu:

- 1) Adanya Lokasi Pembuangan Sampah (LPS) di RW 01 yang bisa digunakan untuk tempat membuang sampah warga RW 01, 2). Adanya kantor sekretariat RW 01 yang bisa dimanfaatkan untuk pertemuan warga. Ini disebut dengan modal fisik.
- Adanya gerobak sampah yang bisa dimanfaatkan untuk mengangkut sampah warga dari rumah ke LPS. Ini disebut dengan modal teknologi.
- Adanya beberapa ibu rumah tangga yang mempunyai keahlian dan masih aktif untuk membuat kerajinan tangan dari sampah dan bisa dimanfaatkan untuk mengajari ibu-ibu rumah tangga yang lain, serta mantan petugas pengangkut sampah yang siap untuk bekerja lagi. Ini disebut dengan modal manusia.
- Adanya jaringan dengan perusahaan minyak CNOOC, melalui *CSR (Cooperation Social Responsibility)*, yang sering memberikan bantuan kepada warga RW 01, dan jaringan dengan Kelurahan Pulau Panggang

yang beberapa waktu lalu rutin memberikan dana untuk operasional petugas pengangkut sampah di RW 01 yang keduanya dapat dimanfaatkan sebagai donatur program. Adanya jaringan dengan Rumah Sakit Atma Jaya dan Puskesmas Kelurahan Pulau Panggang yang sering memberikan sosialisasi tentang masalah sampah di RW 01 yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan sosialisasi tentang sampah kepada warga RW 01. Dan adanya jaringan dengan Samo-Samo dan PKK Kelurahan Pulau Panggang yang sering membuat pelatihan kerajinan tangan dari sampah dan memasarkan yang dapat dimanfaatkan untuk melatih warga RW 01 untuk membuat kerajinan tangan dari sampah dan membantu memasarkannya. Ini semua disebut dengan modal sosial.

- b. Dengan mempertimbangkan kualitas hidup yang terkait dengan masalah sampah yang dirasakan oleh warga RW 01 dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta aset yang dimiliki warga RW 01 Kelurahan Pulau Panggang maka diusulkan program pengelolaan sampah sebagai berikut :
- Program Membuang Sampah Pada Tempatnya. Program ini diusulkan karena hanya sebagian kecil dari warga RW 01 yang membuang sampah mereka ke LPS, sedangkan yang lainnya dibuang ke laut, urukan dan lingkungan rumah. Oleh karena itu, program ini diusulkan dengan tujuan merubah perilaku warga RW 01 tersebut, sehingga mereka mau membuang sampah rumah tangga mereka pada tempatnya. Program ini didukung oleh beberapa sub program yaitu:
 - Program Sadar Sampah. Program ini diusulkan untuk meningkatkan rasa tanggungjawab warga RW 01 terhadap masalah sampah, mengingat warga RW 01 masih memandang bahwa masalah sampah adalah tanggungjawab RT, RW dan Kelurahan. Karena pandangan inilah sehingga hanya sebagian kecil warga RW 01 yang membuang sampah rumah tangga mereka ke Lokasi Pembuangan Sampah (LPS) yang telah disediakan dan yang lainnya mereka buang ke urukan, laut dan lingkungan rumah.

- Program Pemilahan sampah. Program ini diusulkan karena mengingat masih 95 % warga RW 01 yang tidak melakukan pemilahan antara sampah organik dan sampah non organik pada saat diwadahi di tempat sampah. Hal ini disebabkan karena warga RW 01 tidak mempunyai tempat sampah yang terpisah untuk mewadahi sampah organik dan sampah non organik.
- Program Pengangkutan Sampah. Program ini diusulkan karena salah satu faktor yang menyebabkan masalah sampah di RW 01 adalah tidak berjalannya lagi petugas pengangkut sampah RW 01 karena gaji yang tidak lancar. Selain itu, alasan lain warga tidak membuang sampah mereka ke LPS adalah karena akses LPS yang jauh dari rumah mereka. Oleh karena itu, program ini bertujuan untuk menjalankan kembali petugas pengangkut sampah RW 01 agar bisa memfasilitasi warga yang rumahnya jauh dari LPS.
 - Program Peningkatan Kerjasama diantara pengurus RT, RW, LMK dan Kelurahan dalam menangani masalah sampah. Program ini diusulkan karena mengingat belum adanya kerjasama antara RT, RW, LMK dan Kelurahan untuk menggerakkan masyarakat mengatasi masalah sampah, karena adanya saling lempar tanggungjawab terhadap masalah sampah, dan ini disebabkan karena masing-masing pihak merasa keberatan untuk mengeluarkan anggaran untuk menggerakkan masyarakat. Tujuan dari program ini adalah terciptanya rasa tanggungjawab bersama diantara pengurus, RT, RW dan LMK untuk menggerakkan masyarakat menangani masalah sampah. Indikator keberhasilan dari program ini adalah terjalin kerjasama antara RT, RW, LMK dan Kelurahan untuk menggerakkan masyarakat mengatasi masalah sampah setelah satu tahun program berjalan.
 - Program Pemanfaatan Sampah Plastik. Program ini diusulkan karena mengingat hanya 5 persen warga RW 01 yang memanfaatkan sampah plastik untuk kerajinan tangan, padahal sebagian besar sampah yang dihasilkan oleh warga RW 01 adalah sampah plastik. Tujuan dari

program ini adalah merubah perilaku warga RW 01 agar bersedia memanfaatkan sampah plastik menjadi kerajinan tangan.

6.2 Saran

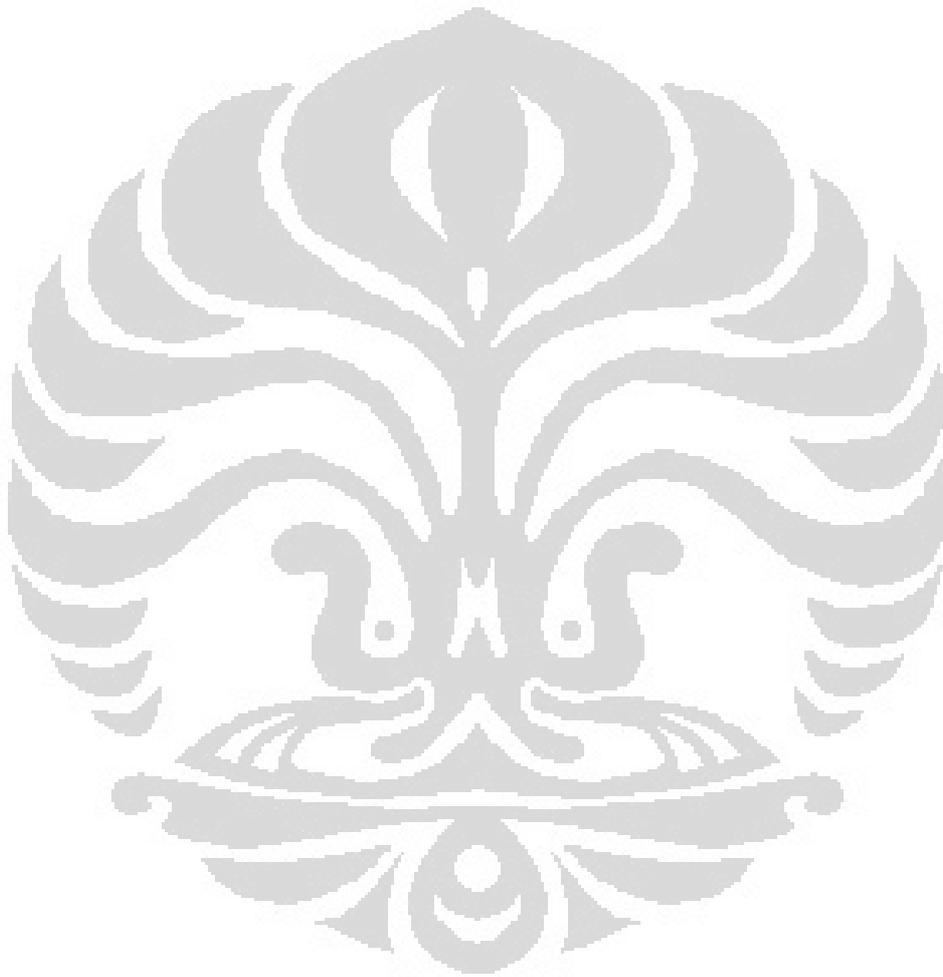
Berdasarkan pembahasan yang sebelumnya, maka pada bagian ini akan dikemukakan saran-saran :

1. Dinas Kebersihan Propinsi DKI Jakarta harusnya mengevaluasi proyek pengadaan mesin pembakar sampah di Kelurahan Pulau Panggang. Hal ini karena dua buah mesin pembakar sampah yang ditempatkan di RW 01 dan RW 01 tidak termanfaatkan. Sebagai dampaknya, sampah yang ada di Pulau Panggang tersebar di lingkungan warga dan ini menimbulkan bau dan lingkungan tampak kotor.
2. Pemerintah, LSM dan lembaga apa saja yang memiliki dan yang akan menerapkan program mereka bagi warga RW 01 khususnya dan warga Pulau Panggang umumnya jangan membiasakan warga untuk diberi uang (amplop) saat melibatkan mereka dalam program tersebut. Ini dapat membuat warga RW 01 terbiasa untuk bertindak berdasarkan uang yang mereka peroleh. Dan ini telah terjadi. Dampaknya masyarakat akan sulit untuk digerakkan jika tidak ada uang. Ini dialami oleh peneliti sendiri ketika peneliti mengajak warga untuk berpartisipasi saat *assessment*. Warga sulit dikumpulkan jika tidak diimingi akan ada uang dalam pelibatan mereka. Dampak lanjutan dari kondisi ini adalah akan menyulitkan lembaga-lembaga lain yang ingin menerapkan program pemberdayaan bagi warga RW 01 sementara lembaga tersebut tidak memiliki dana yang cukup. Bisa jadi lembaga tersebut membatalkan program pemberdayaan tersebut dan yang rugi tentu masyarakat RW 01 itu sendiri. Untuk tujuan yang sama, warga jangan dibiasakan dengan praktek politik uang baik ditingkat RT, RW dan yang lainnya.
3. Pemerintah, LSM dan lembaga apa saja perlu meningkatkan kerjasama antara RT, RW, LMK dan Kelurahan dalam menggerakkan masyarakat untuk menangani masalah sampah. Hal ini karena belum ada kerjasama antara RT, RW, LMK dan Kelurahan untuk menggerakkan

masyarakat dalam menangani masalah sampah. Masing – masing pihak saling melempar tanggungjawab.

4. Pemerintah, LSM dan lembaga apa saja perlu memberikan sosialisasi masalah sampah kepada masyarakat RW 01 terutama tentang tanggungjawab bersama akan masalah sampah. Hal ini karena masih banyak warga RW 01 yang memandang bahwa masalah sampah adalah tanggungjawab, RT, RW terutama Kelurahan.
5. Pemerintah DKI Jakarta bisa mengeluarkan aturan untuk melarang masyarakat melakukan reklamsai pantai untuk tempat tinggal dan juga memberikan solusi untuk mereka yang belum memiliki lahan untuk rumah. Solusi dilakukan dengan jalan mengajak beberapa rumah tangga yang masih memiliki ikatan keluarga agar pindah dari Pulau Panggang dan menempati beberapa pulau yang belum ada penghuninya yang masih berada di wilayah Kelurahan Pulau Panggang. Ini pernah dilakukan beberapa tahun yang lalu ketika beberapa rumah tangga pindah dari Pulau Panggang ke Pulau Pramuka dan akhirnya rumah tangga yang lain ikut menyusul pindah. Ini bertujuan untuk mengurangi reklamasi pantai yang dilakukan warga.
6. Kelurahan Pulau Panggang perlu memberikan lagi dana untuk gaji petugas sampah sebesar 150.000/bulan yang kini tidak berjalan, agar petugas sampah mau menjalankan perannya lagi untuk mengangkat sampah warga dari rumah ke LPS.
7. RT, RW, LMK di RW 01 dan Kelurahan Pulau Panggang bekerjasama dalam mengatasi masalah sampah. Ini dilakukan dengan jalan membagi peran masing-masing sehingga tidak terjadi saling lempar tanggungjawab terhadap masalah sampah.
8. Warga RW 01 harusnya membangun kesadaran bahwa masalah sampah di RW 01 adalah tanggungjawab bersama sehingga mau diajak bekerjasama dengan RT, RW atau kelurahan tanpa diimingi akan mendapatkan uang.

9. Warga RW 01 sebaiknya memisahkan antara sampah organik dan non organik saat diwadahi atau dibuang ke LPS dan urukan. Hal ini untuk menghindari bau busuk dan menjaga kesehatan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adi, Isbandi Rukminto. (2005). *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Depok: FISIP UI Press.
- ___, Isbandi Rukminto. (2007). *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas*. Depok: FISIP UI Press.
- ___, Isbandi Rukminto. (2008). *Intervensi Komunitas: Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Apriadji, Wied Harry. (2002). *Memproses Sampah*. Jakarta: Penebar Suwadaya.
- Babbie, Earl. 2004. *The Practice of Social Research*. (10th Edition). United States of America: Thomson Learning.
- Basriyanta. (2007). *Memanen Sampah*. Yogyakarta: Kanisius.
- Conyers. (1991). *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga* (Susetiawan, Penerjemah.). Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Goslin, Louisa & Edwards, Mike (2006). *Toolkits: A practical guide to planning, monitoring, evaluation and impact assessment*. (Second Edition). London: Save the Children. UK.
- Green, Lawrence. Kreuter. (1991). *Health Promotion Planning, An Education and Environmental Approach*. United States of America: Mayfield Publishing Company.
- Hikmat, Harry. (2006). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press (HUP).
- Idrus, Muhammad. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. (Edisi Kedua). Jakarta: Erlangga.
- Ife, Jim. (2006). *Community Development*. (Third Edition). Australia: Pearson Education Australia.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Midgley, James. 1995. *Social Development: The Development Perspective in Social Welfare*. London: SAGE Publication.
- Mikkelsen, Brita. (2005). *Methods For Development Work And Reseach, A New Guide For Practitioners*. (Second Edition). New Delhi: SAGE.

- _____, Britha. 2011. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya Pemberdayaan, Panduan untuk Praktisi Lapangan* (Matheos Nalle, Penerjemah.). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Minichiello, Victor. Aroni. Timewell. Alexander. (1995). *In-Depth Interviewing*. (Second Edition). Australia: Longman
- Moleong, Lexy J. (1991). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Morgan, Monroe T. (2003). *Environmental Health*. Canada: Thomson.
- Neuman, W. Lawrenca. (2006). *Sosial Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches*. (Sixth Edition). United States of America: Pearson.
- Pichtel, Jonh. (2005). *Waste Management Practices, Municipal, Hazardous, and Industrial*. USA: CRC Press.
- Rothman, Erlich, E Tropman, Cox. (1995). *Strategies of Community Intervensio Macro Practice*. (Fifth Edition). Illinois: F.E. Paacock Publisher.
- Rustiadi, Erna. (2009). *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Jakarta: Restpent Press dan Yayasan Obor Indonesia.
- Slamet, Juli Soemirat. (2000). *Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta: UGM Press.
- Soma, Soekmana. (2010). *Pengantar Ilmu Teknik Lingkungan. Seri Pengelolaan Sampah Perkotaan*. Bogor: IPB Press.
- Sony, L. Tri Bangun, Suyoto. (2008). *Pemulung Sang Pelopor 3R Sampah*. Jakarta: PIDUS.
- Sudradjat. (2009). *Menglola Sampah Kota*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Suharto, Edi. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Suyoto, Bagong. (2004). *Malapetaka Sampah*. Jakarta: AKA.
- _____, Bagong. (2008). *Fenomena Gerakan Mengolah Sampah*. Jakarta: Prima Media.
- Twelvetrees, (1982). *Community Work*. London: The Macmillan Press LTD.
- Zastrow, Charles. (2004). *Introduction to Social Work and Social Welfare*. (Eight Edition). United States of America: Thomson Learning.

PENELITIAN

- Aziz, Alkausyari. (2004). *Model Pengelolaan Sampah Berbasis Kesehatan Masyarakat dan Estimasi Pembiayaan Tahun 2005-2030 di Kota Tanjung Pinang*. Tesis. Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat. FKM. Depok. UI.
- Hafsaridewi, Rani. (2004). *Pengaruh Pertumbuhan Penduduk pada Pemanfaatan Lahan dan Ketersediaan Air Bersih*. Tesis. UI.
- Koesrimardiyati, Amantya. (2011). *Keberlanjutan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat*. Tesis. Program Studi Kajian Ilmu Lingkungan. Fakultas Pascasarjana. Depok. UI.
- Noorkamilah. (2005). *Pemberdayaan Dalam Pengelolaan Sampah Padat Berbasis Masyarakat*. Tesis. Program Studi Sosiologi. FISIP. Depok. UI.
- Sutjahjo, Lay dan Herison. (2007). *Pengelolaan Tempat Pembuangan akhir Sampah dengan Pendekatan 'Zero Waste' (NIRLIMBA) Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Bogor. IPB.
- Wardhani, Citra. (2004). *Partisipasi Masyarakat Pada Kegiatan Pemilihan Sampah Rumah Tangga*. Tesis. Program Studi Ilmu Lingkungan. Fakultas Pascasarjana. Depok. UI.

JURNAL

- Dariah, Atih Rohaeti. (2009). *Peran Perguruan Tinggi dalam Aplikasi Variasi Model Pemberdayaan Masyarakat Desa di Jawa Barat*. Dalam MIMBAR Jurnal Sosial dan Pembangunan. Volume XXV, No.2. Juli-Desember 2009. 144.

ONLINE

- Wibowo, Agung (2009, April) *Kondisi Persampahan Kota di Indonesia*. 26 November, 2011. <http://narasibumi.blog.uns.ac.id/2009/04/17/kondisi-pemasaran-kota-di-indonesia/>
- Jacobs, Garry & Cleveland, Harland. (1999. 1 November). *Social Development Theory*. 8 April, 2012. http://www.icpd.org/development_theory/SocialDevTheory.htm

DOKUMEN

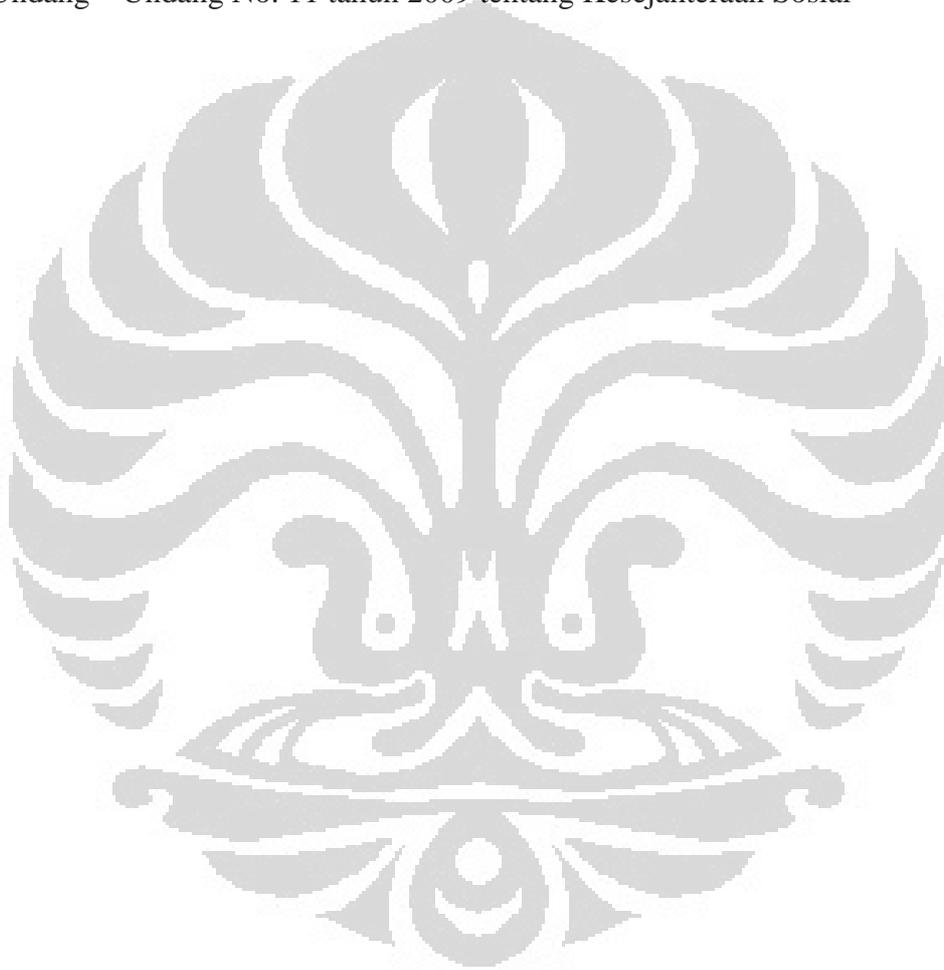
Draf Laporan Akhir Pengembangan Masyarakat Dalam Perbaikan Kampung Terpadu – Kelurahan Pulau Panggang (2009).

Laporan Akhir Program Muhammad Husni Thamrin (MHT) Plus Kepulauan Seribu tahun 2010.

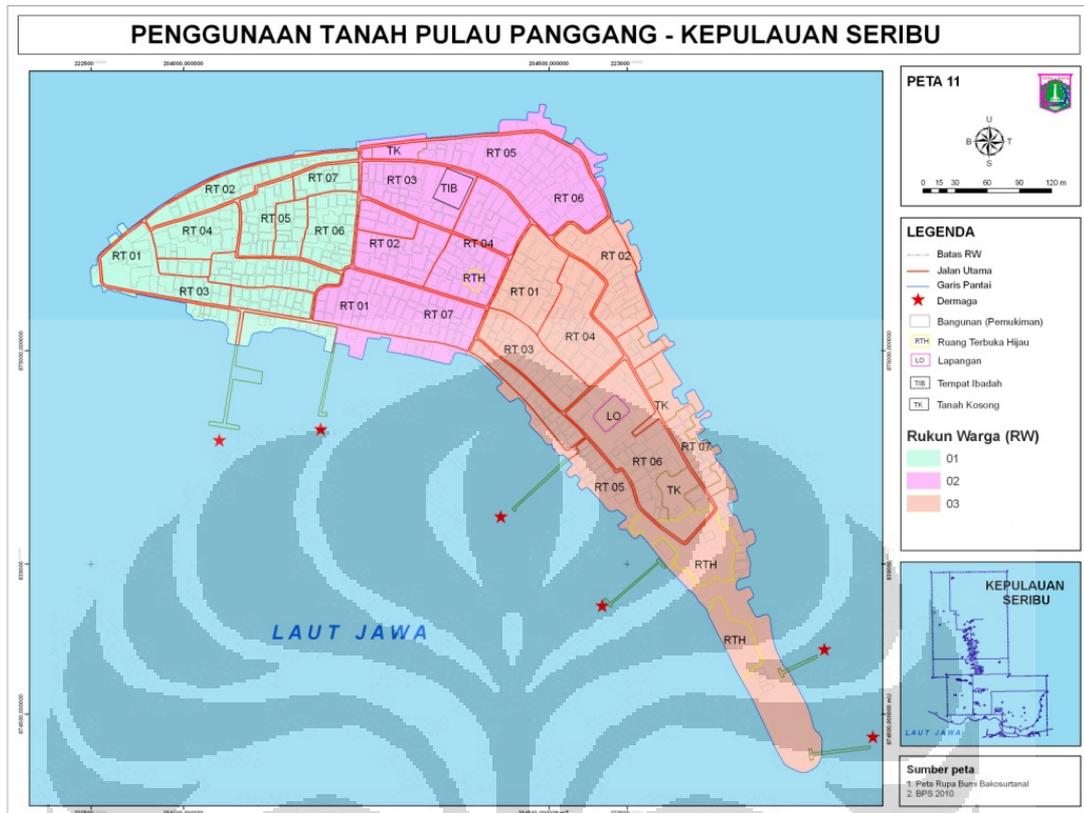
Laporan Bulanan Kel Pulau Panggang Tahun 2011 bulan Maret.

Laporan Bulanan Kel Pulau Panggang Tahun 2012 bulan Februari.

Undang – Undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial



Lampiran 1 : Peta



Lampiran 2 : Pedoman Wawancara

Karakteristik Informan

Nama :

Usia :

Jenis Kelamin :

Pendidikan Terakhir :

Pekerjaan :

Pekerjaan Suami/Istri Anda :

1. Masalah sampah yang paling menonjol di RW 01 Kelurahan Pulau Pangang.
2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi masalah sampah
 - a. Perilaku masyarakat dalam mengelola sampah
 - Timbunan (Jumlah dan Jenis Sampah)
 - Pewadahan
 - Pegumpulan/Pemindahan LPS
 - Pemrosesan
 - Pemusnahan
 - b. Faktro-faktor yang mempengaruhi perilaku masyarkat dalam mengelola sampah.
3. Regulasi, Kebijakan atau Program yang terkait dengan masalah sampah
 - Masyarakat
 - Pemerintah
 - Swasta
4. Potensi Komunitas yang bisa dimanfaatkan
 - Modal Fisik.
 - Modal Finansial.
 - Modal Lingkungan.
 - Modal Teknologi.
 - Modal Manusia.
 - Modal Sosial.

Lampiran 3 : Transkrip Wawancara

No		Kutipan Wawancara	Hasil Temuan	Kesimpulan
1	Masalah Sampah	<p>“Hanya 10 % lah sampah yang di buang ke LPS”</p> <p>“Banyak lah (sampah) yang bertebaran. Bisa 80-75 % lah.” (SY, Agustus 2012)</p> <p>“Itu tempat pembuangan sampah (LPS) sejak saya bangun pada tahun 2002 tidak penuh-penuh sampai sekarang.” (MN, Agustus 2012)</p> <p>“Di tempat dermaga ada yang bolong, sebelah utara. Di RT 7 lokasinya. Mana yang peduli. Lihat itu sampah itu di situ, udah baunya. Udah nga sedap dicium, baunya juga.” (HR, Agustus 2012)</p> <p>“Entar kalau ada angin beterbangan sampahnya. Kita lah yang dekat yang dapat, baunya. Apalagi sisa nasi yang basah itu yang berhari-hari di rumahnya, kalau dia buang ke situ, udah ke sini baunya. Abis dia mau buang kemana lagi, nga ada tempatnya” (NJ, Agustus 2012)</p> <p>“Kalau sini, nga terasa kalau bau ma. Soalnya kebanyakan sampahnya rumput-rumput doang” (MK, Agustus 2012)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebanyak 80% sampah bertebaran di lingkungan sekitar. 2. Dalam kondisi tertentu menimbulkan bau 	Sebanyak 85 % sampah rumah tagga masyarakat RW 01 Kelurahan Pulau Panggang pada Tahun 2012 tidak berakhir di Lokasi Pembuangan Sampah (LPS), tetapi di sekitar pemukiman warga dan di laut. Kondisi ini menyebabkan bau yang tidak enak.
2	Faktor Yang Mempengaruhi Masalah Sampah			
2.1	Faktor Manusia dan Sosial			
2.1.1	Perilaku			
2.1.1.1	Timbunan	“Paling satu emberlah sehari. Kebanyakan yang kering seperti kantong plastik” (SH, Agustus 2012)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rata setiap rumah tanggung 	

		<p>“Kalau sehari 1 jergen ada juga, 1 ember.” (NJ, Agustus 2012)</p> <p>“Paling satu emberlah sehari. Kebanyakan yang kering seperti kantong plastik” (SH, Agustus 2012)</p>	<p>menghasilakan 1 jergen sampah setiap hari.</p> <p>2. Sebagian besar sampah adalah sampah anorganik.</p>	
2.1.1.2	Pewadahan	<p>“Masayarkat ya nampungnya di kantong plastik. Atau nyapu langsung buang” (SY, Agustus 2012)</p> <p>“Kalau sampah sore, pagi, langsung dibuang, nga ditampung. Misalnya sore ada sampah, pagi disapu lagi, langsung dibuang” (SH, Agustus 2012)</p> <p>“Kalau di sini jadi satu aja, yang kering dan yang basa. Abis tempat sampahnya nga ada. Tempat sampahnya bikin sendiri dari jerigen.” (NP, Agustus 2012)</p> <p>“Langsung dicampur sih. Soalnya tempat sampahnya ya model itu tu.” (MK, Agustus 2012)</p> <p>“Dicampur aduk. Kalau di Pulo ma nga ada yang organik nonrganik. Jadi dicampur organik dan non organik. Jadi satu disitu dia ma.” (HR, Agustus 2012)</p> <p>“Nga dipisahin. Taunya dia ma jadi sampah buang” (HL, Agustus 2012)</p> <p>“Tidak dipisahin, jadi satu. Di sini siapa yang mau begitu, malas. Tidak ada untungnya juga sih.” (SY, Agustus 2012)</p> <p>“Digabung. di sini nga ada yang milah-milah itu.” (MN, Agustus 2012)</p> <p>“Kalau di Pulo dicampur, organik dan nonorganik jadi satu. Dibilang juga (untuk dipisahin) cuma masyarakat dibuang aja jadi satu” (SH, Agustus 2012)</p> <p>“Sampahnya tidak dipisahin. Kemungkinan besar mereka nga tau padahal kita sudah sering beri tahu, mana sampah organik dan sampah non organik” (SB, Agustus 2012)</p>	<p>1. Masyarakat mewadahi sampah mereka di tempat sampah yang mereka buat sendiri.</p> <p>2. Tidak ada tempat sampah organik dan anorganik.</p> <p>3. Sampah organik dan anorganik tidak dipisahkan saat pewadahan.</p> <p>4. Sebagian sampah mereka langsung dibuang tanpa ditampung di pewadahan terlebih dahulu.</p> <p>5. Pemimpin masyarakat (RW) menganggap pewadahan tidak membawa keuntungan.</p>	<p>1. 95 % masyarakat warga RW 01 Kelurahan Pulau Panggang pada tahun 2012 tidak memisahkan sampah organik dan anorgani saat diwadahi. Tidak adanya tempat sampah organik dan anorganik, adanya pandangan dari RW bahwa pewadahan tidak mendatangkan keuntungan menjadi penyebab.</p> <p>2. Bagi masyarakat yang rumahnya dekat dengan (Urukan), sampahnya langsung dibuang buang tanpa ditampung.</p> <p>3. Pewadahan yang dilakukan masyarakat Pulau Panggang adalah pewadahan individu.</p>

		<p>“Kalau dipisahkan (sampah organik dan nonorganik) belum” (SR, Agustus 2012)</p> <p>“Mau kering, basah di situ aja” (NJ, Agustus 2012)</p> <p>“Kalau saya pisahan mana sampah plastik yang bisak digunakan” (SB, Agustus 2012)</p> <p>“Ya kalau semacam sampah kopi, kan bisa kita pisahkan buat bikin dompet. Trus sampah plastik juga kita gunakan. Kalau semacam sampah nasi atau bekas sayur-sayuran itu dibuang. Tidak digunakan. Kalau sedotan juga bisa kita gunakan” (AS, Agustus 2012)</p> <p>“Kalau sampah sisa nasi, perut ikan, langsung dibuang ke laut. Kalau ngga dibuang bau. Kalau yang lain ditaruh aja di tempat sampah, kalau udah penuh, buang ke urukan.” (AS, Agustus 2012)</p>		
2.1.1.3	Pengumpulan/Pengangkutan	<p>“Masyarakat membuang khusu di urukan, dia punya lokasi 15 x 8, contohnya kan begitu.” (HR, Agustus 2012)</p> <p>“bisa lah 20 % (yang buang ke LPS). Itu pun kalau sampah banyak sekali, semisal gedoran rumah, kalau di (urukan) orang udah penuh dilemparkan ke LPS. Sisanya ke tempatnya masing-masing urukan” (HR, Agustus 2012)</p> <p>“di RW satu kan sudah ada tempat pembuangan sampah tu, cuma kebanyakan warga itu membuangnya nga ke sana, jadi di sana itu nga penuh-penuh. Jadi membuangnya itu, kalau yang pada punya urukan di laut dibuang di urukannya. Terkadang juga buang ke laut.” (HL, Agustus 2012)</p> <p>Masyarakat buangnya sembarangan. Sudah kita adain tempat pembuangan sampah sama aja. Mereka buat tempat dan dibuang sampah. Jadi nga peduli kalau di RW 1 tentang sampah. (FD, Agustus 2012)</p> <p>“Rata-rata 35% lah yang buang ke LPS. Tapi itu hanya RT 3, 5 dan 4. Cuma tiga RT. Paling 35-40 % lah yang buang ke situ. Kalau saya lihat rata-rata di pinggir pantai semua. Rata-rata 30 % lah yang buang ke laut” (FD, Agustus 2012)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagian besar masyarakat membuang sampah ke urukan yang akan digunakan rumah tempat tinggal, baik urukan mereka sendiri atau urukan orang. 2. Sebagian masyarakat membuang sampah ke laut 3. Hanya sedikit membuang sampah ke LPS (Lokasi Pembuangan Sampah) 	<p>Masyarakat RW 01 Kelurahan Pulau Panggang pada Tahun 2012 melakukan pengumpulan/pengangkutan sampah rumah tagga mereka ke tiga tempat: Urukan, LPS dan Laut.</p> <p>Sebanyak 75 % masyarakat RW 01 Kelurahan Pulau Panggang pada Tahun 2012 membuang sampah rumah tagga mereka ke urukan</p> <p>Sebanyak 5 % masyarakat RW 01 Kelurahan Pulau Panggang pada Tahun 2012 membuang sampah rumah</p>

		<p>“Kenapa demikian, karena kesadaran masyarakat itu kurang. Masyarakat buang sampah seenaknya saja. Padahal sudah kita sediakan tempat sampah akhir itu, ternyata nga sampai ke sana masyarakat buang. Di pekarangan orang juga dia buang, tempat reklamasi, urukan.” (MN, Agustus 2012)</p> <p>“Saya pikir kalau sekarang, tidak ada sekali yang buang sampah ke sana. Kalau 10 % pun jarang yang buang ke situ (MN, Agustus 2012)</p> <p>“Di sini masyarakatnya buang sampah ke laut. Ada juga yang di urukan. Tapi lebih banyak yang di urukan. Sekitar 70 %.” (SH, Agustus 2012)</p> <p>“Kalau dia punya lahan, ya dia buang ke situ. Lebih banyak yang buang ke urukan dari pada ke laut. Yang ke urukan paling 70 %, 30 % nya ke laut.” (SB, Agustus 2012)</p> <p>“Memang di sini masih buang sampah sembarangan. Ada juga yang di buang di bawah rumah seperti lagun, ada genangan air, di situ juga ada sampah. Kesadarannya masih kurang.” (SR, Agustus 2012)</p> <p>“Buang ke laut kalau sini ma”. (NP, Agustus 2012)</p> <p>“Kalau dibagi 100% itu sih kebanyakan ke urukan. Minimal 75% kali lah, nga terlalu banyak.” (NP, Agustus 2012)</p> <p>“Pembuangannya di situ tu. Nga ada pembuangannya. Ada yang ke laut. Banyak yang rebut sih, nga ada pembuangannya, sampah. Pada buangnya ke laut aja.” (NJ, Agustus 2012)</p> <p>Ada yang (buang) di belakan, di depan, ada juga yang dilempar aja begitu. (Agustus, 2012)</p> <p>“Padahal sudah dibikin tempat ini nih, tapi warganya buangnya sembarangan.” (MK, Agustus 2012)</p>		<p>tagga mereka ke laut</p> <p>Hanya 15 % masyarakat RW 01 Kelurahan Pulau Panggang pada Tahun 2012 membuang sampah rumah tagga mereka ke LPS</p>
--	--	--	--	---

		<p>“Kalau sampah sisa nasi, perut ikan, langsung dibuang ke laut. Kalau ngga dibuang bau. Kalau yang lain ditaruh aja di tempat sampah, kalau udah penuh, buang ke urukan.” (AS, Agustus 2012)</p> <p>“Masyarakat di sini buang sampahnya kalau tidak di laut, di urukan” (AS, Agustus 2012)</p>		
2.1.1.4	Pemrosesan	<p>“Ada (yang memanfaatkan) sampah kopi kapal api, kopi mix, terus.., banyak kegunaannya itu. Bakal tas, dompet. Tapi marketingnya ini, nga ada. (HR, Agustus 2012)</p> <p>“Kan ada sosialisasi perwakilan warga. Ada sosialisasi masalah kerajinan tangan. Jadi sampah yang bekas kopi, minyak, bimoli yang saset itu, dikumpulkan. Memang waktu itu pernah diajukan juga, disosialisasi untuk dikumpulin, nanti dibawa ke Pulau Pramuka, tempat anu, buat tas-tas itu. Dibeli katanya ma. Cuma sekarang sudah nga ada lagi. Dipanggil musim-musiman ma di Pulo. Pertamanya doang. Sebulan dua bulan dan seterusnya ma udah (tidak jalan lagi).” (HL, Agustus 2012)</p> <p>“Sebenarnya (program) dari masyarakat juga ada, seperti sampah kopi, plastik, dibuat tas, macam-macam lah” (SY, Agustus 2012)</p> <p>“Lagian kalau barangnya jadi mau dibawa kemana? Siapa yang mau nampung?” (SY, Agustus 2012)</p> <p>“Memang ada yang manfaatin, sampah kering. Seperti sampah kantong, ada yang buat tas, buat topi.” (NJ, Agustus 2012)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sampah-sampah seperti kontong kopi, bekas miyak bimoli, kantong plastik dll. Dimanfaatakan oleh sebagian masyarakat untuk tas. 2. Sampah-sampah seperti bakas minuman mineral dll dijual oleh sebagian masyarakat. 3. Untuk mereka yang memelihara kambing, memanfaatkan sampah sisa-sisa sayuran dan nasi sisa untuk makanan kambing mereka. 	Hanya 5 % masyarakat RW 01 Kelurahan Pulau Panggang pada Tahun 2012 yang memanfaatkan sampah.
		<p>“Kalau sampah-sampah kulit kol, tempat busuk, ada yang ngambil buat kambing” (NJ, Agustus 2012)</p> <p>“Aja juga yang ngumpulin aqua bekas untuk dijual” (HL, Agustus 2012)</p> <p>“Kalu yang manfaatin botol aqua ma banyak, pemulung lah.” (MK, Agustus 2012)</p>		

		<p>“Kemarin-kemarin ada yang buat dompet, tapi nga lama” (MK, Agustus 2012)</p> <p>“Sekarang nga ada lagi. Kalau saya ya tetap lakukan ini (membuat kerajinan tangan dari sampah)” (SB, Agustus 2012)</p> <p>“Ya kalau semacam sampah kopi, kan bisa kita pisahkan buat bikin dompet. Trus sampah plastik juga kita gunakan. Kalau semacam sampah nasi atau bekas sayur-sayuran itu dibuang. Tidak digunakan. Kalau sedotan juga bisa kita gunakan” (AS, Agustus 2012)</p> <p>“Kalau penghasilannya ma ngga tentu. soalnya kalau disini tu pak, rata-rata ada yang senang, dia pesan suruh kita buat. 100.000 sih ngga sampai.” (AS, Agustus 2012)</p> <p>“Mungkin karena satu kita ada kemauan. Keduanya kita jangan sampai sampah berkeliaran, jadi kita gunakan supaya dibutuhkan, bisa digunakan untuk bikin dompet” (AS, Agustus 2012)</p> <p>“Yang pertama ini tanggungjawab kita terhadap lingkungan. Yang kedau ya untuk masyarakat kita juga” (SB, Agustus 2012)</p>		
--	--	---	--	--

2.1.1.5	Pemusnahan	<p>“Ya itu nanti timbun di situ. Lama kelalaman ya ini , jadi tanah. Entar kan mereka bakar. Tiap hari kalau sampah penuh dibakar sama yang punya urukannya itu.” (HR, Agustus 2012)</p> <p>“Dibiarin aja begitu. dibakar itu, ada juga, cuma jarang. Ditinggalin aja. Lempar teng. Maka di sini dipanggil RW ter kumuh.” (HL, Agustus 2012)</p> <p>“Kalau yang rajin dibakar, kalau yang engga ya udah sampai seumur hidup di situ. Kalau sampah plastik kan nga bisa rusak. Sebagian besar dibakar sih.” (FD, Agustus 2012)</p> <p>“Kadang-kadang kalau udah penuh dibakar, ya kadang-kadang lah. Cuma kebanyakan dibiarin aja. Ini kan nanti hancur sendiri.” (SY, Agustus 2012)</p> <p>“Kalau kemarin masyarakat kita bakar. Setelah ada katanya larangan dibakar, ya dibuang aja begitu di pekarangan orang.” (MN, Agustus 2012)</p> <p>“Kalau saya secara pribadi banyak dibakar. Tiap hari kalau saya ma. Tapi kalau masyarakat lebih banyak dibiarin aja begitu” (SH, Agustus 2012)</p> <p>“Kalau nga dibakar, ditimbun. Bayak sekali yang ditimbun.” (SB, Agustus 2012)</p> <p>“Dibakar ya udah hilang sendiri. Kalau dibakarkan kan padat jadi tanah. Yang lainnya dibiarin aja gitu” (NP, Agustus 2012)</p> <p>“Itu kalau udah penuh dibakar.” (NJ, Agustus 2012)</p> <p>“Ya sampahnya hancur begitu begitu, nga diapa-apain. Maksud kita kan biar jadi tanah sampah itu. Lama-lama kita buang terus. Kalau memang banyak dibakar, nanti turun-turun.” (MK, Agustus 2012)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagian besar masyarakat memusnahkan sampah mereka dengan di timbun begitu saja. 2. Yang punya urukan di bakara biara menjadi tanah. 	<p>Masyarakat masyarakat RW 01 Kelurahan Pulau Panggang pada Tahun 2012 memusnahkan sampah mereka dengan 2 cara. Ditimbun begitu saja dan dibakar. Sebagian besara yang ditimbun dari pada dibakar.</p>
---------	------------	--	---	---

2.1.2	Predisposisi	<p>“Sebenarnya mereka tau kalau bisa bau, seperti buang pempers anak-anak, tapi tetap aja buang di urukan. Mereka juga tau kalau sampah bisa menyebabkan penyakit, sering kita arahkan kalau sampah itu bisa menyebabkan penyakit malaria, termaksud ISPA, tapi nga ngerti-ngerti juga. Tau tapi nga ngerti” (FD, Agustus 2012)</p> <p>“Kalau masyarakat sih udah tau kalau sampah bisa menyebabkan penyakit (SR, Agustus 2012)</p> <p>Kalau sampah harusnya ada petugasnya. Sampah kan nga boleh buang ke laut, pencemaran ikan kan lain. (MK, Agustus 2012)</p> <p>“Sampah dibuang sembarangan kan dasarnya penyakit.” (MK, Agustus 2012)</p> <p>“Kalau disini berat mas. Masyarakatnya nga perduli. Orang saya pernah RT jalan, terjun untuk minta kewarung-warung. Kalau ada yang ngasih ma ngasih, kalau yang ngerti ma. Kalau yang nga gerti ma sama aja begitu. Anggapannya untuk apa punya pemerintahan, punya kelurahan” (HL, Agustus 2012)</p> <p>“Mungkin dia berharap itu (sampah) menjadi tanggungjawab RT, RW, bukan tanggungjawab sendiri. Makanya buang-buang aja. Tapi sudah dikasi saran sih, tapi masyarakt tetap buang-buang aja” (SH, Agustus 2012)</p> <p>(Kalau harus buang ke LPS) yang harus didorong adalah program pemerintaa, RT, RW itu. Kalau dia mau kerjain programnya. Kita ya tetap mendukung” (SB, Agustus 2012)</p> <p>“Kalau dari sananya (Kelurahan) nga ngasih, ya nga mungkin. Kalau dari pemerintah ngasih, ya dilaksanain. Hanya di masyarakat doang. Paling sebulan 5 ribu pada ngasi, 10 ribu” (NJ, Agustus 2012)</p> <p>“Sampah di sini ma tanggungjawab masing-masing. Harusnya kan ada petugasnya (dari pemrintah)” (NJ, Agustus 2012)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat menyadari bahwa sampah dapat menimbulkan penyakit dan pencemaran laut. 2. Masyarakat memandang bahwa masalah sampah, terutama membayar petugas sampah menjadi tanggung jawab pemerintah (RT, RW dan Kelurahan) bukan masyarakat 3. Pemerintah (Kelurahan) memiliki dana untuk mengatasi masalah sampah. 	<p>Sebagian masyarakat mengetahui akan bahaya sampah.</p> <p>Mayarakat memandang bahwa pemerintah dalam dalam hal ini Kelurahan, RT, RW yang bertanggungjawab terhadap masalah sampah, terutama untuk membayar petugas sampah. Karena dia menganggap pemerintah, terutama Kelurahan mempunyai dana untuk hal itu.</p>
-------	--------------	---	---	---

		<p>“Ya kalau dibebani masyarakat lagi untuk membayar petugas. Untuk apa diadakan pemerintahan.” (MK, Agustus 2012)</p>		
2.1.3	Penguat	<p>“Bisa aja kita mengarahkan mereka itu (masyarakat), cuma ka ada petugasnya masing-masing RW. Mau kita kan di RW itu digerakan lagi petugasnya.” (HR, Agustus 2012)</p> <p>“Boleh kita mengerkan masyarakat (tanpa pemerintah), tapi apakah RW harus ngorban? (SY, Agustus 2012)</p> <p>“RW sudah sama sekali nga peduli. Malah kita (RT) yang dia bebakan. Harusnya kan itu program RW bukan RT. Kalau program RT kan khusus di warga kita aja kan. Udah, urus aja RT dia kata. Buat apa ada pengrus RW. Jangan ke RT lagi. Sebab kalau kita sudah cukup membantu.” (HR, Agustus 2012)</p> <p>“RW saya, RW 1 begitu mas, nga peduli. Paling RT-RTnya yang kompok anuin sampah. Di sini dipanggilnya nga maju-maju. Abis, bagaimana masyarakatnya mau peduli kalau RWnya nga peduli. Susah mas di sini RWnya nga peduli. Paling masing-masing RT yang peduli denganarganya.” (HL, Agustus 2012)</p> <p>Jadi nga peduli kalau di RW 1 tentang sampah. RWnya juga kurang peduli. Kalu di RT 3 sampai kemana pun saya yang ngurus. Saya sendiri aja. (FD, Agustus 2012)</p> <p>“Orang tugasnya pemerintah, masyarakat hanya membantu pemerintah. Kalau sekarang kordinatornya, pemerintah, tidak bergerak?. Jadi sebenarnya dari pemerintahnya itu kurang peduli pak” (SY, Agustus 2012)</p> <p>“Kalau mau ada kerja bakti, jangan hanya RW. Maksud kita pemerintah juga harus ada kan. Masa rakyat aja yang disuruh, pemerintahnya uncang-uncang kaki. Dia yang dapat gaji kita yang engga. Program kebersihan kan sudah menjadi program pemerintah pusat. Kita tau semua kan.” (SY, Agustus 2012)</p> <p>“Sebenarnya memungkinkan kita mengumpulkan RT/RW (untuk bergerak mengatasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. RT menganggap bahwa RW tidak peduli dengan masalah sampah di RW 01, karena itu adalah program RW. RT hanya bertanggungjawab di lingkup RTnya saja. 2. RW menganggap bahwa pemerintah dalam hal ini kelurahan tidak peduli dengan masalah sampah, padahal itu menjadi tugas Kelurahan. Masyarakat hanya bisa membantu kalau pemerintah sebagai koordinator bergerak. 3. LMK manganggap bahwa sampah adalah tugas utama pemerintah. Walaupun memungkinkan kita menggerakkan masyarakat. 	<p>Belum ada kerja sama antara RT, RW, LMK dan Kelurahan untuk menggerakkan masyarakat agar mengatasi masalah sampah secara bersama-sama, pada hal itu memungkinkan untuk dilakukan. Masing-masing saling melempar tanggungjawab.</p>

		<p>masalah sampah) dan mengesyampingkan Kelurahan. Tapi kelurahan tetap harus peduli karena wilayah dia. (MN, Agustus 2012)</p> <p>“Maksud saya kalau sampah itu kan, karena ini kampung dia sendiri, peduli lah dengan sampah itu kan. <i>Image</i> itu yang perlu dirubah.” (HS, Agustus 2012)</p> <p>“Petugas sampah itu masih jalan, itu di kelolah oleh masing-masing RW. Nanti RW bertanggungjawab ke kelurahan karena itu program RW. Kelurahan ini kan ada petugas kebersihannya (sendiri). Jadi kelurahan ini hanya sebagai koordinator.” (HS, Agustus 2012)</p>	<p>4. Kelurahan menganggap masyarakat terlalu membebankan pemerintah untuk mengatasi masalah sampah, bahahal itu menjadi tanggungjawab RW. Pemerintah hanya menjadi koordinator.</p>	
2.1.4	Modal Sosial	<p>“ya kalau masyarakat ma oke aja kalau di ajak Jum’at bersih, umpama kita kerja bakti, untuk ini, untuk sampah, ya semacam gotong royong lah, itu mereka mau aja. Yang penting mereka taunya ma ada minum, rokok, itu aja intinya kalau masyarakat” (HR, Agustus 2012)</p> <p>“Masyarakat nga mau. Maunya ada ininya (duit). Dikasi uang orok, ya nga maulah kalau Cuma uang rokok” (FD, Agustus 2012)</p> <p>Kadang-kadang kalau nga ada duitnya, walau RT, RW juga nga mau kerja, ngapain.” (SY, Agustus 2012)</p> <p>“Jadi setiap ada acara (masyarakat menganggap) ada duitnya. Ilmunya tidak pernah diserap. Jadi tujuannya dapat amplop” (SB, Agustus 2012)</p> <p>“Soalnya kebiasaan masyarakat sini kalau kita undang harus ada transport. Misalnya penyuluhan demam berdarah, kita undang. Trus kita sangkutin ke masalah sampah” (SR, Agustus 2012)</p>	<p>1. Untuk menggerakkan masyarakat membutuhkan dana operasional untuk: minum, rokok, cemilan.</p> <p>2. Masyarakat menganggap ada uang, setiap ada acara yang melibatkan mereka.</p>	<p>Ada norma yang berlaku di masyarakat RW 01 Kelurahan Pulau Panggang pada tahun 2012 bahwa setiap ada kegiatan yang melibatkan mereka pasti ada dananya dan merek pasti kebagian dana itu baik dalam bentuk minuman, rokok, cemilan atau uang (istilahnya amplop)</p>

		<p>“Biasanya ada uang. Kalau nga dikasi ada juga yang ngomong, nga dikasih ta.” (NP, Agustus 2012)</p> <p>“Ada juga yang keberatan sih (untuk kerja bakti). Kebanyakan nganggap suka ada dana dari sana gitu: dari Kelurahan, dari Kabupaten. Kalau kita bersihkan itu nga ada minuman-minumannya kan? Masa kita mau minum langsung ke rumah kita sendiri. Mana minumannya? Aqua. Ngga mungkin dari kantong mereka. Harusnya kan disediakan begitu. Ya cemilan.” (MK, Agustus 2012)</p> <p>“Masyarakat itu banyak membebankan ke pada Kelurahan. Tidak keluar dari dirinya sendiri. Apalagi kalau nga ada duitnya.” (HS, Agustus 2012)</p>		
2.2	Faktor Non Manusia			
2.2.1	Modal Finansial	<p>“Sampai sekarang sudah nga jalan, tersendat dana anggaran dari kelurahan itu, yang sebulan itu pegu (Rp. 150.000). Itu juga tiap 3 bulan sekali di potong uang pembinaannya/operasionalnya untuk mereka itu, yang ngangkut sampah, tadinya awalnya, tapi sekarang sudah nga peduli. (HR, Agustus 2012)</p> <p>“Sebenarnya dulu ada petugas sampahnya. Kendalanya itu, dari pihak kelurahan, pemerintahan. Dulu ma ngasi subsidi ke kita itu setiap bulan 150 ribu, sekaranag stop. Abis orang yang kerja ngangkut sampah itu mau makan apa?” (SY, Agustus 2012)</p> <p>“Dulu waktu saya masih jadi RW, petugas sampahnya jalan. Nga tau kenapa sekarang tidak ada lagi. Alasannya dana dari Kelurahan sudah tidak turun” (MN, Agustus 2012)</p> <p>“Semenjak setahun yang lalu sudah tidak ngangkut sampah lagi,. Gajinya ngga jelas. Kalau masyarakat sebulan itu ngasi, ya syukur. Kalau ngga?. Paling kita usaha lain. Dari kelurahan juga ngga ngasih. Dananya sih ada, kemungkinan ngga nyampe.” (HU, Agustus 2012)</p> <p>“Untuk pembiayaan, pembiayaan itu, dari RW itu ada menyisihkan perorang itu, lupa saya berapa itu. Ada itu. Tapi dari kelurahan juga. Dari Kelurahan (Rp.) 150.000</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap 3 bulan RT, RW dan LMK menyisihkan dan pembinaan untuk gaji petugas sampah, tapi karena dana dari Kelurahan sebesar Rp. 150.000/bulan tidak turun lagi maka petugas sampah tidak berjalan lagi. 2. Masyarakat keberatan membayar iuran restribusi kebersihan untuk sampah, kecuali mereka yang punya warung/dagangan. 3. Sebagian besar masyarakat berpenghasilan 	<p>Tidak adanya petugas sampah menyebabkan tidak ada yang mengangkut sampah warga ke LPS. Ini disebabkan karena tidak ada subsidi dari kelurahan dan masyarakat keberatan untuk membayar iuran untuk sampah karena kondisi ekonomi masyarakat yang sebagian besar nelayan tidak menentu, kecuali mereka yang berpenghasilan lebih.</p>

	<p>tambah dari swadaya masyarakat. Dari RT (Rp.) 25.000/bulan. Itu masih jalan.” (HS, Agustus 2012)</p> <p>“Waktu bulan-bulan yang lalu ma ada (Petugas sampah), tapi sekarang sudah nga ada. Nga tau kenapa” (SH, Agustus 2012)</p> <p>“Kalau dulu ada petugasnya, tapi sekarang nga jalan.” (SB, Agustus 2012)</p> <p>“Kalau di Pulo Pramuka ma ada yang ngurusin, kalau di sini ma nga ada. Tinggal dibayar aja perbulannya berapa” (NP, Agustus 2012)</p> <p>“Kalau memang ada petugas yang ngumpulin pada mau. Cuma nga ada. Biasanya kan ada yang ngambil setiap hari. Nga ada sekarang ma. Nga ada uang operasionalnya kali. Hanya masyarakat doang yang ngasih. (NJ, Agustus 2012)</p> <p>Nga ada petugasnya sih. Petugas yang bawaain dari rumah, pakai gerobak gitu. Harusnya kan gitu. Harusnya ada petugasnya. Kalau saya lihat di sebereng sih ada. Seperti Puau Harapan, Pulau Kelapa itu.” (MK, Agustus 2012)</p> <p>“Kalau kemarin-kemarin ma ada yang ngangkutin, tapi sekarang tidak lagi.” (AS, Agustus 2012)</p> <p>Hanya tiga RW yang berjalan, RW 02 04 dan 05 masih berjalan (pengakutan sampahnya), itu dari RW sendiri yang bayar. Yang duanya lagi (RW 01, dan 03 (pengangkutan sampahnya sudah) tidak berjalan.” (AM, Agustus 2012)</p> <p>“Karena disini tidak ada geraknya. Petugas RW melempem, ya kepala seksinya juga tidak dipercaya memegang anggaran, dikelola oleh lurah (sendiri), ya itu dia akhirnya begitu” (AM, Agustus 2012)</p>	<p>sebagai nelayan yang tidak menentu: Kadang dapat kadang tidak, tergantung cuaca. Paling kecil kalau dapat Rp. 20.000 paling besar Rp 50.000 sampai 150.000 (tapi ini jarang)</p>	
--	--	---	--

	<p>“Kalau uangnya dari masyarak, keberatan. Dari kita aja pemimpin. Kalau mau ada kerja bakti, kita upayakan mereka. Dia kan perlo ngerokok, perlu minum, ya harus kita ada pengeluaran” (HR, Agustus 2012)</p> <p>“Kalau disini berat mas. Masyarakatnya nga perduli. Orang saya pernah RT jalan, terjun untuk minta kewarung-warung. Kalau ada yang ngasih ma ngasih, kalau yang ngerti ma. Kalau yang nga gerti ma sama aja begitu” (HL, Agustus 2012)</p> <p>“Kalau iuran dari masyarakat nga mungkin. Udah banyak iuran. Masyarakat kasihan.” (SY, Agustus 2012)</p> <p>“Tapi waktu saya menjadi RW saya tidak bebaskan masyarakat. Sebulan berapa gitu untuk kebersihan. Karena masyarakat, jangankan untuk sampah, untuk RK (Rukun Kematian) yang sebulan Rp. 1000 tidak berjalan. Padahalkan untuk kita semua. Apalagi untuk sampah.” (MN, Agustus 2012)</p> <p>“Kalau masyarakat diajak untuk iuran (sampah) nga mau mereka. Paling yang punya warung. Soalnya masyrakat sampahnya nga pernah diangkat, hanya yang punya warung aja. Sampahnya banyak. Kalau masyarakat setiap hari buang sendiri sampahnya, petugasnya nga pernah angkat. Mungkin yang punya warung ngasih uang <i>tip</i> untuk yang ngangkatnya itu. Kalau masyrakat ma nga.” (SH, Agustus 2012)</p> <p>“Kalu masyarakat yang bayar (petugas sampah) nga mau. Mendingan buang sembarangan, ia. (MK, Agustus 2012)</p> <p>“Sejak 2009 RT/RW sudah tidak lagi menarik iuran kepada warganya untuk biaya mengangkut sampah.” (AM, Agustus 2012)</p>		
--	--	--	--

		<p>“Kalau penghasilan di sini kebanyakan nelayan. Nga tentu mas. Tergantung alamnya di sini ma. Walaupun alamnya teduh kalau ikannya nga makan, kadang-kadang kosong. Kadang-kadang 20 ribu sehari, kadang-kadang kosong, 20 ribu ke atas. Kalau alamnya lagi musim angin mas, kadang-kadang dua bulan, kemarin enam bulan mas nelayannya nga bisa pergi (melaut). Yang pergi itu kecuali udah nekat. Abis kalau dirumahnya nga ada apa-apa.” (HL, Agustus 2012)</p> <p>“Rata-rata pendapatan 2 juta lah sebulan. Kalau sehari kadang-kadang 30 ribu, 200 ribu, 50, nga nentu. Ya rata-ratanya dua juta lah” (FD, Agustus 2012)</p> <p>“Dari swadaya masyarakat nga ada. ya penghasilan masyarakat paling berapa. Paling beberapa orang aja. Sedangkan petugah sampahnya itu nga sendiri, berdua.” (SY, Agustus 2012)</p> <p>“Kalau pendapatan nelayan nga tentu sih. Tergantung cuaca: kalau lagi dapat ya dapat, kalau lagi nga, ya engga sama sekali” (SH, Agustus 2012)</p> <p>“Jadi kalau nelayan berbeda dengan petani. Kalau nelayan, hari dapat, hari habis. Besok cari lagi” (SB, Agustus 2012)</p> <p>“Kalau pendapatan nga tentu mas. Ada yang 50 ribu sehari. Kadang-kadang kalau lagi berarus suka nga dapat. Kalau ikannya banyak ya banyak, pendapatannya gede.” (NP, Agustus 2012)</p> <p>“Kalau nelayan pendapatannya sehari bisa 30, 50 sehari, paling kecil ya 20.” (NJ, Agustus 2012)</p> <p>Kalau nelayan nga bisa gitu jalannya. Pendapatan kita juga sehari kadang-kadang dapat, kadang-kadang engga. Kalau alamnya lagi bagus kadang (Rp.) 150 (ribu) penghasilannya(per hari). Kalau sekarang lagi banyak (ikan) tongkol, kalau kemarin-kemarin sedikit ngelu lah. Jadi pasarnya paceklik” (MK, Agustus 2012)</p>		
2.2.2	Modal Teknologi	<p>“Di sini ada diadakan mesin pencacah, cuma mesinya nga digunai. Kemarin ada di RW 1. Nga tau dari dana apa itu. Cuma sekarang sudah ditarik kembali, karena dewannya sudah ganti. ke RW 2 atau RW 3 gitu.” (HL, Agustus 2012)</p>	1. Alat pencacah sampah/ <i>Incinerator</i> yang sebelumnya	Modal teknologi dalam bentuk mesin pembakar/ <i>Incinerator</i>

		<p>“Kalau waktu itu ada alat penghancurnya, tapi sekarang nga ada. Itu tempatnya. (MK, Agustus 2012)</p> <p>Tahun kemarin (2011) kita dapat mesin pembakar sampah, sekarang ada di RW 03. Tapi sampai sekarang belum jalan” (AM, Agustus 2012)</p> <p>“<i>Incinerator</i> di sini di Pulau Panggang ada satu, di Pulau Pramuka juga ada satu. Jadi ada 2 <i>incinerator</i>.” (HS, Agustus 2012)</p>	<p>2. tidak termanfaatkan. Pada tahun 2011 ada bantuan alat pencanah, tapi belum berfungsi.</p>	<p>sampah termanfaatkan. tidak</p>
2.2.3	Modal Lingkungan	<p>“waktu itu lasnya 9 ha. Tapi sudah nambah karena reklamasi, 9 lebih. Masyarakat tidak mau pindah, Karena dia pikir dekat sama orang tua, walau pun lahannya sudah kurang” (HR, Agustus 2012)</p> <p>“Saya sering nanya kenapa nga pindah aja. Disini kan udah nga ada tanah. Alasannya nga betah, jauh dari orang tua” (FD, Agustus 2012)</p> <p>“Istilah orang Pulo ma, makan nga makan ya harus kumpul. Lagian kalau mau ke luar harus ada duit. beli tanahnya. Jadi di sini ka dia nguruk” (SY, 2012)</p> <p>“Ada masyarakat kita, jangan ke Jakarta, antara dari Pulo Panggang ke Pulo Pramuka aja nga mau. Karena dari dulunya ada istilah ‘makan nga makan ngumpul’. Makanya walaupun dinguruk yang penting di Pulo panggang” (MN, Agustus 2012)</p> <p>“Sebabnya untuk kebutuhan masyarakat, buat rumah, tempat berlindung. Kalau cara beli kan mahal. Kalau seperti ini kan batu karang dia ambil sendiri, nanti dia timbun (dengan sampah).” (SY, Agustus 2012)</p> <p>“Di sini kan butuh lahan, keterbatasan lahan.” (SB, Agustus 2012)</p> <p>“Di urukan. Jadi bikin rumah di samping laut. Biasanya gitu. Dikumpulin dulu. Ke laut jarang juga. Kebanyakan (buang sampahnya) ke urukan untuk bikin rumah di pinggir pantai” (NP, Agustus 2012)</p> <p>“Untung ada yang butuh tempat tinggal, itu yang membantu penyelamatan sampah,</p>	<p>1. Luas wilayah Pulau Panggang hanya 9 ha, tapi sekarang bertambah.</p> <p>2. Masyarakat lebih senang kumpul dengan keluarga. Ada istilah ‘Makan nga makan yang penting kumpul’</p> <p>3. Banyak masyarakat yang menguruk/reklamasi pantai</p> <p>4. Bagi masysrakat harga tanah untuk rumah mahal disbanding merek nguruk.</p>	<p>Luas wilayah Pulau Panggang makin bertambah karena banyak masyarakat yang reklamasi pantai untuk rumah. Kondisi ini karena masyarakat lebih senang tinggal berdekatan dengan keluarga mereka. Ditambah harga tanah untuk rumah yang menurut mereka mahal disbanding mereka nguruk.</p>

		<p>kalau abang lihat di situ sampah dibuang di urukan” (AM, Agustus 2012)</p> <p>“Mungkin kendala ekonomi. Kalau pindah kan butuh dana lagi. Di pramuka sekarang sudah puluhan juta, beli tanah untuk rumah. Kalau ngurukan masyarakat, sedikit-sedikit.” (SH, Agustus 2012)</p> <p>Kalau di pramukan sudah punya orang semua. 1 kapling bisa 100 juta. Paling murah itu 70-80 juta.” (MK, Agustus 2012)</p>		
2.2.4	Modal Fisik	<p>“Alasanya (tidak buang ke LPS) jaulah, panaslah, banyak alasannya. Buangnya juga di sini nyolong-nyolong, magrib, subuh,sembunyi-sembunyi..” (FD, Agustus 2012)</p> <p>“Mungkin jauh. Lebih dekat buang ke urukan” (SH, Agustus 2012)</p> <p>“Semua petugas juga, LMK juga suru buang ke LPS. Cuma masyarakatnya lebih dekat aja (buangnya)” (SH, Agustus 2012)</p> <p>Kalau di sana (LPS) ma jauh.” (NJ, Agustus 2012)</p> <p>“Soalnya disana (LPS) kan jauh. Habis dia mau buang ke mana?” (NP, Agustus 2012)</p> <p>“Kalau saya buangnya kemari (LPS). Soalnya tempat (LPS) dan rumah kan berdekatan, kalau yang lain kan jauh. Kebanyakan tu yang di seberang sana tu ya, taru lah jaraknya 25-50 meter, kebanyakan buangnya nga kemari (LPS), (tapi) di lokasi yang cepat, dekat aja gitu. Contohnya itu kan kosong (urukan), di situ dibuang. (MK, Agustus 2012)</p> <p>“Kalau RT, RW bentur terus. Bu sadah ada tempatnya kalau bisa buang lah di tempatnya. Cuma namanya warga kan nga begitu. Yang satu ngarti, yang lain? Agak jauh lah, gitu alasannya” (MK, Agustus 2012)</p> <p>“ya jadi itu, malas buang ke sana (LPS). Jauh” (AS, Agustus 2012)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi Pembuangan Sampah (LPS) jauh dari rumah warga. 2. Masyarakat membuang sampah ke lokasi yang lebih dekat dengan rumah mereka 	<p>Jauhnya akses ke Lokasi Pembuangan Sampah (LPS) dari rumah warga menyebabkan mereka membuang sampah rumah tangga mereka ke lokasi yang lebih dekat, seperti urukan dan laut.</p>
2.3	Regulasi, Kebijakan dan Program			

2.3.1	Program dan Kegiatan	<p>“Ada juga sosialisai tentang sampah, dari kelurahan, instansi-instansi, puskesmas” (SH, Agustus 2012)</p> <p>“Sebenarnya itu sering disosialisasikan oleh dinas Kesehatan. Tapi sosialisasinya itu tidak dibarengi dengan kegiatan yang sesungguhnya. Kalau memang mau, praktekin biar mereka tau. Jangan cuma di ruangan di kasi tau.” (SB, Agustus 2012)</p> <p>“Kita sih sering sosialisasi, penyuluhan, cuma karena di sini terbentur lahannya nga ada, jadi orang juga bingung mau buang ke mana. Kemarin juga kita kunjungan dengan dinas kesehatan bagian malaria, sekalian sosialisasi tentang penyakit diare” (SR, Agustus 2012)</p> <p>“Kalau kita penyuluhannya rutin, karena kita jumantik. Seminggu sekali untuk jumantik. Kita sebulan 2 kali turun kelapangan, karena kita meliha sampah ya kita spontan kasi penyuluhan. Kita juga punya jadwal, tapi terbentur anggaran untuk ngundang. Tapi kalau untuk kita bicara langsung, itu sering kita. Jadi kalau kita lihat sampah sembarangan kita kasi penyuluhan. Penyuluhan itu kan kita nga harus ngumpul orang banyak. (SR, Agustus, 2012)</p> <p>“Kalau program sosialisasi ada juga sih. Cuma nga setiap bulan. Dari bagian posyandu, puskesmas.” (NJ, Agustus 2012)</p> <p>“Ada sosialisai ma. Dari anak kuliahan, dari kelurahan, dari kabupaten. Itu sosialisai tentang sampah” (NP, Agustus 2012)</p> <p>“Kadang-kadang ada pelatihan (cara membuat kerajinan tangan dari sampah) dari Jakarta, dari negara luar. (AS, Agustus 2012)</p> <p>“Tahun 2011 tuh sering ada kerja bakti. Tapi ini saya perhatiin belum ada lagi. Biasaya RT RW ngundang.” (MK, Agustus 2012)</p> <p>“Jarang ada program (kerja bakti di sini) kalau dari atasan nga anuin, nga bakalan ada. Biasanya setiap Jum’at. Sekarang ma nga ada.” (NJ, Agustus 2012)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi tentang sampah sudah sering dilakukan baik oleh Kelurahan, Posyandu, Puskesmas, Sudin Kesehatan dan Mahasiswa. 2. Pelatihan untuk membuat kerajinan tangan juga pernah diadakan untuk masyarakat. 3. Program Jum’at bersih. Tapi sekarang sudah tidak jalan lagi di RW 01. 4. Setiap ada program atau kegiatan yang melibatkan masyarakat, masyarakat sering diberi uang. 5. Program sampah yang dijalankan hanya sebatas proyek 	<p>Sudah banyak program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat tentang sampah. Hanya saja, program-program/kegiatan-kegiatan tersebut membiasakan memberikan uang kepada masyarakat.</p> <p>Program yang terkait dengan masalah sampah hanya berorientasi proyek.</p>
-------	----------------------	---	---	---

		<p>“Program kita untuk mengatasi masalah sampah itu ada Jumat bersih. Khusus di Pulau Paramuka ada laut bersih. UPT itu hanya menempatkan PHL merek di sini.” (HS, Agustus 2012)</p> <p>“Kalau setiap kegiatan ya pasti ada duitnya. (MK, Agustus 2012)</p> <p>“Pemerintah sendiri, selalu mengajarkan masyarakatnya bodoh. Kenapa? Karena setiap kali ada acara, sosialisasi, pemerintah selalu memberikan uang, uang dan uang.” (SB, Agustus 2012)</p> <p>Jadi hanya sebatas proyek aja. Dimanfaatkan atau tidak, nga jadi masalah” (MN, Agustus 2012)</p> <p>“saya sering bilang agar Pulo seribu jangan jadi objek proyek. Saya nga mau masyarakat disini jadi wayangm. Mau saya masyarakat diajak, diberitahu. Jangan hanya mengejar proyek aja” (SB, Agustus 2012)</p>		
2.3.2	Kebijakan dan Regulasi	<p>“Pemilihan RT RW juga ada duitnya. Soalnya suara yang diambil. Suara satu aja bisa menentukan masa depan. Nah! Pemilihan RT RW itu, apalagi pemilihan pejabat tinggi. Waktu itu saya ya, saya buka terus terang aja pak. Ada (si A) yang datang ke saya waktu pemilihan RW, dia bilang kalau bisa pilih RW yang ini aja ya. 3 keluarga dikasi (Rp.) 100 (ribu). Kalau uang entar dulu saya bilang, soalnya saya belum pasti (pilihannya). Terus besoknya itu mau pemilihan, malamnya (si B) datang ngasi pego (Rp. 150.000) untuk 3 keluarga. Akhirnya kita ambil (tawaran si B) satu orang gocap (Rp. 50.000). Kita kan bisa hitung. (Pemilihan) RT tidak punya uang, mi. Uang (Rp.) 10.000 mi 5. Yang penting pilih suara dia. Berkorban dulu. Semua begitu.” (MK, Agustus 2012)</p> <p>“Apalagi saat pemilihan RT/RW. Siapa yang punya duit ya bisa jadi RT/RW. Calon ketua RT/RW harus mengeluarkan dan untuk masyarakat agar dia terpilih.” (AM, Agustus 2012)</p> <p>“Dulu ada Sudin Kebersihan. Entah bagaimana Sudin Kebersihan itu sudah nga ada lagi. Karena yang urgen di Pulau itu masalah sampah, akhirnya dari dinas terbentuk</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya praktek politik uang dalam pemilihan langsung RT, RW dan Gubernur. 2. Suku Dinasa (Sudin) Kebersihan Kabupaten Kepulauan Seribu telah dihapus. 	<p>Sistem demokrasi yang tidak terkontrol sehingga melahirkan praktek <i>many politic</i> dan penghapusan Suku Dinas Kebersihan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu turut memengaruhi masalah sampah.</p>

		lah UPT. UPT itu adalah pengganti dari Sudin.” (HS, Agustus 2012) “Dulu ada Sudin Kebersihan. Entah bagaimana Sudin Kebersihan itu sudah nga ada lagi.” (HS, Agustus 2012)		
3.3	Modal Sosial	“Paling yang sering membantu masyarakat dari CNOOC. LMK juga, ya Kelurahan juga bantu” (SH, Agustus 2012) “Kalau CNOOC punya program, punya dana untuk membantu masyarakat. Makanya harus kita kejar biar jatuh ke kita. Sekarang kan engga. SINOX itu pingin masyarakat langsung menghadap. Kita pernah ngajui untuk mesin jahit, dapat.” (SB, Agustus 2012) Saya juga punya kelompok di Samo-samo, jadi setiap minggunya saya ke sana (Pramuka), saya praktek” (AS, Agustus 2012)		CNOOC merupakan perusahaan minyak yang sering menyalurkan CSR (Coorporation Social Responsibility) mereka ke masyarakat Pulau Panggang.
3	Aset Komunitas			
3.1	Modal Manusia	Mereka sebagian bisa, orang pulau panggang. Dari pada dia nganggur dia bilang begitu, maka dia buat taslah.” (HR, Agustus 2012) “Kalau di RW 01 ada Ibu Sumiyati, Aang dan saya yang masih buat ini (kerajinan tangan dari sampah). Yang bisa juga, tapi sudah nga ada lagi” (AS, Agustus 2012) “Kalau iurannya lancar, selagi kita ada umur ya kita kerjain” (HU, Agustus 2012)		Beberapa ibu-ibu rumah tanggang mempunyai keahlian untuk membuat kerajinan tangang dari sampah. Petugas sampah siap bekerja lagi jika gajinya lancar.
3.2	Modal Lingkungan	Di Pulau Panggang juga punya dua LPS, di RW 01 dan RW 03. Di RW 02 sudah penuh, tidak ada lagi lokasinya. Kita juga punya gerobak sampah, satu masing-masing RW. (AM, Agustus 2012)		

Lampiran 4 : Foto dan Gambar

Peneliti



Partisipasi Warga Kelurahan Pulau Panggang pada Wawancara Kelompok tanggal 3 Juni 2011 di aula karang taruna Kelurahan Pulau Panggang terkait dengan masalah yang mereka hadapi saat itu

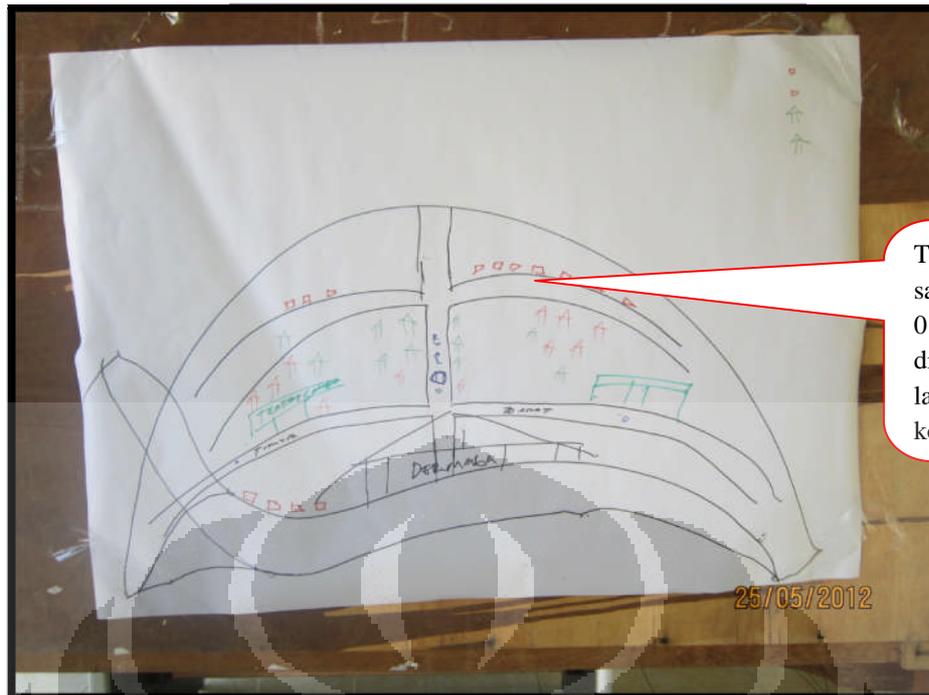
Masalah yang Dihadirkan Masyarakat	Seberapa sering masalah terjadi	Seberapa sering masalah mengganggu masyarakat	Seberapa sering masalah mengganggu masyarakat
1. Penduduk padat	++++	++++	10
2. Sampah	++++	++++	10
3. Lingkungan hidup rusak	++++	++++	10
4. Penyakit kotor	++++	++++	10
5. Tanah yang terdampar	++++	++++	10

Masalah sampah mendapat skor 10

Partisipasi Warga Warga Kelurahan Pulau Panggang pada Wawancara Kelompok tanggal 3 Juni 2011 di aula Karang Taruna Kelurahan Pulau Panggang dengan *tool* Matriks prioritas masalah menunjukkan masalah sampah menjadi masalah yang penting untuk ditangani



Partisipasi warga Pulau Panggang pada Wawancara Kelompok tanggal 25 Mei 2012 bertempat di Kelurahan Pulau Panggang terkait dengan masalah sampah.



Tempat penyebaran sampah warga RW 01 lebih banyak dibandingkan RW lain. Ditandai dengan kotak merah.

Partisipasi warga Pulau Panggang pada Wawancara Kelompok tanggal 25 Mei 2012 bertempat di Kelurahan Pulau Panggang dengan *tool* pemetaan sosial menunjukkan bahwa masalah sampah yang dominan untuk ditangani berada di RW 01.



Diskusi kelompok dengan tokoh masyarakat pada tanggal 1 Agustus 2012.



Diskusi kelompok dengan ibu-ibu rumah tangga RW 01 pada tanggal 5 Agustus 2012.



Partisipasi Warga RW 01 dalam menanggapi tawaran program pengelolaan sampah di RW 01 yang dipaparkan peneliti pada tanggal 12 Agustus 2011 di rumah ketua LMK RW 01

ABSESI KEHADIRA RAPAT MASALAH SAMPAH

Tempat : Rumah Pak Mansyur, Ketua LMK RW 01 Kelurahan Pulau Panggang
 Hari/Tanggal : 12 Agustus 2012
 Waktu : 16:00 – 18:00 WIB

No	Nama	LK/PR	RT/RW	Status/Sebagai	Pekerjaan	Paraf
1	ABOUL SYUKRI	K	004/01	KETUA RW 01	Penyusun PUS	
2	A Jwani	R	01/01	Nelayar		
3	MUS'LIH	R	05/01	BENDAHARA	WIRASWATA	
4	JANNADIN	L	01/01	warga	nelayan	
5	Bahria	P	04/01	WARGA	IBU R.T	
6	KARTINA	P	09/01	-	IBU R.T	
7	Bunga	P	05/01	-	IBU R.T	
8	PARUDAH	P	03/01	ket RW 03/01	IBU R.T	
9	SACAMAH	P	04/01	ket RW 04/01	IBU R.T	
10	mulyati	P	05/01	ket RW 05/01	IBU R.T	
11	MAHSYUR	L	01/01	LMK 01	LMK 01	
12	H. SALURI	L	05/01	NELAYAN	NELAYAN	
13	MADAGI	L	04/01	NELAYAN	TOKOMES	
14	HOLILAH	P	01/01	KETUA RT	IBU R.T.	
15						

Daftar hadir warga RW 01 dalam pemaparan program pengelolaan sampah di RW 01 dan tanggapan warga.